



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



KORPORASI NELAYAN

Mewujudkan
Nelayan Berdaya
dan Sejahtera
Menuju Indonesia
Emas 2045

KORPORATISASI NELAYAN

merupakan upaya membangun kelembagaan nelayan sebagai usaha bersama milik nelayan secara formal dalam rangka menciptakan keberdayaan dan kesejahteraan nelayan. Korporasi Nelayan yang dikembangkan berbasis koperasi menyediakan kesempatan terbuka bagi

nelayan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Melalui wadah koperasi, semua aset yang dimiliki termasuk aset bantuan, pemanfaatannya dioptimalkan melalui unit usaha yang dikelola bersama di koperasi. Model pengembangan ini jika diadopsi di berbagai wilayah akan menumbuhkan keberdayaan nelayan secara luas dan masif.



KORPORASI NELAYAN

Mewujudkan
Nelayan Berdaya
dan Sejahtera
Menuju Indonesia
Emas 2045

KORPORASI NELAYAN

Mewujudkan Nelayan Berdaya dan Sejahtera
Menuju Indonesia Emas 2045

Pengarah:
Lotharia Latif

Editor:
Untung Prastio

Ketua:
Ukon Ahmad Furkon

Desain Sampul:
Jeffri Fernando

Tim Penyusun:

Foto Sampul:
Shutterstock

- 1. Novia Tri Rahmawati**
- 2. Eka Kurniadi**
- 3. Dani Hamdan**
- 4. Lilik Widodo**

Foto Isi:
Dok. DJPT KKP

- 5. Tim Kerja Pemberdayaan Nelayan - DJPT**
- 6. Tim PMO – Deputi Bidang Perkoperasian**

Tata Letak:
Sagita Eka

Tim Penulis:

- 1. Budi Suwarna**
- 2. Andy Riza Hidayat**

Infografik:
Teguh Widyanto

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh:

GagasMedia

Jl. H. Montong No. 57, Ciganjur, Jagakarsa

Jakarta Selatan 12630

Telp. (021) 7888 3030

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN:

978-623-493-321-5

eISBN:

978-623-493-322-2

212 hlm; 18 x 23 cm

KORPORASI NELAYAN

**Mewujudkan Nelayan Berdaya dan Sejahtera
Menuju Indonesia Emas 2045**

DAFTAR ISI

Daftar Isi iv

Prakata vii

BAB I Pendahuluan 1

BAB II Nelayan dan Kesejahteraan 21

BAB III Korporasi Nelayan 31

Memilih Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi_35

Sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan Bersama
Kementerian Koperasi dan UKM_36

Tahapan Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi
Nelayan_43

Alur Penetapan Lembaga Korporasi Nelayan Berbasis
Koperasi_45

Pelatihan dan Pendampingan Korporasi Nelayan Berbasis
Koperasi_47

Pendampingan adalah Kunci_52

BAB IV Koperasi Nelayan Mewujudkan Gerbang Kesejahteraan 63

Perjalanan Nelayan Biak Numfor Melawan Keterbatasan_67

Perjalanan Korporasi Nelayan di Oesapa_88

Perjalanan Korporasi Nelayan di Pulau Pasaran_111

Wakatobi, Rumah Nelayan yang Menjanjikan_126

Menjaga Harapan yang Tumbuh dari Dusun Pancer_135

Suara Generasi Z yang Percaya Masa Depan Ada di Laut_142

Kaum Perempuan Penggerak Roda Korporasi Nelayan_153

Pendamping Masyarakat, Ujung Tombak Program Korporasi_170

BAB V Pelajaran Penting dari Program Korporasi 197

Epilog Mengukir Masa Depan Nelayan dalam Semangat Asta Cita 203



Irjen. Pol. Drs. H. Lotharia Latif, S.H., M.Hum.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan

PRAKATA

PUJI SYUKUR KAMI panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku ini, yang berjudul *“Korporasi Nelayan: Mewujudkan Nelayan Berdaya dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045”*. Buku ini merupakan salah satu wujud nyata dari upaya kolaboratif lintas kementerian dalam mendukung pelaksanaan program prioritas RPJMN 2020–2024.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bekerja sama dengan Deputi Bidang Perkoperasian, Kemenkop UKM telah menjalin sinergi strategis dalam pengembangan kelembagaan korporasi nelayan berbasis koperasi. Kolaborasi ini dirancang untuk memperkuat peran koperasi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mendorong kemandirian dan keberlanjutan sektor perikanan tangkap di Indonesia.

Buku ini mendokumentasikan perjalanan pelaksanaan program sejak tahun 2023 hingga 2024, meliputi strategi, tantangan, dan pencapaian yang telah diraih. Salah satu pendekatan utama dalam program ini adalah pemberian pendampingan intensif kepada koperasi nelayan agar mereka dapat mengoptimalkan peran sebagai mitra utama nelayan dalam mengakses pasar, pembiayaan, serta peningkatan kapasitas usaha.

Kami menyadari bahwa peran koperasi sebagai lembaga ekonomi nelayan memiliki potensi besar untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh nelayan kecil. Karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, referensi, dan panduan bagi pemerintah pusat dan daerah, pengurus koperasi nelayan, pendamping koperasi,

akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam kegiatan koperasi dan perikanan. Kami juga berharap, dengan memahami konsep pengembangan kelembagaan korporasi nelayan berbasis koperasi, para pemangku kepentingan dapat mereplikasi program ini di tingkat daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh komunitas nelayan di seluruh Indonesia.

Keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam setiap tahap pelaksanaannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya Deputy Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sektor koperasi dan perikanan, serta menjadi inspirasi untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam membangun ekonomi masyarakat nelayan yang lebih sejahtera menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lotharia Latif', with a long, sweeping underline that extends to the right.

Lotharia Latif
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB I

Pendahuluan

Mungkin ungkapan ini benar: Tuhan menciptakan Indonesia ketika Ia sedang tersenyum. Betapa tidak, negeri ini dianugerahi keindahan dan kekayaan alam yang melimpah. Tengoklah lautnya. Langit biru dengan awan putih berarak menggantung di atas lautan luas yang berwarna biru safir, hijau, hingga toska pada waktu siang. Kontras dengan warna batu karang yang hitam; pantai berpasir putih, cokelat, atau hitam; dan pohon-pohon di pesisir yang rimbun hijau. Ketika petang datang, langit biru meredup dan berubah warna menjadi merah jingga.

Sebagai negeri maritim, garis pantai Indonesia membentang 108.000 kilometer, menempatkan negeri ini sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Di sepanjang garis itu, pantai-pantai nan permai bertebaran. Salah satunya, Pantai Liang di Ambon, Maluku yang berpasir putih-lembut dengan pohon-pohon nyiur melambai seolah mengucapkan selamat datang. Laut di pantai ini relatif tenang. Hanya sesekali ombak datang untuk mengecup bibir pantai.

Di Lombok, mudah kita temui pantai-pantai putih dengan pasir selembut tepung hingga seukuran merica. Selepas puas menikmati pantai, kita bisa snorkeling dan menjelajah terumbu karang biru di dalam laut, berselancar di atas ombak, menikmati keelokan matahari terbit dan terbenam, berburu mutiara yang warnanya berkilauan, atau menyaksikan migrasi burung pada musim-musim tertentu. Hal yang sama bisa kita saksikan di pantai-pantai menawan di Bali yang sudah tersohor hingga mancanegara sejak dahulu kala.

Tidak hanya indah, alam Indonesia, termasuk lautannya, menyimpan kekayaan alam yang sangat besar. Wilayah Indonesia, yang 75 persennya merupakan lautan, misalnya, dihuni oleh sekitar 8.500 spesies ikan. Angka ini setara dengan 37 persen spesies ikan yang ada di dunia. Selain itu, ada 555 spesies rumput laut dan 590 biota terumbu karang. Di laut Indonesia juga ditemukan sumber minyak bumi, gas, dan sumber-sumber energi terbarukan mulai dari arus, angin, dan ombak.

Di wilayah pantai atau pesisir, tumbuh mangrove yang luasnya mencapai 3,36 juta hektar atau 22 persen dari total luasan mangrove di dunia yang mencapai 14,79 juta hektar. Selain itu, terdapat ekosistem padang lamun terluas di dunia. Luasnya berdasarkan validasi pada 2018 mencapai 293.464 hektar.





KEKAYAAN LAUT INDONESIA



75% wilayah Indonesia adalah lautan



8.500 spesies ikan = **37%** spesies ikan dunia



555 spesies rumput laut



590 biota terumbu karang



sumber minyak bumi, gas



sumber energi terbarukan: arus, angin, dan ombak



3,36 juta hektar mangrove = **22%** mangrove di dunia



293.464 hektar padang lamun pada tahun 2018

Tentu saja sumber daya alam yang ada di laut dan pantai tidak sekadar menunjang perekonomian yang bersifat subsisten. Dalam konteks lebih luas, laut dan pantai menjadi sumber kegiatan ekonomi seperti industri perikanan, industri minyak dan gas, pariwisata bahari, hingga transportasi berbasis laut. Tidak mengherankan jika kekayaan laut dan pantai yang melimpah di Indonesia, menjadi penggerak roda perekonomian yang amat penting, sekaligus penunjang ekosistem kehidupan manusia di muka bumi.



Data statistik menunjukkan, sektor kemaritiman telah berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Pada periode 2017–2021, Produk Domestik Bruto (PDB) Kemaritiman berkontribusi rata-rata 7,71 persen pada PDB Nasional. Pada 2021, pertumbuhan PDB Kemaritiman Indonesia mencapai 2,04 persen dari Total PDB Indonesia. Angka ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,69 persen pada tahun itu.

Perhitungan ekonomi kemaritiman berasal dari 11 klaster, yaitu perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya nonkonvensional, industri bioteknologi, industri kemaritiman, jasa kemaritiman, pariwisata, perhubungan, bangunan laut, serta pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut. Pada 2021, klaster yang memberikan kontribusi terbesar adalah klaster perikanan dan budi daya maritim, yakni 29,11 persen.

Pencapaian itu baru menggambarkan pemanfaatan sumber daya alam dari laut yang bisa direalisasikan. Artinya, masih banyak potensi lain yang belum tergali. Dengan pertimbangan itulah, pemerintah menargetkan kontribusi PDB Kemaritiman bisa ditingkatkan menjadi 12,5 persen pada 2045.

Sebagai klaster yang berkontribusi besar, pertumbuhan sektor perikanan juga perlu terus ditingkatkan. Sejauh ini, sektor perikanan telah memberikan kontribusi 2,73 persen pada PDB Nasional pada 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pencapaian pada 2022 yang tercatat 2,66 persen. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan target pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2024 di kisaran 5-6 persen atau lebih tinggi dibandingkan PDB Perikanan pada 2023 yang tercatat 4,76 persen.



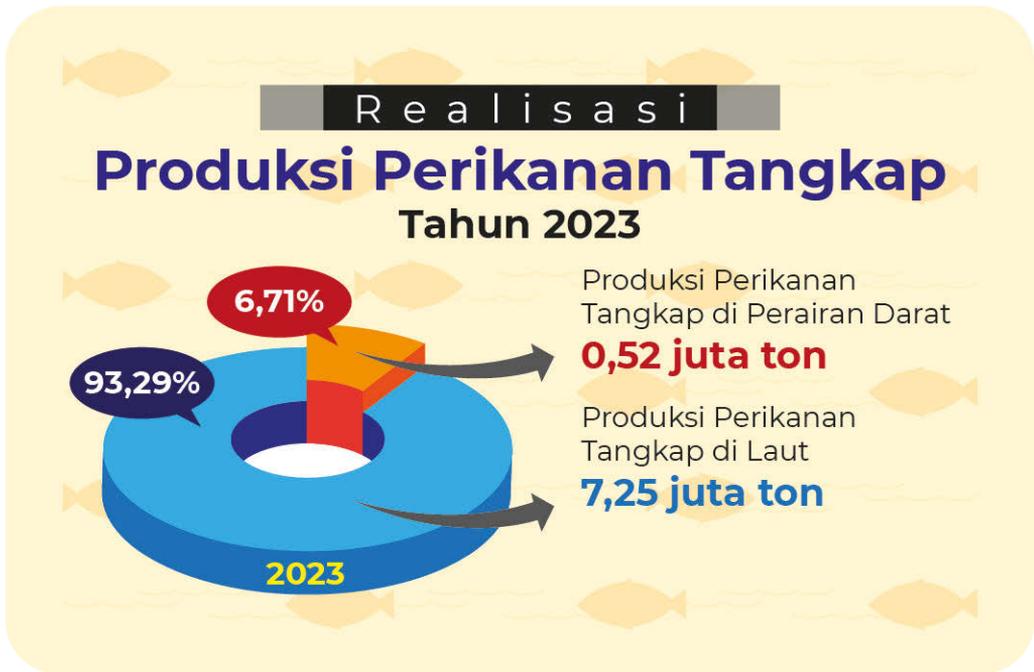
Jika kita melihat pencapaian sejak 2020, angka pertumbuhan PDB Perikanan bersifat fluktuatif. Saat pandemi Covid-19 melanda dunia, pertumbuhan PDB Perikanan nasional sempat mengalami penurunan ke angka 1,06 persen. Penurunan serupa juga dialami oleh banyak negara lain pada sub sektor perikanan. Setahun kemudian, pertumbuhan PDB Perikanan melonjak menjadi 8,99 persen. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, namun kemudian mengalami kenaikan hampir dua kali lipat pada tahun 2023 menjadi 4,7 persen.

KKP berkomitmen untuk mengejar target pertumbuhan tahun ini demi meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian negara. Untuk itu, KKP mengincar nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112 triliun. Angka ini mencerminkan peningkatan signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, yang mencapai USD5,6 miliar atau Rp87,25 triliun. Produksi perikanan juga menjadi fokus dengan target mencapai 30,85 juta ton atau meningkat dari pencapaian tahun sebelumnya 24,74 juta ton.

Sejauh ini, perikanan tangkap menyumbang sekitar 58 persen dari total produksi perikanan Indonesia. Sisanya sebesar 42 persen disumbang oleh perikanan budi daya. Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyebutkan, produksi perikanan tangkap pada 2023 mencapai 7,77 juta ton atau mencapai 95,22 persen dari target tahun 2023, yaitu sebesar 8,16 juta ton.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 menyebutkan, estimasi sumber daya ikan lestari Indonesia mencapai 12,01 juta ton per tahun. Jumlah tersebut akumulasi dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Dari jumlah tersebut, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB) sekitar 8,6 juta ton per tahun.

Dengan demikian, jumlah tangkapan ikan sebesar 7,25 juta ton pada tahun 2023 masih di bawah ambang batas JTB. Proporsi Tangkapan Jenis Ikan tercatat 58,18 (persen) juga berada dalam batasan biologis yang aman. Realisasi produksi perikanan tangkap 2023 berasal dari 93,29% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 7,25 juta ton dan sisanya sebesar 6,71% atau 0,52 juta ton berasal dari produksi perikanan tangkap di perairan darat. Produksi perikanan tangkap di laut tahun 2023 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan produksi perikanan pada tahun 2021 dan 2022.



Di tengah angka-angka statistik yang menunjukkan produksi perikanan tangkap laut yang dalam dua hingga tiga tahun terakhir mengalami fluktuatif, usaha nelayan relatif masih menguntungkan. Hal ini tercermin dari indikator kesejahteraan nelayan yang relatif stabil, dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di atas skor 100 dalam empat tahun terakhir, tahun 2020–2023.

NTN adalah indikator yang dipakai untuk mengetahui kemampuan nilai tukar ikan hasil tangkapan dengan barang atau jasa untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan konsumsi rumah tangga nelayan, sebagaimana dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Skor NTN di atas 100 mengindikasikan kenaikan harga rata-rata yang diterima nelayan lebih besar daripada yang dibayarkan untuk keperluan hidupnya. Dengan kata lain, nilai tangkapan nelayan mengalami surplus dibandingkan nilai konsumsinya. Dalam kondisi seperti ini, kehidupan nelayan dinilai relatif cukup sejahtera.





Meski skor NTN secara nasional masih di atas 100, namun jika kita cermati lebih jauh, kondisi kesejahteraan nelayan ternyata masih rentan mengalami penurunan ketika terjadi gejolak harga barang-barang yang dikonsumsi oleh nelayan. Hal ini terlihat pada NTN sepanjang 2023 yang menunjukkan tren penurunan terutama sejak September yang tercatat 105,64.

Meski tetap terjaga di atas angka 100, pada Oktober, November, hingga Desember 2023 angka Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tajam pada angka 1–2 persen. Pada tahun 2023 tersebut, pencapaian NTN tertinggi terjadi pada April, yakni sebesar 106,52. Fluktuasi yang sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2022 perubahannya berkisar pada angka 1,05.

Terjadinya gejolak harga pada subkelompok makanan, minuman, dan tembakau turut mempengaruhi fluktuasi NTN. Pada kondisi harga komoditas perikanan lebih rendah dibandingkan dengan komoditas yang dikonsumsi oleh nelayan, maka surplus dari hasil pekerjaan sebagai nelayan berkurang.

Kondisi kesejahteraan nelayan yang rentan terdampak gejolak harga kebutuhan konsumsi, juga terjadi pada awal September 2022. Saat itu, skor NTN turun 1,84 poin dari 107,21 pada Agustus 2022. Penyebabnya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sejauh ini, kekayaan sumber daya alam, terutama perikanan yang ada di laut Indonesia memang belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena berbagai faktor. Kondisi ini membuat kesejahteraan nelayan dan warga yang bergantung pada hasil laut, belum terjamin sepenuhnya. Sebaliknya, wilayah pesisir yang umumnya secara geografis berada di tepi laut, justru ditumbuhi kantong-kantong kemiskinan.

Badan Pusat Statistik mencatat, angka kemiskinan wilayah pesisir pada 2022 tercatat 17,74 juta jiwa. Sebanyak 3,9 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem. Angka kemiskinan di wilayah pesisir adalah 68 persen dari total angka kemiskinan nasional.

Pemerintah melalui KKP telah menetapkan kebijakan strategi jangka panjang, yakni Peta Ekonomi Biru 2045. Peta Ekonomi Biru 2045 berisi lima kebijakan utama untuk memastikan laut tetap sehat dan populasi ikan serta jasa lingkungan lainnya terjaga dengan baik. Berikut kelima kebijakan strategis tersebut.

- ▶ Memperluas kawasan konservasi laut.
- ▶ Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dengan memastikan aktivitas penangkapan ikan tidak melebihi maksimum potensi lestari (*maximum sustainable yield*).
- ▶ Pembangunan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.
- ▶ Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- ▶ Pengelolaan sampah plastik di laut.

Peta jalan Ekonomi Biru itu diharapkan akan bisa mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan ekonomi. Keseimbangan interaksi antara kedua aspek tersebut akan membuahkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara luas.

Sebagai turunannya, DJPT membuat sejumlah program untuk merealisasikan tingkat produksi ikan yang optimal sambil terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Berikut program strategis yang telah dijalankan pada tahun 2023.

- ▶ Meningkatkan kesejahteraan nelayan.
- ▶ Memastikan sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan.
- ▶ Mengatur tata kelola sumber daya perikanan tangkap yang bertanggung jawab.
- ▶ Meningkatkan produksi perikanan tangkap.
- ▶ Meningkatkan sektor ekonomi perikanan tangkap.
- ▶ Memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan DJPT.





Peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan dan program strategis di sektor perikanan dan kelautan. Pertimbangannya antara lain karena nelayan merupakan pelaku atau produsen utama di sektor ini. Namun faktanya, nelayan belum menjadi aktor utama dalam industri perikanan. Nelayan misalnya, belum bisa menjadi pihak yang menentukan harga jual perikanan. Selama ini, penentu harga jual ikan dari hasil melaut lebih banyak ditentukan oleh pedagang dan pemilik modal besar.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah menggulirkan program Korporasi Nelayan. Pada RPJMN 2020–2024, pemerintah menetapkan rencana pengembangan 15 korporasi nelayan. Jalan ini ditempuh untuk mempercepat transformasi pengelolaan dan kepemilikan aset usaha perikanan dari individu menjadi badan usaha atau korporasi. Program Korporasi Nelayan diharapkan bisa mendorong nelayan sebagai pelaku utama sektor perikanan yang berkontribusi dari hulu hingga hilir.

Bentuk kelembagaan korporasi nelayan¹ yang dikembangkan adalah korporasi nelayan berbasis koperasi. Pada 2023, DJPT KKP bekerja sama dengan Deputi Bidang Perkoperasian telah mengembangkan koperasi nelayan produsen di lima kampung nelayan, yakni di Biak Numfor, Papua; Kota Bandar Lampung, Lampung; Banyuwangi, Jawa Timur; Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pengembangan koperasi di kelima kampung nelayan tersebut telah berjalan dengan berbagai unit usaha dan produk-produk unggulannya.

Pengembangan korporasi nelayan berbasis koperasi pada tahun 2024 dilanjutkan di sepuluh kampung nelayan, yakni di Kota Semarang, Jawa Tengah; Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah; Kabupaten Pangandaran,

¹ Korporasi nelayan adalah lembaga berbadan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha oleh, dari, dan untuk nelayan yang dibangun melalui konsolidasi pelaku dan usaha untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan nelayan.

Jawa Barat; Kabupaten Lebak, Banten; Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan; Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara; Kota Kendari, Sulawesi Tenggara; Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur; dan Kabupaten Bireuen, Aceh.

DJPT KKP dan Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM memilih koperasi sebagai bentuk badan usaha, karena pengembangan kelembagaan usaha nelayan perlu memperhatikan prinsip pengelolaan sumber daya alam perikanan yang berkeadilan dan sesuai dengan semangat kooperatif dengan asas kekeluargaan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33.

Buku berjudul ***Korporasi Nelayan: Mewujudkan Nelayan Berdaya dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045*** ini memaparkan berbagai upaya yang dilakukan DJPT KKP bersama Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM dalam mengembangkan korporasi nelayan berbasis koperasi di berbagai daerah pada 2023 dan usaha keras komunitas nelayan binaan dalam memperkuat kelembagaan usaha nelayan dalam bentuk koperasi.

Pada bagian awal, buku ini memaparkan kondisi kesejahteraan nelayan secara umum di Indonesia dan faktor-faktor yang membuat mereka belum bisa menjadi aktor utama dalam industri perikanan. Selanjutnya, buku ini memaparkan konsep korporasi nelayan berbasis koperasi dan langkah-langkah untuk menumbuhkan dan mengembangkan koperasi yang diinisiasi oleh KKP dan Kemenkop UKM di sejumlah daerah.

Selanjutnya, buku ini menuturkan perjalanan komunitas nelayan di lima wilayah dalam mengembangkan korporasi nelayan berbasis koperasi. Dari pengalaman mereka, pembaca bisa melihat bagaimana tantangan yang dihadapi komunitas nelayan dan para pendampingnya serta bagaimana mereka mengatasi tantangan dan persoalan yang ada. Pembaca juga bisa menangkap semangat komunitas nelayan





dan mimpi-mimpi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan bersama lewat korporasi nelayan berbasis koperasi.

Program korporasi nelayan berbasis koperasi di komunitas-komunitas tersebut baru dikembangkan sekitar satu tahun. Berbagai pencapaian telah mereka raih baik yang bersifat terukur (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangibile*), dari peningkatan ekonomi, peningkatan kesadaran tentang pentingnya mengelola usaha perikanan secara modern, dan peningkatan kesadaran tentang perlunya usaha penangkapan ikan yang berkelanjutan.

Ternyata, program ini tidak hanya menyentuh dimensi ekonomi, tetapi juga sosial. Dari pengalaman sejumlah komunitas nelayan, program ini juga memperkuat kemandirian kaum perempuan. Selain itu, program ini menggugah kesadaran sejumlah anak muda bahwa mereka bisa menggantungkan masa depan di laut yang kaya.

Bagian kelima, berisi pelajaran penting yang bisa diambil dari pengalaman komunitas-komunitas nelayan yang menjalankan program korporasi nelayan berbasis koperasi dan mengapa program ini sebaiknya terus dilanjutkan. Pada akhirnya penulis berharap buku ini berguna bagi semua pihak yang menaruh perhatian pada berbagai upaya yang bisa ditempuh demi meningkatkan kesejahteraan nelayan.





BAB II

Nelayan dan Kesejahteraan

KEKAYAAN SUMBER DAYA perikanan dan kelautan Indonesia begitu melimpah. Namun, kekayaan itu belum membuat masyarakat yang tinggal di pesisir hidup berkecukupan. Nyatanya yang terjadi justru masyarakat yang tinggal di pesisir belum mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, 12,5 persen kemiskinan berada di area pesisir.

Kemiskinan di pesisir bisa kita lihat wujudnya secara kasatmata dalam bentuk kampung-kampung yang berantakan, tidak memiliki sanitasi yang baik, padat, dan beraroma tak sedap. Hal ini diperparah dengan akses jalan yang kurang memadai. Kondisi ini sering kali malah menyulitkan mereka memasarkan hasil tangkapannya, seperti yang dialami nelayan Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

Sebelum ada program Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi tahun 2023, mereka mengandalkan perahu dan bergantung pasang surut laut untuk memasarkan hasil tangkapannya. Akses jalanan di sana tidak

memungkinkan alat transportasi darat yang memadai masuk ke area pemukiman. Jika laut surut, nelayan kesulitan menurunkan muatan dari perahu. Pada kondisi itu, menurunkan muatan harus hati-hati, karena posisinya cukup sulit. Kondisi tersebut membuat buruh mengalami kesulitan melakukan pembongkaran muatan di kapal, bahkan berisiko gagal.

Tanpa intervensi program bantuan dan pendampingan, nelayan-nelayan di pesisir bergulat dengan keterbatasan. Mereka sangat bergantung pada kemurahan alam yang menyediakan ikan tangkapan, seperti yang terjadi di Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sekitar tahun 1990-an, ikan di Teluk Kupang melimpah dan mudah ditangkap. Sekali menebar jaring atau memancing, banyak ikan tertangkap, dari ikan tembang, cakalang, layang, kerapu, kakap merah, kakap putih, dan kembung.

Kemurahan alam yang ada di Teluk Kupang, membuat nelayan Kampung Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terlena. Selama alam memberi kemurahan, mereka tidak memikirkan bagaimana melestarikan dan mengolah hasil tangkapan. Ikan di perairan itu semakin berkurang. Sementara nelayan semakin bertambah jumlahnya. Musim paceklik makin terasa pada bulan Desember hingga Februari.

Belakangan, sejak siklon tropis Seroja awal April 2021 yang melanda sebagian wilayah pesisir NTT, masa panen dan masa paceklik seperti tidak mengikuti pola lama. Masa panen ikan semakin pendek, sebaliknya masa paceklik menjadi lebih panjang. Sementara itu, nelayan terpaksa menggunakan uang simpanan untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan, sebagian nelayan terlilit utang pada penyedia jasa pinjaman *online*.

Di sisi lain, nelayan belum memiliki daya tawar yang kuat untuk menentukan harga ikan. Tinggi rendahnya harga banyak ditentukan oleh pedagang, seperti yang terjadi pada nelayan di Pulau Pasaran, Kelurahan



Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sebelum ada Program Kalaju dilanjutkan dengan Program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) yang menghadirkan Sentra Pengolahan Ikan Pulau Pasaran pada 2023, nelayan tak bisa mengendalikan harga.

Nelayan tidak punya sarana dan prasarana untuk menyimpan ikan lebih lama serta dipasarkan saat harga ikan sedang bagus. Karena keterbatasan itu, nelayan mengikuti arus pasar. Saat nelayan mendapatkan ikan, tidak lama kemudian mereka jual ke pedagang. Harganya pun ditentukan pedagang yang saat itu membeli ikan mereka.

Pada era tahun 1970-an, Pulau Pasaran terkenal sebagai sentra produksi ikan teri. Transaksi ikan ramai seperti pasar, sehingga lahirlah nama Pasaran di tempat itu. Jejaring dagang nelayan di sana terhubung dengan pedagang perantara ikan di Jakarta, Medan, Padang, Jambi, dan kota-kota lainnya. Sayangnya, sebelum adanya Program Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi, kondisi kampung nelayan di sana penuh keterbatasan.

Begitu pun yang terjadi di Kampung Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Sebelum ada Program Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi tahun 2023, produksi ikan langsung dijual ke Pasar Fandoi, yang berjarak 26 kilometer dari pemukiman warga. Selain memakan waktu dan biaya, penjualan ke pasar tersebut diwarnai ketidakpastian harga. Harga ikan bisa jatuh pada musim ikan, sebaliknya harga ikan naik pada musim paceklik.

Nelayan Samber-Binyeri sebelum tahun 2023, tidak punya sarana penyimpanan ikan, belum ada pabrik es balok, perbengkelan, hingga *docking*². Minimnya sarana prasarana ini menyulitkan nelayan untuk

2 Proses memindahkan kapal ke galangan kapal untuk perawatan, perbaikan, atau penyimpanan.

meningkatkan harga ikan. Seakan-akan, kelimpahan kekayaan perikanan di perairan sekitar Teluk Yapen dan Teluk Cendrawasih tidak berdampak positif pada mereka.

Harga ikan yang rendah tak mampu mencukupi biaya operasional nelayan saat melaut. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) misalnya, untuk sekali melaut menuju ke lokasi penangkapan membutuhkan biaya sekitar Rp500.000. Intervensi pemerintah dibutuhkan untuk mengentaskan mereka dari belenggu persoalan ini. Masyarakat pesisir yang berdampingan dengan kekayaan hasil laut seharusnya ikut menikmati manisnya hasil tangkapan mereka.

Kondisi ini membuat nasib nelayan rentan terhadap perubahan alam, harga ikan, serta harga kebutuhan hidup lain. Perekonomian mereka belum stabil dan tangguh. Hal ini tercermin dari fluktuasi nilai tukar nelayan. Salah satu contohnya, kenaikan harga BBM pada awal September 2022 berdampak pada turunnya NTN sekitar 1,48 poin menjadi 105,24. Penurunan harga kebutuhan hidup akan berdampak sebaliknya. Artinya, fluktuasi NTN meskipun bertahan di atas 100 mengindikasikan tingkat kesejahteraan nelayan relatif belum stabil.

Sebagai aktor utama di sektor perikanan dan kelautan, hasil kegiatan nelayan dianggap surplus terhadap pengeluaran apabila skor NTN rata-rata di atas 100. Meski NTN menunjukkan kehidupan nelayan yang relatif sejahtera, kondisi ini rapuh dan rentan. Ketika harga-harga kebutuhan pokok dan BBM naik, kesejahteraan nelayan bisa langsung tergerogoti.

Sementara itu, beban masyarakat pesisir kian bertambah seiring meningkatnya dampak krisis iklim. Mereka rentan terdampak bertambah tingginya permukaan air laut yang kian menyusutkan area kawasan pesisir pantai. Potensi ancaman di area budi daya perikanan dan kegiatan ekonomi lainnya akibat peningkatan tinggi muka air laut semakin terbuka.



Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melansir, jumlah nelayan pada 2022 mencapai 2.401.540 jiwa. Populasi nelayan itu meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 2.359.264 jiwa. Menurut statistik KKP pada 2023, sebagian besar dari mereka (85 persen) merupakan nelayan skala kecil.

Sartika Djamaluddin, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengungkapkan, Indonesia adalah negara produsen perikanan tangkap terbesar kedua dunia setelah China pada tahun 2020. Pertumbuhan sektor perikanan mencapai 8,2 persen atau di atas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 6,58 persen, (Kompas.id, Kamis, 6/6/2024).

Kontribusi sektor perikanan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga signifikan pada masa pandemi Covid-19, yakni Rp1,2 triliun pada 2022 atau naik 68 persen dibandingkan tahun 2021. Ironisnya, kesejahteraan nelayan masih rendah.

Merujuk sumber yang sama, hasil riset Yayasan Econusa, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memperlihatkan nelayan menghadapi kerentanan hidup semakin tinggi. Nelayan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak luput dari berbagai dampak bencana ekologis dan persoalan iklim. Studi kasus dilakukan pada Kabupaten Aceh Selatan (Aceh), Pematang Jaya (Jawa Tengah), Pangkep (Sulawesi Selatan), dan Ambon (Maluku) terhadap 236 responden, selama periode Mei–Desember 2023. Dari 236 responden nelayan, sebanyak 57 orang atau 24 persen mengalami kerentanan hidup yang majemuk, yakni akibat bencana atau perubahan iklim, minimnya akses BBM, dan gangguan wilayah tangkap.

Menurut Sartika, perubahan iklim yang menyebabkan perubahan suhu muka air laut telah memicu migrasi ikan. Akibatnya, hasil tangkapan menurun dan daerah tangkapan semakin jauh. Nelayan membutuhkan biaya lebih besar untuk melaut. Sementara itu, akses terhadap bahan bakar minyak sulit diperoleh, terutama BBM bersubsidi.



Melihat persoalan ini, Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor, Jawa Barat menyerukan perlunya pembentukan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi, Jumat (9/10/2020). Presiden menyampaikan, bahwa penting adanya model bisnis korporasi nelayan yang tepat, sehingga dapat dijadikan standar dan diduplikasi ke tempat lain.

“Buat masing-masing satu contoh, seperti satu contoh korporasi nelayan yang benar untuk udang misalnya di Lampung, satu contoh korporasi nelayan untuk kepiting yang akan bagus di Kalimantan Utara, dan satu contoh korporasi nelayan untuk budi daya lobster, sehingga akan terlihat bentuk korporasinya,” kata Presiden saat memimpin rapat terbatas.

Pemerintah menyiapkan alokasi dana untuk keperluan itu selama program ini dibuat dengan benar. Sebab, selama puluhan tahun pemerintah membantu nelayan dan petani lewat berbagai program, kenyataannya banyak nelayan dan petani yang belum dapat naik level. Pemerintah menginginkan nelayan dan petani dapat naik level. “Karena itu, buat contoh lebih dahulu agar konkret, fokus, dan tajam di satu, dua, atau tiga lokasi, serta benar-benar dikerjakan dengan baik dan tepat, sehingga dapat menjadi contoh yang nantinya akan diterapkan di tempat lain. Menteri Kelautan dan Perikanan dan pimpinan kementerian atau lembaga terkait agar memperhatikan hal tersebut,” kata Presiden.

Di forum itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengonsolidasikan rencana model bisnis korporasi petani dan nelayan. Sehingga semua menteri dan pimpinan lembaga memiliki pemahaman yang sama terkait korporasi petani dan nelayan. Jangan sampai ada pimpinan kementerian dan lembaga negara yang menerjemahkan korporasi petani dan nelayan secara berbeda-beda.

Seruan Presiden berlanjut di tingkat kementerian. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalin kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Senin (7/8/2023). Salah satu butir penting kerja sama ini adalah pengembangan korporasi nelayan berbasis koperasi. Adapun tujuan dibentuknya koperasi pada program ini di antaranya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan peningkatan pendapatan, meningkatkan produktivitas, memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan daya saing usaha koperasi.

Babak baru telah dimulai. Apakah nasib nelayan akan berubah menjadi lebih baik ke depan seiring dengan bergulirnya Program Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi? Perjuangan semua pihak, baik di tingkat nelayan, pendamping, pemerintah daerah, hingga intervensi pemerintah pusat lewat kementerian terkait, akan menentukan hasilnya.





BAB III

Korporasi Nelayan

SEJATINYA, KEINGINAN UNTUK membangun Korporasi Petani dan Nelayan (KPN) sudah muncul sejak 2017. Dalam Rapat Terbatas “Mengkorporasikan Petani” pada 12 September 2017, Presiden Joko Widodo mengarahkan para pemangku kebijakan untuk mendorong petani bekerja secara berkelompok agar diperoleh skala ekonomi yang efisien, mampu mengakses bahan baku, memiliki manajemen modern, dan memasarkan produk-produknya.

Paradigma sektor pertanian mesti diubah dari kegiatan *on farm* menjadi *on farm* sekaligus *off farm*. Kegiatan pertanian tidak bisa lagi sebatas memproduksi komoditas, tetapi juga masuk ke proses komersialisasi hasil-hasil produksi, seperti yang dilakukan oleh pedagang dan pengepul. Singkatnya, petani dan nelayan mesti terlibat dalam bisnis dari hulu ke hilir. Dengan demikian, petani dapat menikmati nilai tambah dari proses produksi yang dilakukannya.

Awalnya, wacana tentang korporasi petani dan nelayan lebih banyak membicarakan transformasi struktur usaha pertanian. Belakangan, karena karakteristik kegiatan usaha petani dan nelayan hampir sama serta menghadapi permasalahan serupa, wacana mengkorporasikan nelayan, juga mendapat perhatian khusus. Wacana mengkorporasikan nelayan dan pembudidaya ikan digulirkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas tentang Akselerasi Penguatan Sektor Pertanian dan Perikanan pada 10 Desember 2019.

Pada saat itu, Presiden sekali lagi menekankan kepada Kementerian dan Lembaga untuk mendorong petani dan nelayan agar bergabung dalam kelompok atau korporasi besar. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, program korporasi petani dan nelayan ditetapkan sebagai proyek utama (*major project*) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bidang Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Pemerintah menargetkan proyek ini dapat meningkatkan pendapatan petani sebanyak 5 persen dan nelayan 10 persen, serta meningkatkan produktivitas petani dan nelayan 3,8-3,9 persen. Selain itu, korporasi petani dan nelayan harus bisa diimplementasikan dalam program peningkatan penyediaan pangan nasional (*food estate*).

Meski berbagai langkah telah diambil Kementerian dan Lembaga, *pilot project* korporasi petani dan nelayan yang telah dikembangkan, sampai tahun 2019, belum berjalan optimal dan belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pendirian korporasi. Memang sudah terlihat ada kelompok-kelompok petani dan kelompok-kelompok nelayan, tetapi belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem kuat untuk diintegrasikan dengan pihak lain, seperti BUMN atau perusahaan swasta besar.

Karena itu, pada 6 Oktober 2020, Presiden kembali menagih Kementerian dan Lembaga terkait pengimplementasian korporasi dan nelayan dalam sebuah Rapat Terbatas secara virtual. Berikut sejumlah poin arahan yang disampaikan oleh Presiden.

- ▶ Kementerian atau lembaga perlu mendorong petani dan nelayan untuk berkelompok dalam jumlah besar dan berada di dalam sebuah korporasi agar diperoleh skala ekonomi yang efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, petani dan nelayan perlu dipermudah untuk mengakses pembiayaan dan teknologi serta menyambungkan mereka dengan konsumen.
- ▶ Membangun budaya korporasi (*corporate culture*). Untuk itu, pemerintah perlu membimbing petani dan nelayan.
- ▶ Mengembangkan satu atau maksimal dua model bisnis KPN di sebuah provinsi hingga betul-betul berwujud. Setelah itu, model bisnis KPN tersebut harus bisa direplikasi ke daerah lain.
- ▶ Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu didorong untuk pengembangan skala ekonomi yang lebih luas, misalnya untuk mengakses teknologi pertanian.
- ▶ Membangun ekosistem petani dan nelayan serta menyambungkannya ke perusahaan teknologi.
- ▶ Mendorong perusahaan-perusahaan melakukan pembinaan terhadap petani dan nelayan, seperti PNM, Mekar, dan UMi, untuk terus melanjutkan programnya.
- ▶ Kemenko Perekonomian diminta mengonsolidasikan semua Kementerian atau Lembaga yang mempunyai program terkait agar menyamakan pemahaman atas program-programnya dan mengarahkannya pada digitalisasi.

Di tengah kondisi wabah pandemi Covid-19 yang saat itu sedang berkejang, Kementerian dan Lembaga, termasuk KKP, berupaya keras mewujudkan arahan Presiden, antara lain dengan menyiapkan payung hukum sebagai acuan pembinaan KPN, mengidentifikasi data kelembagaan nelayan di seluruh Indonesia yang berpotensi dikembangkan sebagai lembaga KPN. Selain itu, menyinergikan program Kementerian atau Lembaga demi mewujudkan budaya korporasi (*corporate culture*) di kalangan petani dan nelayan.

Sampai tahun 2021, belum ada satu model korporasi petani dan nelayan yang ajek karena beberapa faktor, antara lain regulasi terkait korporasi petani dan nelayan belum ditetapkan; akses permodalan terbatas karena usaha petani dan nelayan masih ada yang *non-bankable*; pembiayaan melalui kredit pemerintah terkendala belum adanya status badan hukum kelembagaan; petani atau nelayan masih memiliki pinjaman komersial lain; program terkait korporasi telah dilakukan di beberapa lokasi oleh Kementerian atau Lembaga, tetapi tetap terkesan masih parsial dan belum terintegrasi.

Sejak rencana korporasi petani dan nelayan digulirkan, diskusi tentang rencana itu memang terus berkembang. Pemerintah telah mendefinisikan korporasi petani dan nelayan sebagai suatu kegiatan usaha bersama oleh petani dan nelayan dalam bentuk usaha ekonomi berbadan hukum yang sebagian besar kepemilikan modalnya dimiliki oleh petani dan nelayan. Meski begitu, model korporasi seperti apa yang cocok untuk komunitas petani dan nelayan di Indonesia, belum jelas benar. Apakah model yang akan dipilih adalah model korporasi berbentuk korporat (perusahaan), koperasi, atau keduanya?

Memilih Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi

Sebagaimana Kementerian dan Lembaga lain, KKP terus berupaya mewujudkan arahan Presiden untuk mengembangkan model korporasi nelayan yang sukses. Salah satu langkah strategis yang diambil KKP adalah mengalokasikan anggarannya pada program-program untuk penguatan sentra produksi ikan di berbagai daerah dan pengembangan keterampilan berwirausaha di kalangan nelayan.

Dalam waktu bersamaan, KKP terus mencari model-model korporasi nelayan yang bisa segera diimplementasikan untuk kesejahteraan nelayan. KKP berupaya mengembangkan kelembagaan usaha nelayan yang memperhatikan prinsip pengelolaan sumber daya alam perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan prinsip ini, KKP mengarahkan desain usaha nelayan berbasis koperasi dengan semangat kekeluargaan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33.

Pertimbangan lainnya adalah model badan usaha koperasi memiliki beberapa keuntungan, yakni nelayan berperan sebagai pengguna sekaligus pemilik (termasuk aset koperasi). Anggota akan memberikan kontribusi yang sama dalam mengembangkan usaha koperasi sekaligus menopang pemenuhan seluruh kebutuhan nelayan. Selain itu, koperasi memiliki ruang cukup besar untuk dapat menjalankan berbagai unit usaha yang akan memberikan pelayanan pemenuhan seluruh kebutuhan nelayan seperti bahan bakar minyak (BBM), es, logistik, perbaikan sarana, pemasaran ikan, dan sebagainya.

Model korporasi nelayan berbasis koperasi telah memiliki preseden kesuksesan di berbagai negara dengan produksi ikan besar seperti Jepang. Asosiasi Koperasi Perikanan (*Fisheries Cooperative Association/ FCA*) Jepang misalnya, mampu mengelola sumber daya lautnya secara berkelanjutan. Kegiatan FCA meliputi bisnis pemasaran ikan, pelelangan ikan, kredit usaha perikanan hingga pengadaan barang dan jasa sarana

prasarana perikanan. FCA mengatur manajemen daerah penangkapan ikan per kawasan, budi daya ikan, jenis alat tangkap yang digunakan, dan jumlah (kuota) hasil tangkapan. Selain itu, FCA menyediakan sarana dan prasarana kegiatan perikanan dari pelabuhan, bahan bakar minyak, air, hingga logistik untuk melaut.

FCA dapat sedemikian maju karena memiliki kelembagaan yang kuat, manajemen profesional, dan kepatuhan yang tinggi pada regulasi yang telah disepakati. FCA secara rutin memberikan pelatihan, pendidikan, pendampingan, dan pengawasan, kepada anggota koperasi.

KKP bekerja sama dengan Bappenas berusaha menyerap pengetahuan dan pengalaman dari koperasi nelayan Jepang dengan mengirimkan sejumlah pegawai KKP, perwakilan pemerintah daerah, dan koperasi perikanan di Indonesia untuk mengikuti pelatihan tentang koperasi nelayan di sejumlah kota di Jepang. Kegiatan ini bekerja sama dengan JICA (*Japan International Cooperation Agency*).

Sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan Bersama Kementerian Koperasi dan UKM

KKP menyadari bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan lewat program korporasi nelayan berbasis koperasi merupakan program lintas sektoral yang tidak bisa hanya dilakukan oleh KKP. Program ini mesti didukung oleh kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan di bidang perikanan dan kelautan.

Pada tahun 2022, KKP Bersama dengan Kemenkop UKM melaksanakan pilot project pengembangan korporasi nelayan di Koperasi Unit Desa Mino Saroyo, Cilacap, Jawa Tengah.

Seiring semakin menguatnya arah kelembagaan korporasi nelayan berbasis koperasi, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Deputi Bidang Perkoperasian melakukan penandatanganan kerja sama pada tanggal 7 Agustus 2023 untuk mengoptimalkan sinergi rencana aksi dan kegiatan antarlembaga guna mendukung penumbuhan dan pengembangan lembaga korporasi nelayan berbasis koperasi, terutama dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola, penguatan sarana usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi.

Berikut ruang lingkup kerja sama yang ditandatangani oleh DJPT KKP dan Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM.

- ▶ Sinkronisasi data kelompok usaha bersama dan koperasi di bidang perikanan tangkap.
- ▶ Pembentukan koperasi bagi kelompok usaha bersama.
- ▶ Peningkatan kapasitas kelembagaan, usaha dan kualitas sumber daya manusia koperasi di bidang perikanan tangkap.
- ▶ Perluasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi koperasi dan anggotanya di bidang perikanan tangkap, dan pengembangan korporasi nelayan berbasis koperasi.

PERJANJIAN KERJA SAMA

**Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

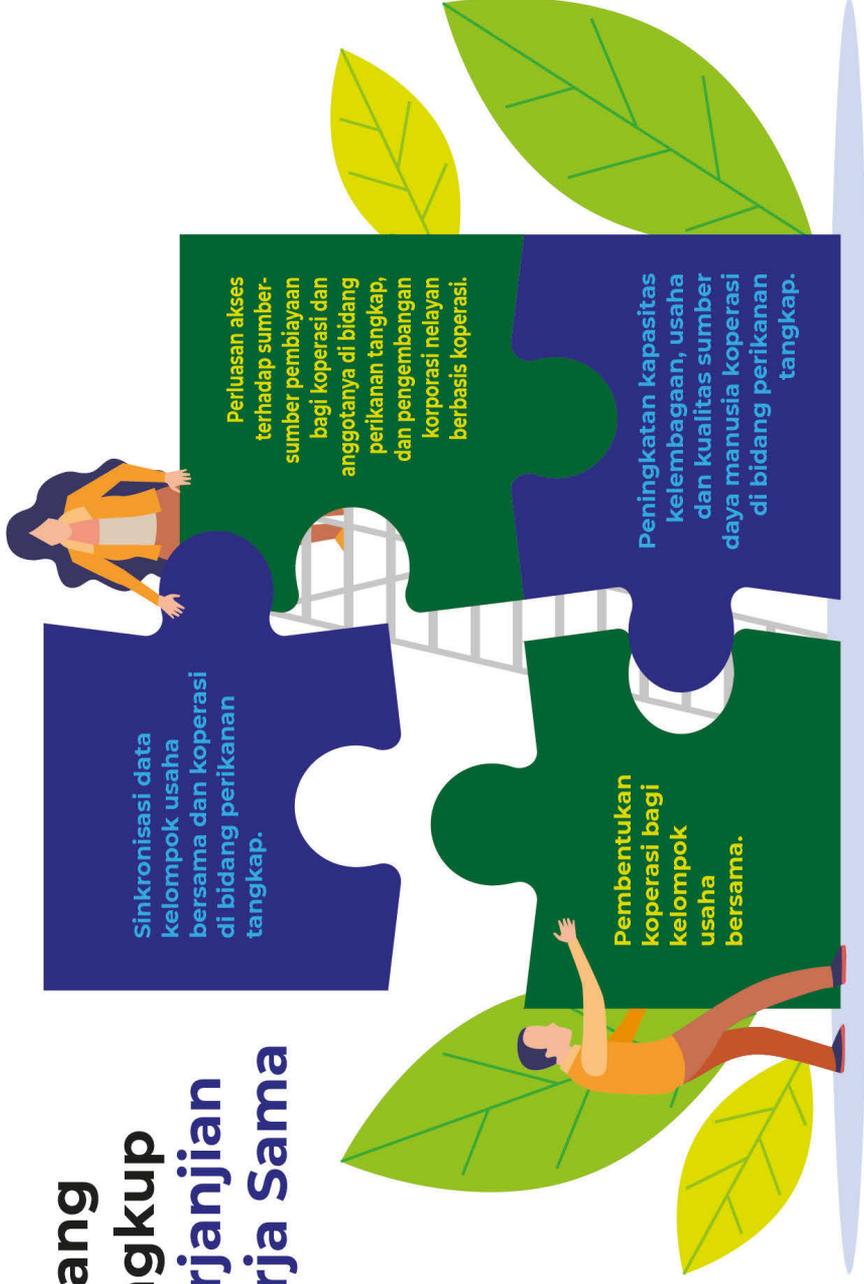
dan

**Deputi Bidang Perkoperasian
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

**Nomor: 20/PT/KKP/PKS/VIII/2023
Nomor: 3/PKS/D.1/VIII/2023**



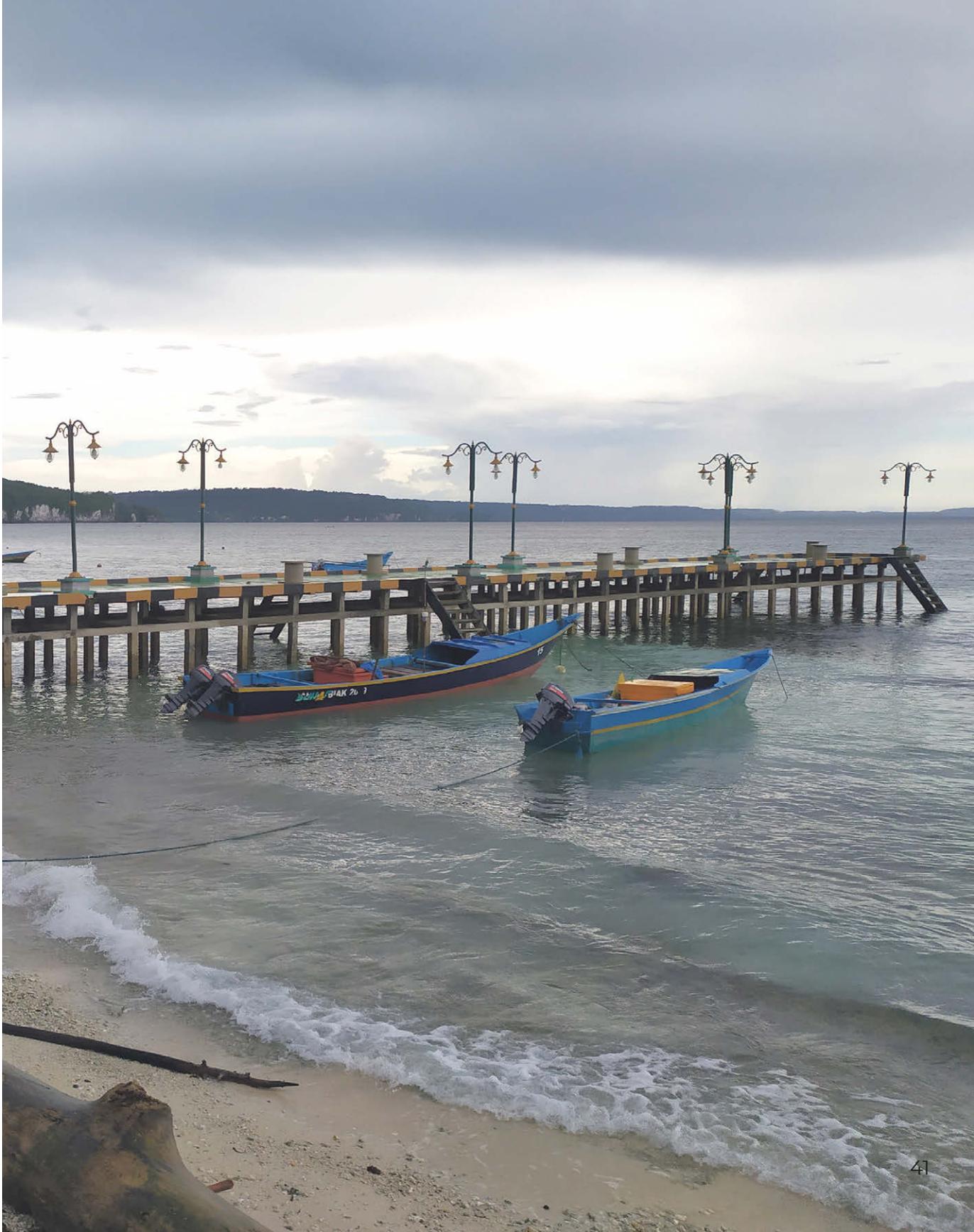
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama



Perjanjian di atas dilaksanakan di lapangan dengan mengembangkan korporasi nelayan berbasis koperasi. Pada tahap awal, KKP dan Kemenkop UKM mengembangkan program ini di lima wilayah, yakni di Bandar Lampung, Biak Numfor, Banyuwangi, Kupang, dan Wakatobi. Pendekatan yang dipakai adalah program terintegrasi dari memperkuat lini produksi, menumbuhkan kemampuan berbisnis nelayan, hingga mengembangkan jaringan bisnis nelayan. Pada saat yang bersamaan, KKP dan Kemenkop UKM menumbuhkan serta mengembangkan koperasi sebagai bentuk usaha bersama di kelima wilayah itu.

Karena itu, pada 2023 KKP mengembangkan ekosistem usaha nelayan secara terpadu dari hulu sampai hilir. Salah satunya melalui program Kampung Nelayan Modern (Kalamo). Program ini berupaya mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial masyarakat nelayan agar mereka lebih produktif, mandiri, memiliki lingkungan yang sehat serta tertata, dan memiliki kapasitas usaha yang memadai. Sebelum Kalamo, KKP telah menggulirkan program Kampung Nelayan Maju yang bertujuan memperkuat sarana dan prasarana pendukung kegiatan produksi nelayan.

Program Kalamo tidak sebatas membangun infrastruktur dan sarana produksi, tetapi juga melakukan *social engineering* atau rekayasa sosial demi menumbuhkan budaya bisnis di kalangan petani. Pembangunan infrastruktur difokuskan pada penyediaan fasilitas yang menunjang aktivitas perikanan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta aksesibilitas ekonomi antarwilayah. Sementara itu, *social engineering* dilakukan pada empat komponen, yakni *capacity building*, koperasi, kewirausahaan, serta sertifikasi, standarisasi, dan perizinan.



KKP menginvestasikan anggaran miliaran rupiah untuk membangun ekosistem sentra produksi nelayan terpadu dalam program Kalamo di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung; dan Sumber-Binyeri, Biak Numfor, Provinsi Papua pada periode September-November 2023. Pembangunan ekosistem produksi terpadu di kedua wilayah itu meliputi perbaikan lingkungan permukiman nelayan, fasilitas produksi perikanan seperti rumah pembeku ikan (*cold storage*), peralatan produksi, sarana angkut ikan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan, bengkel nelayan, warung serba ada, sentra kuliner, hingga peralatan kantor. Proses pembangunan dilaksanakan pada periode Oktober–Desember 2023 dan sudah bisa dimanfaatkan.

Setelah Pulau Pasaran dan Sumber-Binyeri, KKP membangun infrastruktur produksi dan sarana pendukungnya dalam rangka menumbuhkembangkan korporasi nelayan berbasis koperasi, antara lain Kupang, Nusa Tenggara Timur; Banyuwangi, Jawa Timur; Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2024, program korporasi nelayan berbasis koperasi ditumbuhkembangkan di sepuluh kampung nelayan berikut:

- ▶ Kota Semarang, Jawa Tengah.
- ▶ Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
- ▶ Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat
- ▶ Kabupaten Lebak, Banten.
- ▶ Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
- ▶ Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
- ▶ Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
- ▶ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- ▶ Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
- ▶ Kabupaten Bireuen, Aceh.

Tahapan Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Nelayan

Penumbuhan dan pengembangan korporasi nelayan harus memiliki arah. Ia harus tumbuh mengikuti tahapan yang telah ditetapkan. “Kita susun desain penumbuhan dan pengembangan korporasi nelayan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur”, kata Ukon, panggilan akrab Ukon Ahmad Furkon, Direktur Perizinan dan Kenelayanan. Tahapan ini juga untuk memudahkan *monitoring* dan evaluasi, sudah sampai mana penumbuhan ini berjalan, apa saja yang masih harus kita lakukan di Korporasi Nelayan ini, prosesnya berjalan terus”, tambah Ukon.

Tahapan penumbuhan dan pengembangan korporasi nelayan dilakukan dari identifikasi hingga terbangun kemitraan dalam urutan kerangka yang logis. Identifikasi penting untuk memetakan kondisi kelembagaan nelayan sebelum program berjalan. Terbangun kemitraan merupakan indikator kelembagaan nelayan sudah mendapatkan kepercayaan dari mitra bisnis. Sepanjang tahapan itu, Ukon dan tim harus memastikan intervensi yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran. Karena itu, TPM harus memastikan tahapan penumbuhan korporasi nelayan dapat dikawal.

TAHAPAN PENUMBUHAN KORPORASI NELAYAN



TAHAPAN PENGEMBANGAN KORPORASI NELAYAN

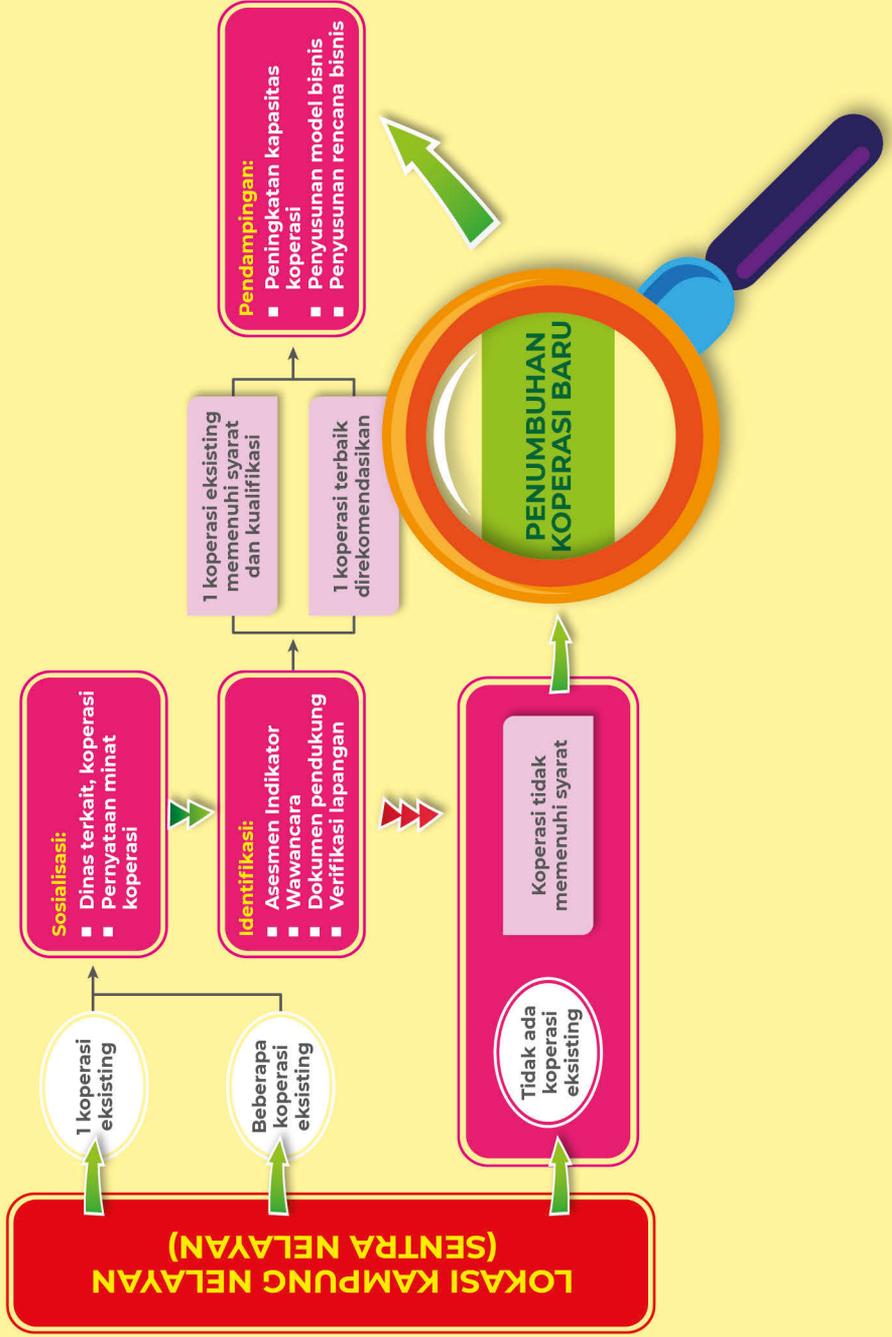


Alur Penetapan Lembaga Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi

Menetapkan lembaga korporasi nelayan berbasis koperasi memiliki tantangannya sendiri. Kerap muncul pertanyaan, bagaimana DJPT menetapkan koperasi mana yang dipilih untuk menjadi sasaran Korporasi Nelayan? Apakah di setiap lokasi ada koperasi ideal yang akan dijadikan sasaran? Tidak mudah mencari koperasi ideal. Karena itu, disusun sejumlah kriteria. Koperasi yang mendekati kriteria, ditetapkan menjadi sasaran. Di lokasi yang belum ada koperasi, ditumbuhkan koperasi baru. Nelayan diajak untuk mengembangkan usaha bersama melalui koperasi.

Kebalikan dengan kondisi di atas, ada juga lokasi yang memiliki lebih dari satu koperasi. Pada beberapa lokasi bahkan jarak antar koperasi cukup berdekatan. Jika kondisi ini yang terjadi, DJPT menetapkan kriteria sekaligus melakukan verifikasi lapangan. Selain soal kriteria, koperasi juga dituntut komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada Program Korporasi Nelayan dan memanfaatkan bantuan untuk dijadikan aset produktif melalui unit usaha di koperasi.

ALUR PENETAPAN LEMBAGA KORPORASI NELAYAN BERBASIS KOPERASI DI KAMPUNG NELAYAN (SENTRA NELAYAN)



Pelatihan dan Pendampingan Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi

Dalam banyak kasus, bantuan dan program yang diberikan begitu saja tanpa pendampingan masyarakat, kerap tidak memberikan hasil optimal. KKP dan Kemenkop UKM tidak ingin program korporasi nelayan berbasis koperasi bernasib seperti itu. Karena itu, sejak awal konsep korporasi nelayan berbasis koperasi didesain dengan memasukkan elemen pelatihan dan pendampingan sebagai elemen kunci keberhasilan pengembangan korporasi.

Dengan demikian, infrastruktur dan sarana pendukung lini produksi nelayan yang sekaligus menjadi aset koperasi nelayan, bisa dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan semua anggota. Pada saat yang sama, kelembagaan dan kapasitas usaha koperasi nelayan juga meningkat.

Ada dua jenis pendamping yang diseleksi ketat untuk mendampingi masyarakat sejak proses identifikasi calon lembaga korporasi nelayan. Mereka adalah tim pendamping masyarakat dan tim pendamping koperasi modern. Para pendamping ini diseleksi secara ketat oleh KKP dan Kemenkop UKM yang selanjutnya diterjunkan ke wilayah proyek sejak proses penumbuhan korporasi nelayan berbasis koperasi.

Secara garis besar, kerja tim pendamping nelayan ini terkait: *pertama*, pendampingan; *kedua*, peningkatan kapasitas kelembagaan; *ketiga*, peningkatan kapasitas bisnis korporasi nelayan berbasis koperasi; *keempat*, peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam banyak kasus, tim pendamping nelayan di lokasi proyek tidak hanya bekerja menurut ruang lingkup pekerjaannya, tetapi juga mesti turun tangan mengatasi berbagai persoalan di lapangan, misalnya, mengatasi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap model usaha koperasi, membujuk warga untuk menjadi anggota koperasi, membangun optimisme di kalangan nelayan di tengah tekanan hidup, mengatasi kemungkinan konflik antarwarga, hingga mengajarkan hal-hal yang tampak sepele seperti bagaimana menggunakan laptop atau komputer pada pengurus koperasi yang sebelumnya tidak akrab dengan piranti tersebut.

Setelah proyek ini berjalan selama satu tahun, sudah ada lima korporasi nelayan berbasis koperasi yang sudah masuk tahap pengembangan, yakni di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung; dan Sumber-Binyeri, Biak Numfor, Provinsi Papua; Oesapa, Kupang, Nusa Tenggara Timur; Banyuwangi; Jawa Timur; dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, 10 koperasi lainnya dalam tahap penumbuhan menuju pengembangan, yakni di Kota Semarang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Lebak, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Takalar, Kabupaten Konawe, Kota Kendari, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Bireuen.

Bagaimana perjalanan kelima korporasi nelayan berbasis koperasi, bagaimana para nelayan dan pendamping mengatasi tantangan-tantangan yang ada, akan dituangkan secara rinci pada bagian selanjutnya.

Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Nelayan Tahun 2024

**PROGRAM
KORPORASI NELAYAN
BERBASIS KOPERASI
DITUMBUH-
KEMBANGKAN DI
SEPULUH KAMPUNG
NELAYAN**

Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat

Kabupaten Lebak, Banten

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan

Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Kabupaten Manggarai Barat, NTT

Kabupaten Bireun, Aceh

RUANG LINGKUP TUGAS PENDAMPING

PENDAMPINGAN

- Mengidentifikasi calon lembaga korporasi nelayan
- Membuat analisis SWOT
- *Business Model Canvas* (BMC)
- Memetakan pemangku kepentingan
- Melakukan asesmen pada koperasi
- Mendampingi pembuatan model bisnis serta rencana strategis

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

- Legalitas keanggotaan
- Pembuatan *standard operational procedure* atau *standard operational management*
- Memastikan kelengkapan fasilitas kantor koperasi

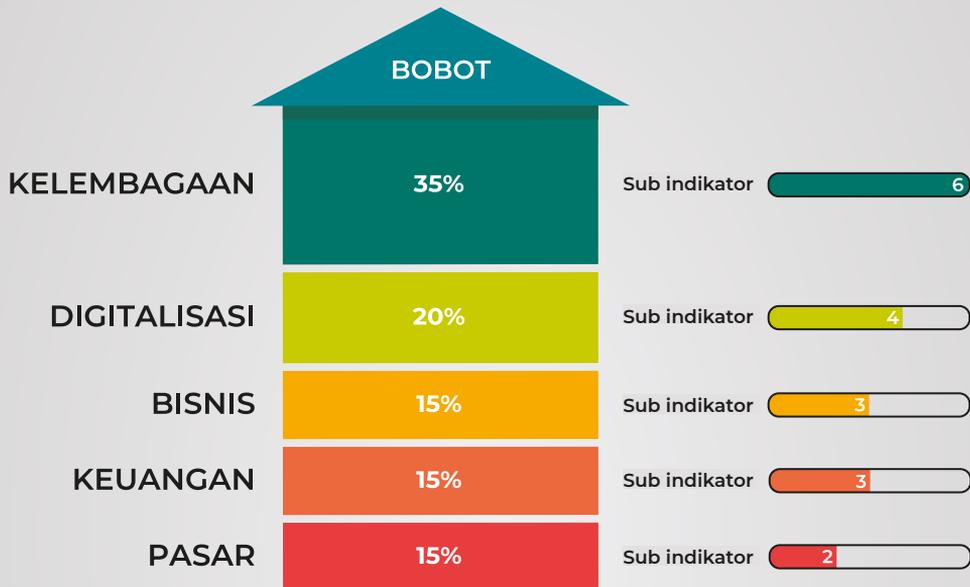
PENINGKATAN KAPASITAS BISNIS KORPORASI NELAYAN BERBASIS KOPERASI

- Pendampingan pembuatan rencana bisnis koperasi
- Pembuatan *standard operational procedure* unit usaha, kemitraan, promosi, dan sosialisasi koperasi nelayan
- Pemanfaatan bantuan korporasi

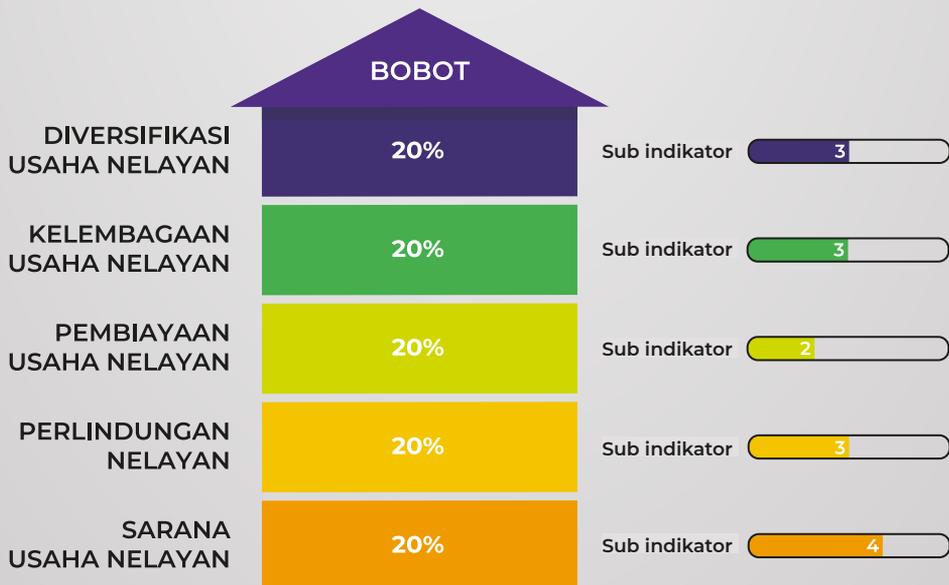
PENINGKATAN KUALITAS SDM

- Pendampingan pengelolaan keuangan
- Menggelar pendidikan-pelatihan atau memberikan bimbingan teknis
- Magang dan membimbing penerapan digitalisasi koperasi

ASESMEN INDIKATOR KOPERASI



ASESMEN INDIKATOR USAHA NELAYAN



Pendampingan adalah Kunci

Dalam program Korporasi Nelayan, pendampingan adalah kegiatan kunci. Menempatkan pendamping di lokasi koperasi secara melekat hasilnya efektif. Pendamping ini disebut dengan Tenaga Pendamping Masyarakat atau ringkasnya TPM. Untuk menjadi seorang TPM yang andal syarat kualifikasinya lumayan tinggi. Ada kualifikasi akademik, yaitu pengalaman bekerja pada bidang yang relevan, memiliki keterampilan pendukung, dan cakap ketika diwawancara. Mereka direkrut secara terbuka dari seluruh penjuru tanah air. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan *skill*-nya beragam serta harus mumpuni.

Untuk rekrutmen ini DJPT dibantu oleh Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Lima belas orang TPM yang mendampingi koperasi di Program Korporasi Nelayan direkomendasikan oleh Kemenkop UKM. Mereka, para TPM pada tahun lalu dan tahun ini bersaing dengan 2.000–3.000 pelamar untuk menjadi pendamping koperasi. Kemenkop UKM memberi rekomendasi nama-nama calon tenaga pendamping yang sesuai dan pada lokasi yang berdekatan. Nama-nama ini kemudian dilakukan lagi uji kelengkapan administrasi dan wawancara. Jika lolos, mereka harus menandatangani pernyataan komitmen dan mengikuti sesi Orientasi Pendamping.

Pada kegiatan orientasi, para TPM dibekali berbagai materi seperti regulasi, arah kebijakan program, materi perkoperasian, materi tentang nelayan dan terutama materi metode serta kertas kerja pendampingan. Mereka harus membawa pengetahuan, cara kerja, dan alat kerja yang cukup memadai. Cara kerja pendampingan harus metodologis, terencana, jelas sasaran, jelas hasil yang diharapkan, jelas lini masanya. Untuk bisa mencapai itu semua, TPM dibekali dengan kertas kerja dan cara menggunakannya. Kertas kerja ini terdiri dari tujuh jenis, di antaranya kertas kerja pemetaan kondisi koperasi, *profiling*, penyusunan rencana kerja, penyusunan *business plan*, hingga analisis kelayakan bisnis koperasi.

Tabel Kertas Kerja Pendampingan

Nama Kertas Kerja	Fungsi	Cara Penggunaan
Peta <i>stakeholder</i>	Menggambarkan pemangku kepentingan dan perannya bagi koperasi.	Diisi oleh pihak pemangku kepentingan, peran, dan pengaruhnya bagi koperasi.
Analisis SWOT	Menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh koperasi.	Diisi pada tabel yang telah disediakan untuk empat indikator, kemudian dibuat matriks antarindikator dan analisis internal maupun eksternal.
<i>Business Model Canvas</i> (BMC)	Dikembangkan dari Osterwalder dan Pigneur dalam mengembangkan sembilan blok untuk menggambarkan kondisi suatu unit usaha, dalam hal ini unit usaha koperasi.	Setiap blok diisi dengan fungsi masing-masing untuk menggambarkan kondisi unit usaha yang dikelola oleh koperasi.
Profil Ringkas Koperasi	Biasa disingkat POS (<i>profile in one sheet</i>) untuk memberikan informasi ringkas tentang koperasi dari profil umum, profil usaha, keanggotaan, maupun rencana pengembangan koperasi.	Diisi pada <i>design template</i> yang telah tersedia dengan cara pengisian yang telah ditentukan.
Asesmen Indikator Koperasi	Merupakan kertas kerja yang disusun oleh PMO Deputy Bidang Perkoperasian untuk menilai tingkat modernitas dan kesehatan suatu koperasi dengan mengukur indikator kelembagaan-tata kelola, bisnis, keuangan, dan digitalisasi.	Diisi dengan cara memberikan tanda pada daftar periksa (<i>check list</i>) sesuai dengan masing-masing indikator dan sub indikator.
Alur Proses Bisnis	Bagan yang menggambarkan proses bisnis koperasi sektor riil, dari hulu (sumber pasokan) hingga produk diolah dan dipasarkan, termasuk stakeholder terkait dan pola hubungan yang berkembang.	Koperasi ditempatkan sebagai pusat, dibuatkan hubungan ke hulu dan ke hilir, unit usaha, dan pola hubungan dengan berbagai pihak
Rencana Strategis	Dokumen perencanaan koperasi untuk lima tahun kerja yang menguraikan apa saja yang harus dicapai, baik tahunan maupun akumulatif 5 tahun, dan cara mencapainya melalui berbagai kegiatan.	Dibuat dalam tabel yang berisi kegiatan, hasil dan capaian dalam kerangka waktu 5 tahun.

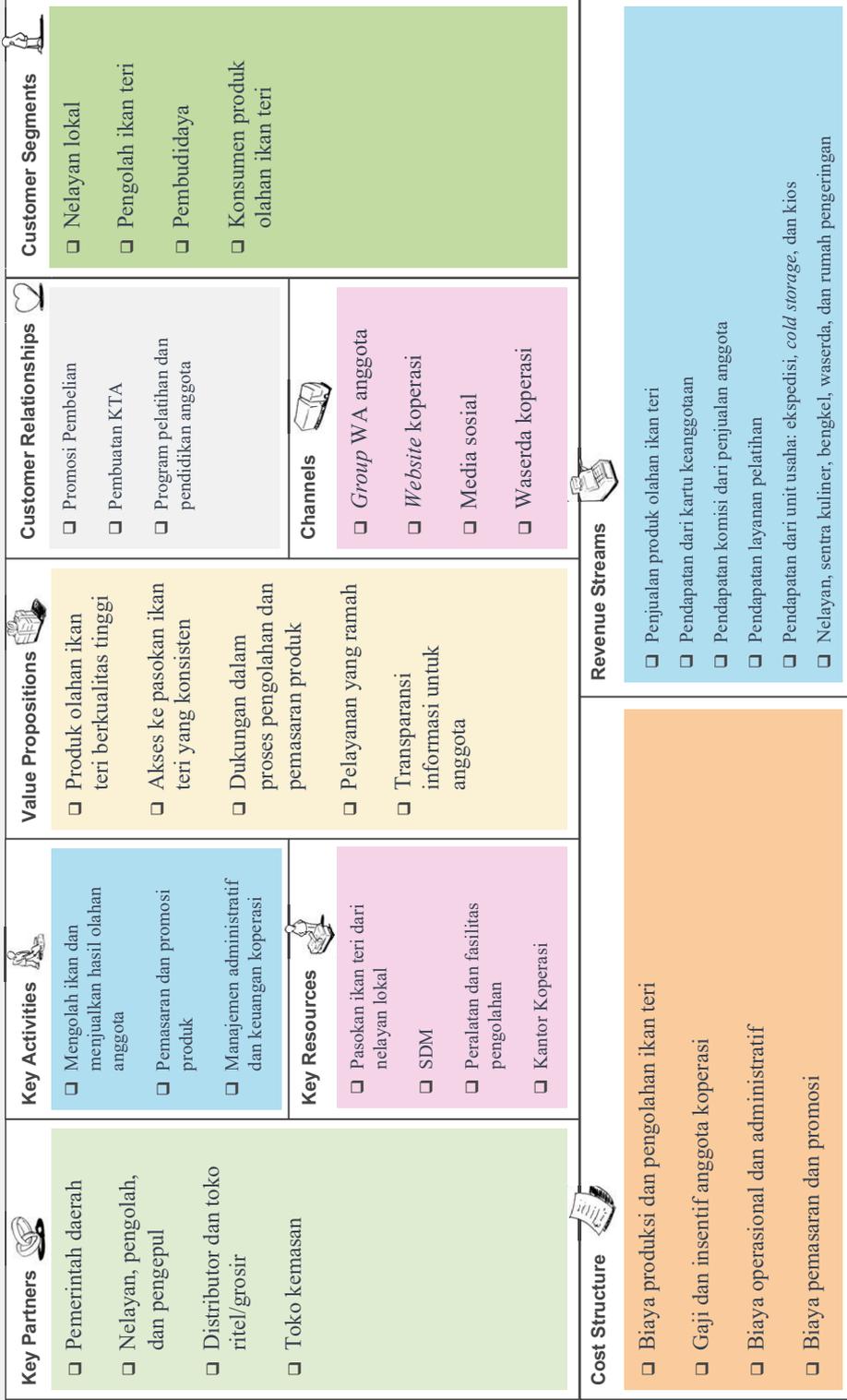
Designed for:
Unit Usaha Pengolahan Ikan
Koperasi Produsen Kalajau Pulau Pasaran

Designed by:
Adi Sumarna

Date:
30 Juli 2024

Version:
1

Business Model Canvas



Contoh Profile in One Sheet

Koperasi Produsen

Nelayan Samata Padakkau

Alamat	: Desa Mola Utara, Kec. Wangi-wangi Selatan, Kab. Wakatobi
NIK	: 7408060190001
No. BH	: Akta.05/Tanggal 08 Oktober 2019 - AHU-0000093_AH.01.26 Tahun 2019

Instagram	: koperasi_samata_padakkau
Kontak	: 0853-9697-8450
Website	: -

Tahun 2024

Modal Sendiri
Rp 50.000.000,-

Modal Luar
-

Dana Kelola
Rp 600.000.000,-

Aset
Rp 1.052.579.000
Miliar

Anggota
52
Orang

Unit Bisnis
Jual Beli Hasil Laut – Jasa
Transportasi – ES Balok- Bengkel
Nelayan

Kegiatan Bisnis Koperasi

Koperasi Produsen Nelayan Samata Padakkau melakukan aktivitas usaha yang berfokus pada Jual-Beli Hasil Laut (Tuna Lain, Kerapu/Sunu), Jasa Transportasi (Darat), Es Balok dan Bengkel Nelayan. Selain itu Koperasi juga aktif dalam kegiatan konservasi dan peduli lingkungan.

Produk Layanan Koperasi

Menyediakan produk perikanan berkualitas tinggi (ikan tuna), penyedia jasa transportasi darat, menyediakan es balok serta layanan bengkel nelayan baik anggota dan mitra koperasi.

Pasar

PT Delapan Jaya, CV NJF, PT Asia Bahari Fisheri, Rania, CV Manara Artha Samudra

Pembiayaan

Modal Sendiri

Digitalisasi

Memiliki akun media sosial Instagram @koperasi_samata_padakkau Memiliki media pencatatan laporan keuangan digital dengan IPOST

Rencana Pengembangan

- Menyusun SOP dan SOM Koperasi
- Mendampingi perihal penguatan kelembagaan koperasi dan peningkatan kapasitas SDM Koperasi
- Mendampingi Manajemen Bisnis Koperasi
- Monev pemanfaatan bantuan pendukung usaha dari pemerintah

Informasi Tambahan Koperasi

- Anggota koperasi didominasi nelayan tangkap
- Koperasi ini menerapkan prinsip perikanan berkelanjutan sebagai nilai
- Koperasi telah menjadi dampingan beberapa instansi pemerintah maupun lembaga lainnya

Riwayat Intervensi

- Bantuan sarana korporasi nelayan
- Pelatihan berbasis kompetensi
- Bimtek operasionalisasi aplikasi keuangan digital (IPOS)
- Magang koperasi
- Pelatihan administrasi, keuangan, & digitalisasi



INTERVENSI : KOPERASI PRODUSEN NELAYAN SAMATA PADA KAKAU

Rencana Pengembangan	Rencana Prioritas
Menyusun SOP & SOM Koperasi Dampingan	Pendampingan penguatan kelembagaan koperasi
Pendampingan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM Koperasi	Menyusun SOP dan SOM Koperasi
Mendampingi Manajemen Bisnis Koperasi dan Monev Pemanfaatan Bantuan oleh pemerintah	Peningkatan kapasitas SDM Koperasi
Penyusunan POS dan Katalog Produk Koperasi	Penyusunan POS dan Katalog Produk Koperasi

Realisasi Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi	Tanggal
Penyusunan SOP dan SOM	Menyusun SOP Bersama Pengurus Koperasi	Kantor Sekretariat Koperasi Produsen Nelayan Samata Padakkau	18 - 29 Agustus 2014
Pendampingan Manajemen Bisnis Koperasi Dalam Hilirisasi Perikanan	Mendampingi Koperasi dalam Temu Bisnis Perikanan bersama DKP	Hotel Wisata, Kab. Wakatobi	29 Agustus 2024
Monev Pemanfaatan Bantuan	Observasi pemanfaatan bantuan KALAJU	Desa Mola Utara Kab. Wakatobi	15, 21, 24 Agustus 2024
Penyusunan POS dan Katalog Produk Koperasi	Mengumpulkan data unit usaha koperasi dan produk unggulan	Mini Plan Koperasi, Desa Mola Utara Kab. Wakatobi	16 – 26 Agustus 2024

Update : 04 /09/2024
 Oleh : Muh. Syahwan Ode

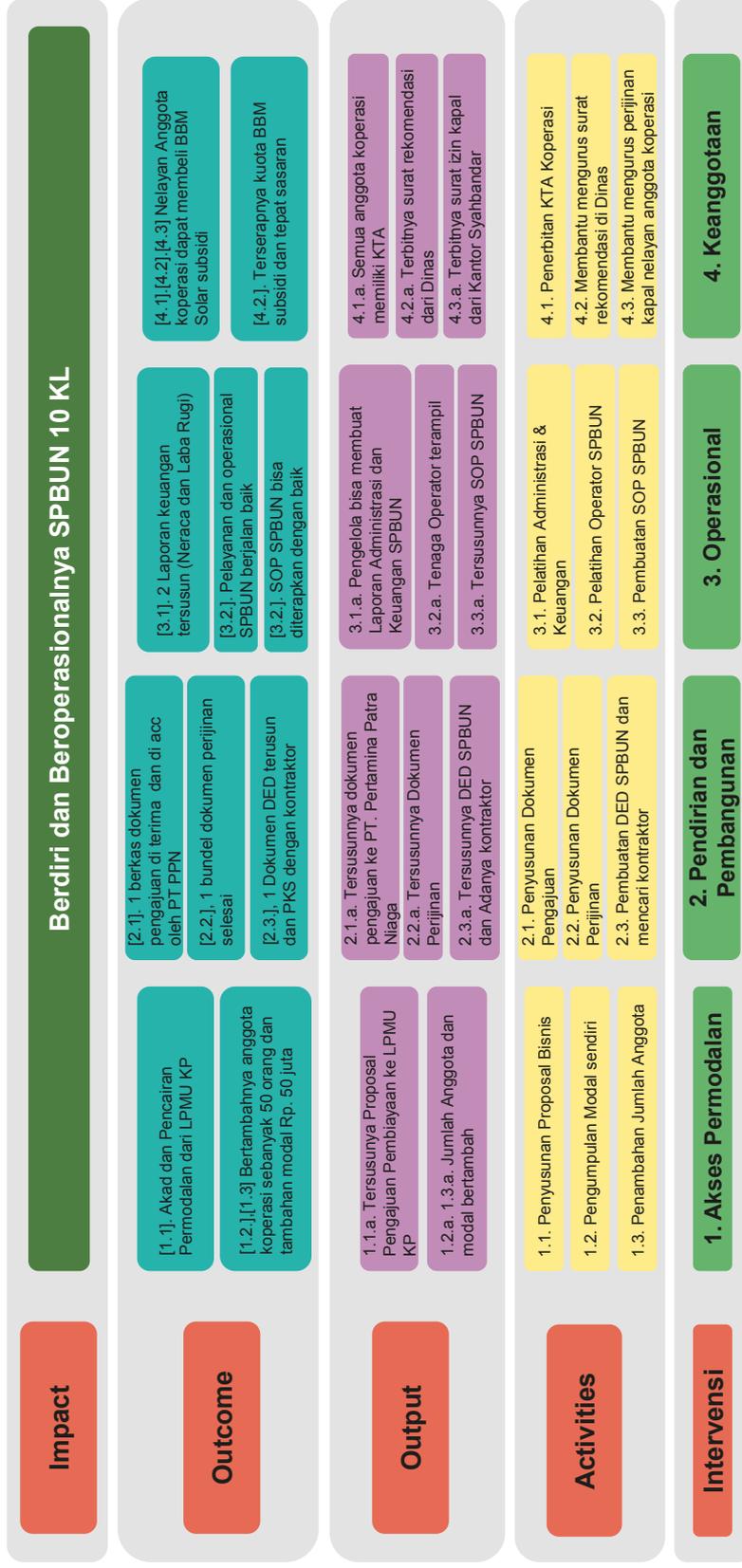
Tak hanya kertas kerja, TPM juga dibekali metodologi atau cara berpikir dan bekerja secara logis. Dulu, cara kerja ini sering disebut *logical framework*, kerangka kerja logis. Untuk pembekalan TPM, kerangka tersebut dikembangkan dengan menggunakan RCC (*Result Chain Chart*), suatu alat untuk mengilustrasikan atau memvisualisasikan bagaimana hasil dan dampak sebuah program. Alat ini bisa juga disebut dengan *pipeline model* karena bentuknya yang mengalir menyerupai pipa. Ada juga yang menyebut dengan *causal model* atau model sebab akibat, satu tahapan menyebabkan hasil atau menjadi musabab terjadi hal lainnya. Apa pun sebutannya, alat ini akan memudahkan TPM dalam kegiatan pendampingan. Alat ini membantu dalam memvisualisasikan hal-hal yang abstrak menjadi lebih mudah untuk dilihat, dipelajari, ditransfer, dan terutama diterapkan di koperasi dampingan.

Tak sulit bagi para TPM untuk belajar alat-alat kerja itu semua. Latar pendidikan dan pengalaman memudahkan mereka untuk cepat menyerap materi metode dan kertas kerja. Selama kegiatan orientasi, para TPM menerima materi teori, melakukan praktik, berdiskusi, dan bekerja kelompok untuk memecahkan masalah. Studi kasus dipilih dari masing-masing koperasi, agar *feel-nya dapet*, tidak mengawang-awang. Solusi konkretnya juga bisa lebih tepat sasaran. Secara teori maupun praktik, materi diisi oleh para narasumber yang kompeten, baik dari kementerian dan lembaga maupun dari kalangan profesional.

Setelah kegiatan orientasi, para TPM dilepas ke masing-masing koperasi dampingan. Pendampingan ini memang tidak main-main; bukan sekali dua kali hadir terus menghilang, para TPM harus tinggal selama tiga bulan penuh di koperasi dampingan. Istilahnya, pendampingan melekat. Para TPM menjadi bagian dari kerja sehari-hari koperasi. Prasyarat ini sudah diberitahukan sejak mereka direkrut, diwawancara, dan menandatangani kontrak. Jadwal pendampingannya pasti padat. Para TPM juga harus mengisi jurnal harian, apa saja yang mereka kerjakan dari hari ke hari.

Tak jarang meluncur cerita suka dan duka selama melaksanakan kegiatan pendampingan. Sukanya, jika pihak koperasi yang didampingi benar-benar terbuka dan mau bekerja sama dan berpartisipasi aktif. Dukanya,

CONTOH KERTAS KERJA RESULT CHART UNTUK UNIT USAHA SPBU NELAYAN



jika ada kendala operasional di lapangan yang sulit dicari solusinya. Atau menghadapi pihak-pihak yang sulit untuk diajak bekerja sama. Aneka cerita itu muncul saat tim DJPT melakukan *monitoring* dan evaluasi di lapangan atau *teleconference* melalui *Zoom*. Tak sekadar cerita soal pendampingan koperasi, satu dua cerita malah TPM harus ikut melakukan mediasi ketika ada potensi konflik antar kelompok. Cerita lainnya, ada TPM yang disediakan tempat tinggal yang layak sampai mau direkrut menjadi pengelola unit usaha koperasi setelah pendampingan selesai.

ETIKA PENDAMPINGAN

Untuk dapat dengan mudah beradaptasi dengan koperasi dan dampingan serta lingkungannya, TPM juga dibekali dengan etika pendampingan. Semacam standar perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan standar itu dapat dipastikan TPM berada pada koridor kerja yang benar. Pada materi orientasi, soal etika ini diuraikan ringkas namun jelas.

1. Tenaga Pendamping Masyarakat merupakan individu yang telah melewati tahapan seleksi berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan komitmen dalam mendampingi koperasi.
2. Pada Tenaga Pendamping Masyarakat melekat nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi meliputi integritas dan keberpihakan kepada pengembangan koperasi. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang Tenaga Pendamping Masyarakat.
 - Memberikan perhatian sepenuhnya pada kondisi dan kebutuhan koperasi yang didampingi.
 - Memiliki pemahaman yang memadai terhadap kondisi koperasi, potensi pengembangan, dan prioritas pengembangan koperasi.
 - Memberikan ruang bagi pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota koperasi, untuk menjadi pelaku utama pengembangan koperasi.
 - Menghargai mekanisme dan prosedur yang berlaku di koperasi.
 - Menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) koperasi.

EXIT STRATEGY

Kegiatan pendampingan harus memiliki batas waktu, tidak boleh terus menerus. Batas waktu pendampingan harus sudah ditetapkan sejak pendampingan dirancang dan direncanakan. Koperasi tidak bisa terus menggantungkan diri pada keberadaan Tenaga Pendamping Masyarakat. Kondisi ketergantungan akan mengurangi kesempatan koperasi untuk mandiri, untuk tumbuh dan berkembang dengan kemampuan sendiri.

Pendampingan pada Program Korporasi Nelayan telah didesain agar koperasi tidak tergantung pada keberadaan TPM. Sebagai contoh, TPM dapat membantu menyusun *standard operating procedure* (SOP) unit bisnis koperasi. Agar SOP dapat dijalankan, TPM melaksanakan *transfer knowledge* bagi pihak yang menjalankan SOP. TPM memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan SOP. Targetnya jelas, koperasi harus menjalankan SOP selama didampingi sampai saat pendampingan selesai.

Beberapa contoh sejenis dapat disebut. Misal pada pengelolaan keuangan, keanggotaan, kemitraan bisnis, pemasaran, digitalisasi sampai pembiayaan. Targetnya sama, apa yang sudah berjalan pada saat pendampingan, harus tetap berjalan. Namun demikian TPM juga tahu kapan pendampingan harus masuk tahap *phasing out*. Fase untuk mengakhiri pendampingan dan meninggalkan koperasi. Fase ini riskan, terutama jika TPM tidak memiliki strategi untuk keberlanjutan pengembangan koperasi.

Oleh karenanya, TPM dibekali cara menyusun apa yang disebut sebagai *exit strategy*. Ini adalah strategi untuk mengusulkan tindak lanjut apa yang harus dilaksanakan oleh koperasi agar hasil pendampingan dapat berkelanjutan, agar koperasi tidak *mandek*. Strategi ini biasanya disusun dalam tabel sederhana, yang penting jelas apa yang harus dilakukan, melibatkan siapa, hasil apa yang diharapkan dan kapan harus dilaksanakan, setidaknya untuk satu tahun ke depan.

EXIT STRATEGY

WHAT



Serangkaian usulan **strategis** dalam rangka secara **aktif** mengembangkan koperasi **berkelanjutan** dengan keterlibatan multi pihak baik secara G to B maupun B to B

WHY



Perkoperasian sebagai entitas multi sektor, perlu melibatkan berbagai pihak



Siklus pengembangan tidak boleh terputus



Jaringan kerja koperasi harus terus diperluas



Pengembangan koperasi terus tercatat



Upaya untuk terus menerus mengembangkan ekosistem

HOW

how to do?

- (1) Mengumpulkan informasi yang komprehensif terkait koperasi yang didampingi: Kelembagaan/tata kelola, bisnis, keuangan, pasar, pembiayaan, digitalisasi, pasokan bahan baku. Semakin komprehensif dan akurat semakin baik
- (2) Memetakan kondisi koperasi dengan stakeholder yang sudah diidentifikasi
- (3) Menguraikan secara spesifik bentuk intervensi dan atau kerjasama apa yang dapat diusulkan
- (4) Menyusun ke dalam tabel Exit Strategy
- (5) Mendiskusikan tabel Exit Strategy dengan Pengurus Koperasi: mana yang realistis, mana yang tidak mungkin, mana yang perlu segera, mana yang bisa ditunda
- (6) Menyusun ke dalam timeline untuk rencana kerja koperasi 1 tahun





BAB IV

Koperasi Nelayan Mewujudkan Gerbang Kesejahteraan

TAK ADA MIMPI yang terwujud tanpa kerja keras. Seperti halnya mengubah kampung nelayan menjadi lebih baik dan berdaya secara ekonomi. Potensi perikanan di depan mata nelayan bisa lewat begitu saja tanpa perbaikan kawasan dan penguatan kapasitas nelayan. Karena itu, pemerintah hadir melalui Program Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi di kampung-kampung nelayan.

Program ini sengaja dijalankan di Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan Kampung Nelayan Modern (Kalamo). Tujuannya, untuk memaksimalkan sarana-prasarana pendukung nelayan yang sudah ada. Sehingga, bantuan pemerintah melalui dua program tersebut (Kalaju dan Kalamo) yang diwujudkan dalam bentuk koperasi nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Program korporasi ini wujud kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). Dalam pelaksanaannya, tidak mudah mewujudkan cita-cita berkoperasi, yakni menyejahterakan anggotanya.

Pendekatan kelembagaan dan sosial menjadi pintu masuk sebelum program ini diwujudkan. Koperasi ini menjadi wadah bagi nelayan mengatur kebutuhan mereka secara kolektif, dari alat tangkap hingga penyediaan bahan bakar. Pendekatan ini mendorong nelayan untuk tidak hanya menjadi penangkap ikan, tetapi juga terlibat dalam proses pengelolaan usaha perikanan secara terpadu.

Sebelum koperasi berdiri, nelayan sering menghadapi kendala logistik seperti terbatas dan mahalnya harga bahan bakar di pengecer. Dengan adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang dikelola koperasi, akses terhadap bahan bakar menjadi lebih mudah dan efisien.

SPBUN mempermudah akses nelayan untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi.



Pada akhirnya, koperasi ikut memainkan perannya menjaga harga jual ikan agar tetap menguntungkan nelayan. Upaya ini dilakukan melalui TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang dioperasikan koperasi, memberikan nilai tambah bagi hasil tangkapan nelayan. Dengan sistem ini, harga jual ikan dapat lebih terkontrol dan transparan, mengurangi ketergantungan pada pengepul dan perantara.

Di beberapa wilayah, koperasi nelayan mengadopsi teknologi digital untuk pengelolaan keuangan, pencatatan data, serta pemasaran. Berkaitan dengan ini, pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mengelola koperasi secara profesional. Koperasi menyediakan pelatihan terkait pengelolaan usaha, termasuk penyusunan *standard operational procedure* (SOP) dan manajemen operasional.

Hal yang tidak kalah penting, kolaborasi dan dukungan pemerintah menentukan keberhasilan program ini. Selain menyalurkan bantuan modal dan peralatan, pemerintah memfasilitasi pendampingan melalui berbagai lembaga terkait.

Berbagai pendekatan yang telah dilakukan terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, memudahkan kebutuhan dasar operasional melaut, serta mengoptimalkan pendapatan dari hasil perikanan. Kesuksesan ini membuktikan organisasi berbasis koperasi dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan secara kolektif.

Di sisi lain, program ini juga memberikan dampak positif bagi perempuan dan generasi Z (lahir di rentang tahun 1997–2012) dari keluarga nelayan. Dengan korporasi nelayan berbasis koperasi, mereka percaya bahwa laut masih memberikan masa depan yang cerah. Kisah-kisah tersebut terekam dalam pembentukan dan penguatan koperasi di sejumlah kampung nelayan terpilih.



Bukit karang di Desa Samber-Binyeri, Kecamatan Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, Papua, menjadi ikon Kampung Nelayan Modern, dan salah satu lokasi wisata yang layak dikembangkan untuk memberikan nilai tambah pada warga setempat.

PERJALANAN NELAYAN BIAK NUMFOR MELAWAN KETERBATASAN

Sore itu, lautan tenang. Musim surut air laut (*wampasi*) sudah lewat. Nelayan Samber-Binyeri, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, Papua berada di awal musim angin barat (*wambraw*). Biasanya saat puncak *wambraw*, gelombang laut tinggi disertai angin barat. Tetapi Selasa (5/11/2024) sore itu, gelombang besar belum datang.

Cuaca cerah. Saat terbaik mencari ikan sebelum musim gelombang tinggi tiba. Hari itu, Yusuf Womsiwor (30) ketiban rezeki setelah memperoleh empat ekor *baby* tuna sebesar betis orang dewasa. “Satu ekor ikan ini untuk anak saya. Hari ini dia ulang tahun. Kami mau olah ikan ini dengan kuah kuning,” kata Yusuf sambil memotong ikan di tepi dermaga Desa Samber-Binyeri.

Anaknya yang kedua sedang berulang tahun ke-7. Sore itu, cuaca di Dermaga Samber-Binyeri cerah. Langit jingga menjadi latar aktivitas warga di sana. Di sisi dermaga yang lain, sekelompok anak-anak meloncat dan menceburkan diri ke air laut. Laut yang membiru bening, menggoda siapa saja di sana. Senja yang sempurna, terutama bagi keluarga Yusuf yang akan merayakan ulang tahun anaknya di malam harinya.

Yusuf adalah salah satu dari nelayan di Samber-Binyeri yang hidup di tengah anugerah alam yang indah. Warga pesisir di sana terlatih menjadi nelayan andal yang mampu memanfaatkan kekayaan laut, baik pada musim *wampasi* maupun *wambraw*.

Kampung Samber dan Binyeri berada di pesisir pantai yang memiliki pantai pasir putih, sebagian kontur tanahnya berbukit karang, menambah eksotis pemandangan. Secara geografis, kampung itu berada di bagian selatan Pulau Biak Numfor, menghadap ke Teluk Cendrawasih.



**BUKIT SAMBER/BINYERI
KALAMO**

Sepasang calon pengantin mengabadikan momen *pre wedding* di area dermaga Samber-Binyeri. Sejak diresmikan Presiden sejak November 2023, Desa Samber-Binyeri banyak dikunjungi wisatawan terutama selama akhir pekan

Pada mulanya, dua kampung ini berasal dari satu wilayah, yaitu dalam wilayah Desa Samber. Namun kemudian dimekarkan, dan lahirlah Desa Binyeri. Meski dimekarkan, dua kampung ini memiliki kekerabatan yang erat. Nama Samber dan Binyeri sering ditulis sebagai salah satu objek wisata alam Kabupaten Biak Numfor yang memiliki keindahan pantai.

Samber-Binyeri memendam potensi perikanan yang luar biasa. Komunitas nelayan di wilayah ini sudah lama terbentuk. Hasil tangkapan warganya mendominasi produk perikanan yang dijual di Pasar Fandoi, di pusat Kota Biak Numfor. Sektor perikanan merupakan salah satu penyumbang sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar pada produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Biak Numfor.

“Kemampuan nelayan menangkap ikan bagus, mereka juga mampu membaca iklim. Setiap melaut, mereka sudah menyiapkan berbagai jenis alat pancing seperti layang, tombak, ulur, *hand line*, dan alat tangkap lain,” kata penyuluh perikanan di Distrik Yendidori, Nimrot Aibekop.

Adapun penggunaan masing-masing alat pancing tersebut disesuaikan dengan kondisi nelayan selama berada di area penangkapan ikan. Sebagai penyuluh perikanan, Nimrot tidak perlu mengajari terlalu detail ke nelayan Samber-Binyeri. Sering kali, mereka sudah memahami apa yang harus mereka lakukan. “Soal kemampuan menangkap ikan, mereka sudah berpengalaman,” kata Nimrot.

Mengutip laporan akhir pendamping Abraham Horisanto (2023), 86 persen dari 207 keluarga di desa Samber dan Binyeri adalah nelayan. Adapun alat tangkap yang sering dipakai adalah pancing ulur dengan menggunakan kapal berukuran di bawah 3 GT (*gross tonnage* atau nelayan biasa menyebutnya ‘gros ton’). Sementara itu, hasil tangkapan utama warga berupa ikan tuna, cakalang, dan tongkol sekitar 800 kg hingga 1 ton ikan per hari. Dalam laporannya, Abraham menyebut, produksi ikan di Samber-Binyeri menyumbang 70 persen jumlah ikan yang dijual di Pasar Fandoi, berjarak 26 km dari kampung tersebut.

Dua kampung itu mudah diakses siapa pun dari jalur darat maupun laut. Infrastruktur jalan menuju Samber-Binyeri tersedia mulus. Nyaris tidak ada jalan rusak di sepanjang rute dari pusat Kota Biak Numfor menuju kampung tersebut. Selain kendaraan pribadi, perjalanan ke kampung itu juga bisa ditempuh dengan angkutan umum, dengan tarif Rp 10.000 per penumpang.

Lantaran infrastruktur jalan baik, berbagai jenis kendaraan dapat melintas ke arah Samber-Binyeri. Kini bahkan truk pengangkut peti kemas dapat masuk ke area Kampung Nelayan Modern (Kalamo) untuk mengangkut hasil tangkapan nelayan.

Tokoh Adat Samber-Binyeri Yakob Binwasef, yakin potensi laut di perairan sekitar Biak Numfor masih besar. Nelayan seperti yang ada di Kampung Samber-Binyeri belum optimal mengeksplorasinya. "Ikan masih banyak. Sebab Biak Numfor berhadapan langsung dengan laut besar. Ikan nggak ada habisnya di laut," kata Yakob.

Yakob menginginkan potensi alam yang tersedia di Samber-Binyeri dapat meningkatkan kesejahteraan warganya. Peningkatan kesejahteraan ini seharusnya tercermin dari nilai penjualan ikan. Karena itu, Yakob berjuang untuk mencari solusi agar penjualan ikan dari nelayan menguntungkan mereka.

Harapan Yakob tersemat pada Samber-Binyeri yang mengalami transformasi dua tahun terakhir. Kampung tradisional itu kini berubah wajah menjadi Kalamo Samber-Binyeri. Perubahan yang ditandai dengan pembangunan sarana prasarana ini berpeluang meningkatkan kesejahteraan nelayan. Transformasi ini diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan potensi perikanan di dua kampung tersebut. "Pembangunan kampung ini seperti mimpi. Semua berubah dalam tempo 2,5 bulan saja," kata Yakob.



Seorang warga tampak berada di tepi dermaga di area Pasar Fandoi, Biak Numfor, Papua Barat, Senin (4/11/2024). Sebagian besar pasokan ikan di Pasar Fandoi berasal dari Desa Samber-Binyeri, Distrik Yendidori sekitar 26 km dari lokasi pasar.

Samber-Binyeri makin punya daya magnet. Selain kekayaan alam yang indah dan potensi hasil perikanannya, kini infrastruktur di sana semakin lengkap. Dermaga reyot yang pernah ada sudah berganti menjadi dermaga permanen dan jalanan beraspal mulus.

Dengan kata lain, Samber-Binyeri bukan hanya kampung nelayan, melainkan salah satu tempat wisata menawan di Biak Numfor. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Biak Numfor Effendi Igrisa melihat potensi kampung nelayan ini. Di antara kampung-kampung nelayan lain di Biak Numfor, Samber-Binyeri yang paling berpotensi dikembangkan.



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Biak Numfor, Effendi Igrisa

“Dari kampung-kampung nelayan yang ada di Biak Numfor, jika dilihat dari kehidupan warganya, Kampung Samber-Binyeri paling menonjol. Dari sisi sarana prasarana, perahu, dan faktor lainnya, terlihat di dua desa ini layak untuk dikembangkan,” kata Effendi. Samber-Binyeri sudah lama menjadi pembicaraan orang Biak Numfor maupun orang luar.

NAIK KELAS MENJADI KAMPUNG NELAYAN MODERN

Lantaran potensi alam dan adanya komunitas nelayan di sana, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor merekomendasikan Samber-Binyeri sebagai lokasi pelaksanaan program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) tahun 2023. Namun, rencana ini berkembang hingga dua kampung itu menjadi penerima program Kampung Nelayan Modern (Kalamo).

Dengan adanya Kalamo Samber-Binyeri, konsekuensinya adalah pembangunan sarana dan prasarana nelayan senilai Rp22,1 miliar. Sarana yang dimaksud untuk memenuhi nelayan dari hulu hingga hilir, mulai dari kebutuhan untuk melaut, perbengkelan kapal, *docking*, warung serba ada, stasiun pengisian bahan bakar, hingga tempat penyimpanan ikan. Tujuannya, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Sejalan dengan itu, pada 24 Agustus 2023, melalui mediasi pemerintah, nelayan mendirikan Koperasi Produsen Samber-Binyeri Maju. Lembaga ini dibentuk untuk mengelola aset dan unit usaha yang dijalankan koperasi. Sehingga aset yang dibangun lewat Program Kalamo semakin bernilai positif untuk nelayan.

Tantangan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas warga yang menjadi anggota maupun pengurus koperasi. Sebab, di tangan merekalah aset-aset yang terbangun dapat dikelola dan dikembangkan lewat unit usaha. Kondisi yang ada saat itu, pengalaman dan pengetahuan tentang koperasi warga masih terbatas. Meski sebelumnya pernah ada kelompok usaha bersama (KUB) di Sumber-Binyeri, komunitas usaha ini tidak aktif, alias mati suri.

“Sepi sekali kegiatan organisasi nelayan di sini. Banyak warga yang belum mengerti bagaimana menjalankan koperasi nelayan. Warga beranggapan, di koperasi itu bisa meminjam uang, sebatas itu,” kata Enggo Catur Srianto, pendamping nelayan setempat.

Melihat situasi ini, pemerintah melakukan intervensi lewat kolaborasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). Selain pendampingan aktif, nelayan yang terhimpun di koperasi dilibatkan dalam proses magang, pelatihan, dan kegiatan lain. Bagaikan sapu lidi, ikatan nelayan di koperasi masih belum kokoh, perlu penguatan lagi.

Pada 31 Oktober 2023, tiga bulan setelah koperasi terbentuk, tenaga pendamping bekerja keras melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman koperasi. Asesmen ini dilanjutkan dengan penyusunan profil koperasi, menyiapkan model bisnis, pihak-pihak yang terkait, hingga laporan pendahuluan. Penilaian awal ini menjadi pijakan arah dan metode pendampingan lewat program korporasi nelayan.

Beberapa indikator yang menjadi perhatian adalah aspek kelembagaan, aspek bisnis, aspek pasar, aspek keuangan, dan aspek digitalisasi. Hasil penilaian awal, bobot nilai Koperasi Produsen Sumber-Binyeri Maju sebesar 32,15 dengan kategori “kurang modern”. Hasil ini mengindikasikan bahwa aspek bisnis, pasar, keuangan dan digitalisasi masih sangat kurang serta dibutuhkan peningkatan yang signifikan.

Berangkat dari kondisi itu, tim pendamping memberikan pengetahuan tentang koperasi seperti yang tertulis di laporan akhir Kegiatan Pendampingan Masyarakat Program Korporasi Nelayan Tahun 2023 oleh Abraham Horisanto. Transfer pengetahuan dilakukan agar ada pemahaman mengenai tugas tanggung jawab, pengelolaan bisnis, hingga proyeksi pertumbuhan usaha.

Kegiatan ini dilakukan Rabu, (29/11/2023), di kantor koperasi, Desa Binyeri, Kabupaten Biak Numfor. Pendamping menjelaskan panduan, pedoman atau petunjuk berupa *standard operational procedure (SOP)*, *standard operational management (SOM)*, dan instruksi kerja dalam menjalankan unit usaha koperasi.

Nelayan yakin, pendirian koperasi ini bakal mendongkrak nilai tambah, bekerja lebih efisien, dan bertambahnya akses pasar. KKP mencatat, potensi perikanan di sekitar perairan Biak Numfor ada 1 juta ton ikan per tahun. Namun yang baru dimanfaatkan 800.000 ton per tahun. Ada peluang meningkatkan produksi perikanan. Karenanya perlu ada penguatan kapasitas warga di sana.

Sayangnya, pemanfaatan potensi perikanan di sekitar perairan Biak Numfor belum diikuti ketersediaan kapasitas yang mumpuni. Kehadiran koperasi nelayan di Kalamo Samber-Binyeri sebagai jawaban kebutuhan sarana pendukung nelayan.

Merujuk lagi pada laporan Abraham, warga Desa Samber-Binyeri, 86 persen di antaranya bekerja sebagai nelayan. Sebagian besar nelayan menggunakan *hand line* (alat tangkap pancing ulur) sebagai alat tangkap dan kapal yang berukuran kurang dari 3 GT. Hasil tangkapan utama adalah ikan tuna, cakalang, dan tongkol dengan kontribusi sekitar 800 kg sampai 1 ton ikan per hari yang dijual ke Pasar Ikan Fandoi.



MENJEMPUT PELUANG YANG TERBENTANG

Bertahun-tahun nelayan Samber dan Binyeri hidup dalam kekumuhan kampung. Sampah di mana-mana. Kondisi tersebut makin diperburuk oleh minimnya sarana infrastruktur, seperti jalan rusak, dermaga rapuh, tidak adanya penjual bahan bakar, hingga nihilnya bengkel perbaikan kapal. Keterbatasan fasilitas ini menyulitkan nelayan memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Begitu pun proses pemasaran hasil tangkapan yang tidak bisa dilakukan dengan cepat.

“Untuk membeli bahan bakar minyak, es batu, bahkan alat penangkapan ikan, kami harus ke kota (Biak Numfor, jarak tempuhnya sekitar 45 menit),” kata Ortisan Miokbun, nelayan setempat. Ortisan aktif melaut untuk mencari penghasilan utamanya. Ortisan juga dikenal nelayan yang produktif. Penjualan ikan darinya ke koperasi, paling tinggi dibanding nelayan-nelayan lain.

Kebutuhan-kebutuhan yang disebut Ortisan itu baru bisa didapatkan nelayan saat ada waktu luang dan uang lebih banyak. Sebelum terbentuknya koperasi, nelayan Samber-Binyeri menjual hasil tangkapan pun harus ke Pasar Fandoi, di luar area kampung. Penjualan hasil tangkapan seperti ini memakan waktu dan ongkos pengangkutan. Selain itu, ada faktor ketidakpastian penjualan yang terkait waktu dan harga. Semua itu tergantung pasar saat penjualan ikan.

Jika kondisi ini berlanjut, Ortisan dan nelayan lain di Samber-Binyeri sulit berkembang. Keterbatasan sarana pendukung nelayan itu berpengaruh pada produksi hasil tangkapan yang kurang maksimal. Mereka membutuhkan intervensi pemerintah untuk keluar dari belitan masalah di atas.





Kabupaten Biak Numfor adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Kabupaten ini berada di Teluk Cenderawasih pada koordinat $0^{\circ}21'-1^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $134^{\circ}47'-136^{\circ}48'$ Bujur Timur dengan ketinggian 0 - 1000 meter di atas permukaan laut dan luas wilayah

daratan sebesar 2.602 km². Kabupaten ini merupakan gugusan pulau di utara Pulau Papua, berseberangan dengan Samudera Pasifik. Kabupaten ini memiliki dua pulau besar, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor serta sekitar 42 pulau-pulau kecil.

Di utara, Kabupaten Biak Numfor berbatasan dengan Kabupaten Supiori dan Samudera Pasifik. Sebelah Selatan adalah Selat Yapen, sementara di timur berbatasan dengan Samudera Pasifik dan di barat adalah Kabupaten Manokwari. Posisi ini menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu tempat strategis di kawasan Pasifik, Australia atau Filipina. Letak geografis juga strategis untuk pembangunan kawasan industri, pariwisata, perikanan, dan penelitian ruang angkasa.

Dengan luas wilayah 2.602 km², kepadatan penduduk di Kabupaten Biak Numfor sebesar 55,61 jiwa per km². Jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor tahun 2017 adalah 144.697 jiwa yang terdiri dari 74.794 jiwa penduduk laki-laki dan 69.903 jiwa penduduk perempuan. Jumlah ini menunjukkan penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Kabupaten Biak Numfor terdiri dari 19 distrik, di antaranya terdapat Distrik Yendidori, tempat Desa Samber dan Binyeri berada.

Sebanyak 70 persen ikan dari Desa Samber dan Binyeri dijual di Pasar Fandoi. Namun pendapatan nelayan rata-rata hanya Rp3 juta rupiah per bulan, jauh di bawah upah minimum Kabupaten Biak Numfor, yaitu Rp3,8 juta per bulan.

Keadaan ekonomi ini belum mencukupi kebutuhan primer warga setempat, dan menuntut nelayan hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk melaut (satu orang satu perahu), atau dengan membawa satu anak laki-laki yang sudah cakap melaut. Kondisi sosial warga di Samber-Binyeri kental dengan adat istiadat dan ajaran agama Kristen, sehingga kondisi ini mendominasi perilaku, sikap, dan pola hidup dalam warga.

Di tengah keterbatasan sarana prasarana itu, kekayaan sumber daya laut dan potensi perikanan di Selat Yapen dan Samudera Pasifik masih melimpah. Menurut Ortisan, jika mau mencari, ikan akan selalu bisa didapat. Hasil tangkapan yang paling sering didapatkan nelayan setempat, di antaranya ikan tuna, cakalang, tongkol, layang, kembung, kerapu, kakap, deho dan sebagainya.

Selain kuantitas jumlah produksi ikan hasil tangkapan yang cukup besar, kualitas ikan yang dihasilkan termasuk segar dan bagus. Sayangnya, SDM nelayan belum menerapkan sistem rantai dingin yang dapat menurunkan kualitas mutu ikan hasil tangkapan dan membuat harga ikan menjadi turun drastis. Kondisi ini terjadi lantaran terbatasnya stok es batu.

Begitu pun dengan ketersediaan bahan bakar; sebelum pembangunan infrastruktur di sana tahun 2023, nelayan harus antre membeli bahan bakar di pengecer. Jika waktu antre lewat, nelayan tidak kebagian bahan bakar. Akhirnya mereka terpaksa membeli bahan bakar ke area Kota Biak Numfor.

Permasalahan lainnya, proses penimbangan dan pencatatan ikan hasil tangkapan belum dilakukan oleh nelayan. Mereka menjual ikan per ekor

dengan mempertimbangkan besar kecilnya ukuran ikan. Ikan ukuran besar dijual berkisar Rp100.000 hingga Rp350.000 per kg. Sementara itu, ikan berukuran kecil dijual berkisar Rp50.000 hingga Rp80.000 untuk 4–5 ekor di Pasar Fandoi.

MENJAGA SAMBER-BINYERI LEWAT KOPERASI

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung nelayan di Sumber-Binyeri diawali dengan survei bulan Agustus 2023. Survei dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan sosial-ekonomi, kondisi fisik, serta aspek kelembagaan komunitas nelayan.

“Sebelum koperasi ada, hasil tangkapan ikan kami bawa ke Pasar Ikan Fandoi. Ketika itu, banyak waktu terbuang. Tetapi setelah adanya koperasi ini, kami tidak perlu ke pasar lagi. Hasil tangkapan kami dari laut, langsung ditimbang Mama Ida (juru bayar koperasi), langsung dibayar,” kata Ortisan, nelayan setempat.

Ortisan dan nelayan-nelayan lain juga merasakan kemudahan mendapatkan kebutuhan mereka sebelum melaut. Untuk menjaga kesegaran ikan, nelayan membutuhkan es untuk membekukan hasil tangkapan. Begitu pun juga jika mereka membutuhkan alat tangkap, koperasi telah menyediakannya. Di sisi lain, kini warga tidak perlu berebut mendapatkan bahan bakar, karena stoknya tercukupi di kampung mereka sendiri.

Meski sudah ada koperasi, ada tantangan berikutnya yang mesti dihadapi. Pengelola koperasi berjuang agar harga ikan dapat bertahan di harga yang menguntungkan nelayan. Sementara ini masih ada selisih harga ikan di Pasar Fandoi dengan harga ikan pembelian koperasi.

Koperasi Produsen Sumber-Binyeri Maju yang bermitra dengan PT PNJ (Perikanan Nusa Jaya) menargetkan dapat memasok ikan 1 kontainer ukuran 20 feet dengan volume 12–15 ton per bulan. “Untuk pertama kali,



per 5 September 2024, kami mengirimkan ikan cakalang, *baby* tuna, marlin, layar, dan ikan karang 13,3 ton ke Semarang. Ini upaya kami agar kami dapat mengejar target. Sehingga harganya bisa bersahabat seperti di pasar,” tutur Enggo.

JALAN MASIH PANJANG, TERJAL, DAN MENDAKI

Wajah baru Kampung Samber-Binyeri menyisakan pekerjaan rumah. Kampung yang kini menyandang nama baru sebagai Kampung Nelayan Modern itu memiliki aset baru puluhan miliar rupiah. Pekerjaan rumah warga berikutnya adalah menjaga aset itu dan menjadikannya sebagai pijakan untuk mencapai kesejahteraan. Namun, untuk mencapai cita-cita itu mesti melalui jalan panjang, terjal, dan mendaki.

Meski sulit, bukan tidak mungkin hal itu diraih nelayan Samber-Binyeri. Mereka kini punya wadah untuk bergerak bersama dalam satu organisasi yang kuat. Organisasi bersama itu adalah Koperasi Produsen Samber-Binyeri Maju yang dibentuk Agustus 2023. Bagaimana bayi, koperasi yang

berumur satu tahun ini, masih belum bisa bicara, baru belajar berjalan, kadang tertatih-tatih, kadang terbentur. Kelak, koperasi yang masih bayi ini bakal melesat lari kencang setelah melalui masa pengasuhan.

Persoalan mendasar yang kini sedang dihadapi nelayan adalah rendahnya harga penjualan ikan ke koperasi. Koperasi membeli ikan dari nelayan masih terlalu rendah, yaitu Rp9.000 per kg untuk cakalang dan Rp14.000 per kg untuk *baby* tuna. Sementara itu, harga jual ikan cakalang di Pasar Fandoi, Kota Biak Numfor berkisar Rp21.000–Rp25.000 per kg. Adapun ikan *baby* tuna di pasar dijual dalam satuan yang harganya naik turun sesuai penawaran pembeli.

Untuk penjualan ikan, pengurus koperasi menjalin kemitraan dengan PT Perikanan Nusantara Jaya (PNJ). Teknisnya, nelayan menjual ikannya ke koperasi, pengurus koperasi lalu menjual ke PT PNJ. Dengan pola ini, PT PNJ memberikan *management fee* ke pihak koperasi Rp500 per kg ikan yang dibeli dari nelayan.

Hendrio Mahu, Manajer *Sourcing* PT Perikanan Nusantara Jaya Biak Numfor mengatakan, harga pembelian ikan itu sesuai dengan hitungan biaya produksi. Selama menjalankan kemitraan dengan koperasi, PNJ menyewa ruang pembekuan ikan milik koperasi. Untuk penyewaan ini PT PNJ mengeluarkan biaya operasional listrik sekitar Rp350.000 per hari. Biaya ini belum termasuk gaji pegawai (3–8 orang) *cold storage* dan biaya pengangkutan ikan dari Sumber-Binyeri ke lokasi pengolahan ikan.

Hitungan PNJ, biaya operasional itu akan tertutupi jika pasokan ikan nelayan dari koperasi 15 ton per bulan, sesuai dengan kapasitas satu kontainer ukuran 20 *feet*. Namun kenyataannya, pasokan ikan dari koperasi jauh di bawah target itu. Pada periode Mei-Agustus 2024, pengiriman ikan dari Sumber-Binyeri sebanyak 13,8 ton. Sedangkan pengiriman ikan periode berikutnya pada akhir November sebanyak 12,8 ton, per 14 November 2024.

FAKTOR PENGHAMBAT PENJUALAN IKAN

Selisih harga ini menjadi faktor utama penghambat nelayan menjual tangkapannya di luar koperasi. Bahkan anggota koperasi sendiri, sebagian besar masih belum tertarik menjual tangkapannya ke koperasi. “Sementara ini baru 30 persen anggota koperasi yang jual ikan ke kami. Kami sudah mengingatkan komitmen ini ke nelayan. Siapa lagi yang akan menjaga koperasi jika bukan anggotanya sendiri,” kata Adam Mampioer, Ketua Koperasi Produsen Sumber-Binyeri Maju.

Adam dan pengurus lain tak henti-hentinya menggenjot pembelian ikan dari rekan-rekannya sesama nelayan. Salah satu upayanya dilakukan dengan meminjamkan perahu nelayan ke anggota koperasi. Harapannya, dengan meminjamkan perahu tersebut, maka nelayan mau menjual ikannya ke koperasi. “Tetapi, tidak semua nelayan mau menjual ke koperasi,” kata Adam.

Selisih harga pembelian ikan dari koperasi dan harga di Pasar Fandoi menjadi pemicu utamanya. Biaya produksi nelayan melaut, bisa mencapai ratusan ribu untuk menjangkau daerah penangkapan ikan, berjarak 30–40 mil laut dari pantai.

“Nilai pembelian ikan yang terlalu rendah itu, hanya menutup biaya produksi. Untuk membeli bahan bakar, nelayan harus mengeluarkan biaya Rp200.000 hingga Rp400.000 sekali melaut,” kata penyuluh perikanan Kabupaten Biak Numfor, Nimrot Aibekop.

Tidak hanya soal rendahnya harga pembelian ikan nelayan ke koperasi, faktor teknis manajemen bisa memicu nelayan menjual ikan ke tempat lain. Hal ini dialami Yusuf Womsiwor (30), saat ingin menjual ikan *baby* tuna tangkapannya, Selasa (5/11/2024). Pengurus koperasi belum siap menebus pembelian Yusuf. Tidak ada uang kas yang diinginkan Yusuf saat itu.

“Tiga ekor *baby* tuna saya jual ke Pasar Fandoi. Lumayan harganya di sana,” kata Yusuf setelah mendapatkan Rp1,2 juta hasil penjualan tiga *baby* tuna.

Mencermati situasi ini, Nimrot Aibekop melihat ada persoalan manajemen yang perlu dikuatkan. Menurut Nimrot, pengurus koperasi mesti diisi oleh orang yang memiliki kompetensi dan tahu menjalankan tugasnya. Dengan cara itu, segala potensi usaha yang dijalankan koperasi dapat berjalan maksimal.

Hal mendasar yang saat ini perlu dilakukan adalah pembukuan aset koperasi setelah pembangunan Kalamo Samber-Binyeri senilai Rp22,1 miliar. Tanpa pencatatan yang baik, aset-aset nelayan bisa jadi tidak akan terjaga. Sorotan pada manajemen koperasi juga disampaikan Tokoh Adat Samber-Binyeri Yakob Binwasef.

“Saya menaruh harapan besar pada koperasi. Sebagai warga setempat, saya merasa ikut memiliki. Saya ingin agar aset yang ada berdampak pada perekonomian warga,” kata Yakob. Ia siap berpartisipasi aktif untuk pengembangan koperasi ke depan. Dia yakin, ada orang-orang terbaik di Samber-Binyeri yang akan berkontribusi pada koperasi.



MENYONGSONG JALAN KELUAR

Persoalan harga penjualan ikan dan manajemen koperasi menjadi perhatian Enggo Catur Srianto, pendamping masyarakat yang ditugaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengurus saat ini sedang mencari jalan keluar agar harga pembelian ikan dapat ditingkatkan. Enggo mengakui, harga pembelian itu terlalu rendah, sehingga kurang menguntungkan nelayan. Sementara itu, agar koperasi dapat berkembang, pembelian ikan seharusnya menjadi bisnis yang menguntungkan bagi warga.

“Koperasi ini masih perlu pendampingan. Sebab menjalankan koperasi secara serius adalah hal yang baru buat warga. Pekerjaan rumah saat ini perlu meningkatkan kapasitas SDM (sumber daya manusia),” kata Enggo. Ia yakin, ke depan harga ikan akan meningkat seiring berjalannya waktu. Negosiasi ulang memungkinkan untuk dilakukan demi kepentingan nelayan. Selain faktor harga, ada faktor lain yang menentukan volume penjualan ikan ke koperasi, seperti faktor cuaca dan sosial.

Sementara dari sisi manajemen koperasi, penguatan di sektor ini membutuhkan waktu agar nelayan yang mengelola koperasi menjadi lebih kompeten. Namun, Enggo memahami kondisi yang saat ini terjadi, sebab Koperasi Sumber-Binyeri Maju baru berusia satu tahun. Meski pernah ada kelompok usaha bersama di sana, pada perjalanannya tidak aktif. Dia meminta pemerintah daerah atau pemerintah pusat, melalui Kementerian Koperasi dan UKM dapat membantu memberi pendampingan aktif ke warga.

“Kami siap membantu, tetapi kami ingin mendapat pelatihan dulu sebagai pendamping agar dapat mendampingi warga. Tenaga kami terbatas, sudah tidak ada lagi pendamping aktif dari kami,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Evlin Wamrau.



Di sisi lain, pihak PNJ dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sedang menjajaki pasar baru. Prioritas pasar yang diincar adalah konsumen di Papua. Sehingga memotong secara signifikan ongkos pengiriman yang sebelumnya ke Jawa. “Pasar di Papua juga banyak, terutama di Wamena. Harganya pun bagus,” kata Hendrio Mahu, Manajer *Sourcing* PT PNJ.

Langkah lain yang disiapkan adalah memperbaiki pola penangkapan ikan. PNJ menyanggupi penyediaan kapal untuk menarik kapal ikan nelayan yang ukurannya lebih kecil ke area penangkapan. Selama ini, ongkos operasional nelayan banyak tersedot untuk pembelian bahan bakar selama melaut.

“Teknisnya, kapal kami akan menarik kapal nelayan ke *fishing ground*. Begitu pun saat nelayan akan kembali ke darat, kapal kami akan menarik mereka. Sehingga bahan bakar kapal nelayan terpakai hanya di area penangkapan,” kata Hendrio.

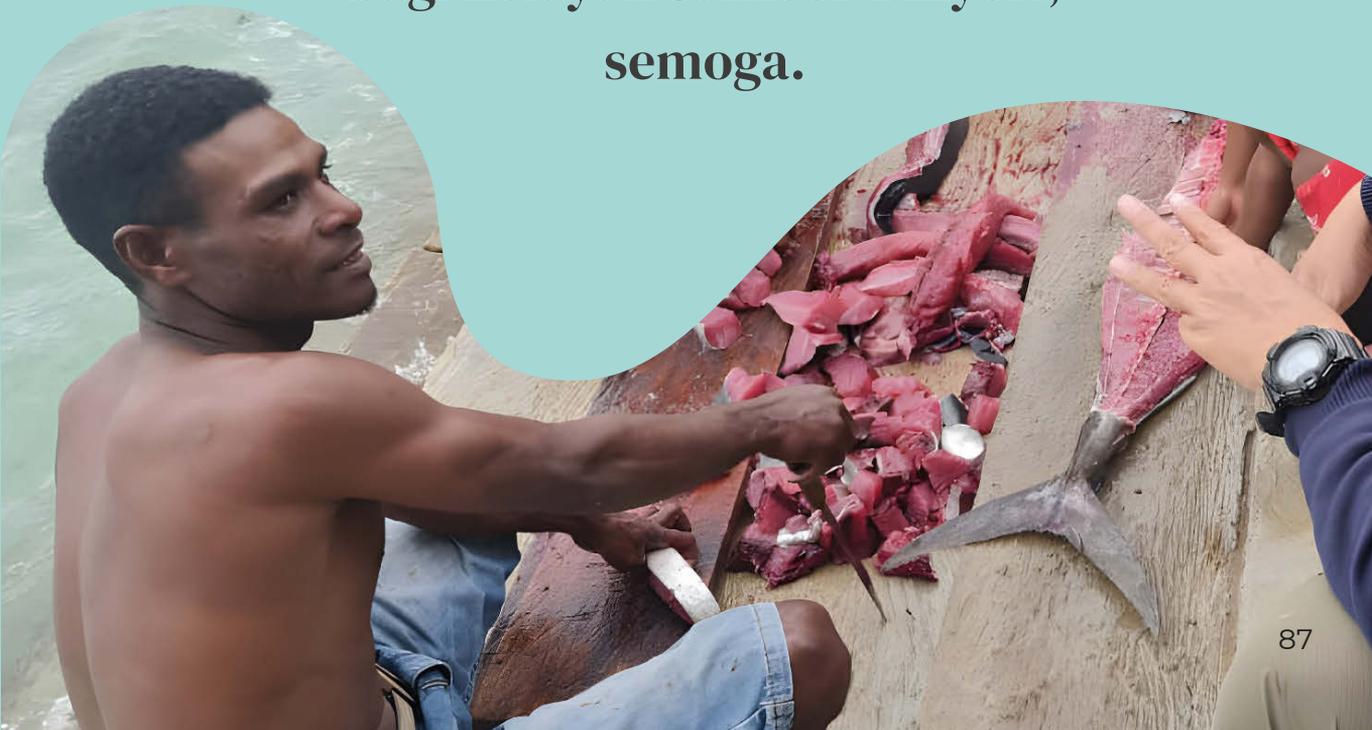
Sejalan itu, Pemkab Biak Numfor sedang menjajaki kerja sama dengan pasar baru di wilayah Papua pegunungan. Konsep kerja sama sedang dimatangkan, sehingga menguntungkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Biak Numfor Effendi Igirisa menyebut, terobosan kerja sama itu sudah dibicarakan awal November 2024. “BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di sana (Papua pegunungan) yang akan memasarkan ikan ke konsumen di wilayah sana. Kami menargetkan ikan dari Sumber-Binyeri dapat memenuhi kebutuhan ikan di wilayah sana,” kata Effendi.

Jika pasar di Papua pegunungan tinggi dengan harga yang menguntungkan nelayan, kerja sama ini dapat dilanjutkan. Pekerjaan rumah saat ini adalah meningkatkan harga jual ikan.

Pada perjalanan berikutnya,
Koperasi Samber-Binyeri Maju dapat
memainkan perannya lebih jauh.
**Potensi ini dapat diraih jika kapasitas
pengelola koperasi dapat ditingkatkan.**

Saat impian ini terwujud, nelayan
seperti Yusuf Womsiwor tidak lagi
menjual ikannya ke Pasar Fandoi. Baik
musim *wampasi* maupun *wambraw*,
adalah musim yang menyenangkan
bagi nelayan Samber-Binyeri,
semoga.



PERJALANAN KORPORASI NELAYAN DI OESAPA

Sepanjang Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur, pantai berpasir halus berwarna putih kecokelatan, membentang. Setiap air laut surut, pasir pantai itu timbul berbentuk gundukan-gundukan kecil dan bergelombang.

Pesisir Teluk Kupang kian memesona saat mentari terbenam. Saat itu, pesisir pantai berkilau dan memerah. Pesisir Teluk Kupang pun jadi salah satu tempat terbaik untuk berburu senja di Kota Karang.

Di sejumlah titik, mangrove dan lontar tumbuh alami dan menyatu dengan tanggul buatan yang menjadi benteng bagi pantai dari gempuran badai. Air laut di tepi pantai seperti permukaan kaca yang bening, menampakkan bebatuan, aneka koral, dan beragam jenis ikan yang ada di dalamnya.

Memandang tepi laut dari sudut yang sedikit lebih tinggi, kita seperti sedang melihat sebuah akuarium raksasa yang dibentuk oleh alam. Sedikit menjorok ke tengah, warna laut yang biru-sian tampak bergradasi menjadi semakin gelap.

Di teluk yang cantik itulah, kampung nelayan Oesapa berdiri, berdampingan dengan sejumlah titik yang dijadikan area pariwisata untuk warga Kupang dan sekitarnya. Wajah Oesapa lebih rapi dan tidak terlampau padat dibandingkan kampung-kampung nelayan pada umumnya di Jawa. Rumah-rumah nelayan tidak selalu berdempetan dan jarak perahu nelayan yang sedang tidak digunakan di tepi pantai, tidak sampai berjejalan. Satu hal yang sama dengan kampung nelayan di Jawa adalah Oesapa kental dengan aroma ikan dan laut.

Kampung Oesapa secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Di kecamatan itu termasuk Oesapa terdapat 355 rumah tangga perikanan dan 1.868 nelayan. Jika

dihitung secara tersendiri, Oesapa dihuni oleh 341 jiwa atau 63 keluarga. Ini adalah kampung yang heterogen di mana beragam suku hidup berdampingan secara damai, mulai Rote, Sabu, Timor, Alor, Bugis.

Kenyataan ini tidak terlepas dari sejarah Oesapa yang awalnya berupa wilayah kosong, yang di sekitarnya ditumbuhi kelapa, gewang, kaliki, dan semak belukar. Ruben Rifael Rohi, seorang tokoh masyarakat kampung nelayan Oesapa, menceritakan, sampai tahun 1960-an, hanya ada satu rumah di Oesapa. Kemudian datanglah orang-orang Bugis pada tahun 1962 dengan perahu-perahu nelayannya. "Mereka lantas menyatu di sini dan diterima oleh warga di Teluk Kupang sebagai saudara atau kakak-adik," tutur Ruben, Minggu (3/11/2024) di Kota Kupang.

Dari orang-orang Bugis, lanjut Ruben, warga setempat mendapat pengetahuan dan keterampilan sebagai nelayan. Selama bertahun-tahun, orang-orang Bugis mengajarkan cara menangkap ikan dengan serok, jaring, pukat, aneka jenis bagan, hingga lampara. Sebelum kedatangan orang-orang Bugis, warga setempat menangkap ikan dengan cara yang sangat tradisional, yakni dengan tombak dan panah. Bisa dikatakan, berkat orang-orang Bugis, perikanan tangkap di Oesapa berkembang hingga bentuknya yang sekarang.

Tahun berganti, kampung Oesapa mulai dihuni banyak penduduk yang sebagian besar adalah pendatang sejak tahun 1990-an. Rumah-rumah berdinding kayu dan beratap daun lontar, berganti dengan rumah-rumah berdinding tembok dan beratap seng. Sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Itu sebabnya ikan dari mana pun, dulu masuk ke Oesapa.

Meski kehidupan nelayan sudah berdenyut di Oesapa sejak 1960-an, kampung itu baru secara resmi disebut sebagai kampung nelayan pada 2011. "Kita pakai kampung nelayan supaya jangan hilang kita punya identitas sebagai orang-orang nelayan. Mengingatkan kita punya masa lalu," tambah Ruben.





Hingga saat ini, sebagian besar penduduk Oesapa menggantungkan kehidupannya pada laut, baik sebagai nelayan tangkap, nelayan pengolah hasil laut, maupun pengusaha yang berhubungan dengan kegiatan kemaritiman. Gambaran kehidupan Oesapa sebagai kampung nelayan bisa kita lihat dari aktivitas harian sebagian besar warganya. Pada sore hari saat mentari terbenam, kaum lelaki yang bekerja sebagai nelayan keluar dari rumah, menenteng bekal yang disimpan dalam ember, serta bakul menuju ke perahu motor yang bersandar di tepi pantai. Perahu motor itu kemudian didorong ke tengah laut lalu berlayar sejauh 1 mil laut menuju ke tempat ikan berkumpul.

Para nelayan yang biasanya berlayar dengan jumlah dua sampai tiga orang setiap perahu itu, bakal menghabiskan waktu di laut sepanjang malam. Mereka kembali menuju pantai saat mentari muncul dari ufuk timur. Ada nelayan yang pulang dengan wajah semringah, tetapi ada pula yang kembali dengan wajah murung.

TANTANGAN NELAYAN OESAPA

Kebanyakan nelayan di Oesapa merupakan nelayan tradisional dengan perahu-perahu kecil berbobot antara 1,5–2 GT. Alat tangkap yang digunakan umumnya berupa jaring dan pancing. Dengan perahu kecil dan peralatan tangkap sederhana seperti itu, jangkauan wilayah tangkap nelayan Oesapa terbatas di sekitar perairan Teluk Kupang.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang pada tahun 2023 menunjukkan, ada 5.704 nelayan dari lima kecamatan di Kota Kupang, yaitu Alak, Kota Lama, Kelapa Lima, Maulafa, Oebobo, dan Kota Raja yang beroperasi di Teluk Kupang. Armada penangkapan ikan yang beroperasi di sana berjumlah 901 unit. Dari jumlah itu, armada dengan bobot di bawah 5 GT sebanyak 266 unit. Hasil produksinya sekitar 21.000 ton per tahun.

Dengan perahu berukuran kecil, ribuan nelayan dari berbagai wilayah Kota Kupang itu, termasuk nelayan Oesapa, hanya bisa menangkap ikan di Teluk Kupang yang sempit. Mereka tidak mungkin menangkap ikan di luar zona tersebut. Tidak mengherankan jika hasil tangkapan nelayan di Teluk Kupang yang kian padat itu, dari tahun ke tahun berkurang.

Joakhim, warga Oesapa yang berprofesi sebagai nelayan menceritakan, sekitar tahun 1990-an, ikan di Teluk Kupang melimpah dan mudah ditangkap. Sekali menebar jaring atau memancing, banyak ikan tertangkap mulai ikan tembang, cakalang, layang, kerapu, kakap merah, kakap putih, dan kembung. Pekerjaan sebagai nelayan ketika itu relatif lebih mudah dan mendatangkan cukup uang untuk menghidupi keluarga. Akan tetapi alam yang murah hati dan memberikan kemudahan pada nelayan, membuat banyak nelayan terlena.

“Kita hanya tahu menangkap ikan yang melimpah saja, lalu menjualnya. Tidak ada pikiran untuk melestarikan kekayaan yang ada di laut. Tidak ada inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan seperti mengolah ikan supaya punya nilai tambah,” ujar Joakhim dalam wawancara pada Sabtu (24/10/2024).

Semakin lama, Teluk Kupang semakin kehabisan daya untuk menyediakan ikan dalam jumlah melimpah kepada nelayan seperti era 1990-an. Selain itu, tabiat alam beberapa tahun terakhir, semakin sulit diterka. Biasanya Juni, Juli, dan Agustus adalah masa-masa ketika ikan melimpah di Teluk Kupang. Setelah bulan-bulan itu, jumlah ikan yang bisa ditangkap



berkurang. Kemudian mulai Desember hingga Februari, nelayan memasuki masa paceklik.

Beberapa tahun belakangan, terutama sejak siklon tropis Seroja pada awal April 2021 yang melanda sebagian wilayah pesisir NTT, masa panen dan masa paceklik seperti tidak mengikuti pola lama. Joakhim menceritakan, bulan Juli dan Agustus yang biasanya banyak ikan, sekarang justru tidak. Kemudian, Oktober sudah masuk masa paceklik. “Sebelum-sebelumnya tidak pernah begini. Situasi ini membuat kami pusing, apalagi Desember nanti sampai Februari juga masa paceklik,” ujar Joakhim.

Masa panen menjadi kian pendek, sebaliknya masa paceklik menjadi lebih panjang. Pada musim paceklik yang biasanya berlangsung tiga bulan setiap tahun, nelayan tangkap tidak bisa melaut dan nelayan pengolah ikan sebagian besar berhenti memproduksi karena tidak ada pasokan bahan baku, kecuali ada pasokan ikan dari daerah lain. Dalam musim paceklik seperti itu, nelayan Oesapa umumnya memakai uang simpanan yang dikumpulkan pada musim-musim sebelumnya untuk membiayai hidup. Istilah mereka nelayan makan (uang) pokok. Artinya, uang simpanan atau modal melaut terpaksa dipakai untuk biaya makan keluarga.

“Kalau kurang terpaksa kami lari ke rentenir atau koperasi-koperasi selamat pagi atau koperasi harian yang tidak legal itu,” kata Joakhim. Belakangan, beroperasi pula jasa pinjaman *online* yang makin menjerat kehidupan banyak nelayan.

Penghasilan nelayan Oesapa saat ini tergolong minim. Satu perahu kecil dengan seorang ABK dan dua atau tiga nelayan hanya bisa menangkap ikan senilai Rp400.000. Setelah dikurangi dengan biaya operasional sekitar Rp100.000, sisanya tinggal Rp300.000. Uang itu biasanya dibagi tiga antara pemilik perahu dan nelayan. Jika pemilik perahu mendapat sepertiga penghasilan, maka sisanya sebesar Rp200.000 dibagi untuk



ABK dan para nelayan. Yang mereka terima masing-masing berkisar Rp25.000–Rp50.000. Kalau tangkapan sedang bagus dan dapat ikan senilai Rp1 juta, nelayan masih bisa memperoleh uang Rp150.000 hingga Rp200.000.

Sebagian nelayan memilih jalan nekat untuk mendapatkan uang dalam jumlah banyak, yakni dengan berburu teripang hingga ke perairan Australia. Teripang menjanjikan uang lebih besar karena harganya mahal, yakni berkisar Rp100.000–Rp900.000 per kilogram, tergantung jenisnya. Jika sedang beruntung, dalam 10–15 hari, kelompok nelayan pencari teripang bisa memperoleh masing-masing Rp1 juta hingga Rp3 juta. Jika

tidak beruntung, mereka hanya memperoleh Rp200.000 dan jika apes mereka tertangkap oleh aparat penjaga laut Australia. Cerita semacam ini lazim terdengar di Oesapa.

Dengan kondisi seperti sekarang, Joakhim menilai, nelayan di Oesapa sulit untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Mereka mesti melakukan inovasi agar mendapat nilai tambah yang lebih besar dari hasil melaut.

MERAJUT MASA DEPAN LEWAT KOPERASI NELAYAN

Melihat penghasilan dari laut makin tidak pasti, Joakhim dan sejumlah nelayan tradisional Oesapa lainnya merintis Koperasi Bintang Laut Sejahtera (BLS) agar nelayan bisa memiliki usaha bersama demi meningkatkan kesejahteraan. Koperasi itu secara legal berdiri pada 16 Oktober 2021 dengan nomor AHU-0014081.AH.01.26. Jenis usahanya adalah koperasi produsen.



Joakhim Mali sedang menyetir kendaraan roda tiga (kendaraan operasional) yang merupakan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tepi pantai Kampung Nelayan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Namun, kegiatan koperasi itu hanya berjalan satu tahun. Setelah itu, kegiatan koperasi berjalan di tempat dan akhirnya mati suri. Hal itu terjadi lantaran pengurus dan nelayan yang menjadi anggota saat itu belum paham cara mengelola koperasi dengan baik dan tidak pula ada pendampingan dari pemerintah. Sebagaimana yang banyak terjadi di berbagai daerah, pendirian koperasi sering kali dilakukan sekadar memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari pemerintah. Setelah bantuan diperoleh, koperasi tidak bisa berjalan dengan baik.

Tahun 2023, ada program Korporasi Nelayan hasil kerja sama KKP dan Kemenkop UKM yang masuk ke Kota Kupang. Joakhim dan kawan-kawan tertarik dengan program itu. Setelah melalui survei dan prosedur lainnya, KKP dan Kemenkop UKM memutuskan nelayan Oesapa diikutsertakan dalam program Korporasi Nelayan berbasis koperasi. Sebagai kendaraannya, Koperasi BLS yang sudah mati suri dihidupkan kembali.

Berdasarkan pendokumentasian awal pada 9 Oktober 2023, kondisi Koperasi BLS dalam keadaan tidak beroperasi, belum pernah menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT), anggota koperasi tidak aktif, dan belum memiliki unit usaha. Hasil *assesment* awal menunjukkan, Koperasi BLS dalam kategori tidak modern dengan skor 19,77 persen dari pengukuran terhadap aspek kelembagaan, keuangan, dan bisnis.

Untuk mengaktifkan lagi Koperasi BLS, tim pendamping mendorong pengurus dan anggota koperasi menggelar serangkaian pertemuan merancang RAT dan kesiapan koperasi menerima program bantuan dari KKP, dari kesiapan secara kelembagaan koperasi, kesiapan tempat, dan kesiapan menjalankan unit usaha. RAT akhirnya dapat digelar pada 27 Oktober dengan bahasan utama, yakni penguatan aspek kelembagaan korporasi nelayan berbasis koperasi.

Setelah itu, KKP mulai menyalurkan bantuan kepada Koperasi BLS secara bertahap dalam bentuk sarana dan prasarana produksi dengan nilai total mendekati Rp 1 miliar. Sarana dan prasarana produksi yang diberikan antara lain oven, 13 unit *freezer* untuk memproduksi es, 50 unit kotak penyimpanan ikan (*cool box*), tempat pengeringan ikan, mesin pengemasan, meja produksi, pisau untuk membelah ikan, mesin pembuatan tepung ikan, waserda, 3 unit sepeda motor tiga roda, 1 mobil *pick up*, kantor koperasi beserta perlengkapannya (*CCTV, laptop, komputer, dan printer*). Semua bantuan itu menjadi aset Koperasi BLS.

Pada saat bersamaan, tim pendamping dari KKP dan Kemenkop UKM memberikan aneka pelatihan, dari produksi ikan, cara mengelola koperasi, menetapkan standar operasional dan manajemen, merancang bisnis, hingga membangun jejaring pemasaran. Pendampingan terus dilakukan kepada pengurus dan anggota koperasi agar semua program Koperasi BLS benar-benar berjalan.

Joakhim dan sejumlah pengurus inti Koperasi BLS antara lain dibawa oleh Kemenkop UKM untuk mengikuti pelatihan tentang koperasi dan magang di koperasi nelayan yang sudah berhasil, yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo di Cilacap, Jawa Tengah. Dari situ, para pengurus Koperasi BLS memperoleh pengetahuan tentang koperasi, tata kelolanya, kelembagaannya, lingkup usahanya, pengelolaan keuangan, perencanaan bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia. Mereka juga memperoleh pengetahuan di Cilacap terkait proses pelelangan ikan, penjemuran ikan, dan pemasarannya produk olahan ikan.

Setelah mengikuti pelatihan tersebut, mata Joakhim dan kawan-kawan terbuka lebar. Koperasi yang dulu mereka kira unit usahanya hanya simpan-pinjam, ternyata bisa dikembangkan menjadi sejumlah unit usaha yang beragam seperti sebuah perusahaan besar. Mereka pun mencoba menerapkan sejumlah praktik bagus yang mereka pelajari dari koperasi di Cilacap.

Pada saat yang sama, mereka menata kembali kelembagaan, manajemen, dan prosedur kerja mulai dari nol di bawah bimbingan pendamping lapangan yang disediakan oleh KKP dan Kemenkop UKM. Pendamping memberi bantuan teknis mulai terkait pengurusan izin, menata kelembagaan, membuat perencanaan bisnis, membuat pengaturan kerja pengurus dan sistem *monitoring*-nya, membuat catatan keuangan dan dokumen dengan baik, dan lain sebagainya.

Awalnya pengelola koperasi membuat catatan-catatan secara manual di atas kertas atau buku. Setelah mendapat bantuan peralatan kantor seperti *laptop*, komputer, dan *printer*, semua catatan mesti dilakukan secara digital dan di-*print* jika diperlukan. Hal yang tampak sederhana bagi kebanyakan orang-orang di kota, cukup sulit dilakukan pengurus Koperasi BLS pada awalnya.

Bendahara Koperasi BLS, Habakuk Efendi Adam menceritakan, ia mesti beradaptasi mengubah cara pencatatan manual menjadi pencatatan berbasis komputer menggunakan Microsoft Excel. Ia mengaku pernah mendapatkan pelatihan soal pencatatan keuangan secara digital di Jakarta. Tetapi sampai sekarang ia belum mampu melakukan hal itu. "(Masih) berat menggunakan komputer. Ini seperti tabrak gunung," kata Habakuk menggambarkan sulitnya menggunakan sistem komputer Microsoft Excel.

Habakuk saat ini masih menggunakan pencatatan uang yang keluar dan masuk secara manual. Setelah itu, pencatatan dipindahkan oleh Ibu Yana, petugas administrasi yang juga akuntan, ke sistem digital.

Enggo Catur, pendamping Koperasi BLS mengatakan, proses pengembangan koperasi produsen di Oesapa berlangsung pelan-pelan tapi pasti. Yang penting apa yang sudah dirancang oleh KKP dan Kemenkop UKM bisa berjalan sesuai rencana. Pada bulan-bulan pertama, pendampingan difokuskan pada membenahan kelembagaan dan tata



Foto Kiri Atas: Habakuk Efendi Adam, Bendahara Koperasi Produsen Bintang Laut Sejahtera, menjemur ikan asin di tepi pantai Kampung Nelayan Oesapa, Kota Kupang. Ikan asin merupakan salah satu komoditi unggulan dari koperasi itu.

Foto Kanan Atas: Ketua Koperasi Produsen Bintang Laut Sejahtera, Joakhim Mali, menjemur ikan asin di tepi pantai Kampung Nelayan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Foto Kanan Bawah: Oemboe Bintang, pendamping lapangan Koperasi Produsen Bintang Laut Sejahtera, memantau proses pengeringan ikan asin di tepi pantai Kampung Nelayan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.



kelola koperasi. Beberapa aspek yang dikerjakan mulai pengurusan legalitas koperasi dan pelatihan dan pendidikan pengurus.

Pendampingan selanjutnya dilakukan oleh Oemboe Bintang. Menurut Oemboe, berikutnya pendampingan diarahkan pada aspek-aspek keanggotaan, pengembangan usaha, model bisnis, dan perencanaan bisnis. Selain itu, pendamping ikut mempromosikan Koperasi BLS ke sejumlah dinas terkait, khususnya Dinas Koperasi Provinsi, dan pihak-pihak lain. Dengan begitu, diharapkan terjalin kerja sama dan jejaring yang akan memperkuat Koperasi BLS.

Langkah terakhir ini mulai membuahkan hasil. Ketika Menteri Koperasi Timor Leste bertamu ke Kupang, Dinas Koperasi Provinsi memilih Koperasi BLS sebagai salah satu tujuan kunjungan Menteri Koperasi Timor Leste.

PRODUKSI IKAN OLAHAN

Sejauh ini, Koperasi BLS sudah menjalankan beberapa unit bisnis yang menjadi unggulannya, yakni produksi ikan kering berbumbu, produksi ikan asin, produksi es batu, waserda, jasa angkut, dan penyewaan alat-alat produksi milik koperasi seperti kotak pendingin atau *cool box*. Dengan usaha-usaha itu, koperasi memiliki pemasukan termasuk saat musim pakeklik ikan.

Salah satu usaha yang memiliki potensi besar adalah produksi ikan asin tembang dan ikan kering bumbu. Pada 3 November 2024 siang, sejumlah pekerja yang juga anggota koperasi, tampak membalik ikan asin yang dijemur di bawah terik matahari. Penjemuran ikan menggunakan para-para atau semacam rak sederhana dari kayu sehingga proses pembalikan berlangsung cepat dan bersih. Para-para yang menjepit ikan yang dijemur, tinggal dibalik saja. Teknik ini dipelajari para pengurus ketika magang di sebuah koperasi produksi di Cilacap, Jawa Tengah.

Sebelumnya, para nelayan Oesapa biasa menjemur ikan di atas waring yang diletakkan begitu saja di atas tanah pasir. Ikan dibalik satu per satu sehingga memakan waktu. Prosesnya juga kurang bersih karena ikan bisa terkontaminasi oleh tanah.

Hari itu, Koperasi BLS sedang memproduksi sekitar 270 kg ikan segar menjadi ikan asin. Setelah digarami dan dijemur beberapa hari, ikan itu beratnya akan menyusut sepertiganya menjadi 180 kilogram. Ikan asin hasil produksi koperasi dijual ke pasar tradisional di kota Kupang dan daerah lain seperti Kefa, Melaka, Atambua, hingga ke negeri tetangga, yakni Timor Leste.

Setiap bulan, koperasi setidaknya memproduksi 1 ton ikan asin. Jika pasokan bahan baku sedang cukup banyak, produksi bisa melonjak hingga 2–3 ton. Satu ton ikan asin harganya sekitar Rp7 juta–Rp8 juta. Keuntungannya sekitar 20 persen setelah dipotong biaya pembelian bahan baku, garam, dan tenaga kerja.

Joakhim mengatakan, pasar ikan asin dari Oesapa amat menjanjikan, termasuk di Timor Leste. Kementerian Muda Timor Leste dalam beberapa komunikasi dengan pengurus Koperasi BLS, telah menyampaikan bahwa mereka membutuhkan ikan asin tembang dari Oesapa. Mereka siap bekerja sama untuk memasok Ikan Asin Tembang ke Timor Leste. Produksi ikan asin pun sekarang ini bisa dilakukan sepanjang tahun, termasuk saat musim hujan, asal ada bahan bakunya. Pasalnya, Koperasi BLS telah memiliki oven untuk mengeringkan ikan.

Selain ikan asin, ada beberapa produk lain yang dihasilkan anggota koperasi, yakni cakalang asap, ikan kering bumbu, tepung ikan, dan sebagainya. Produk olahan kaum ibu yang menjadi anggota Koperasi BLS ini, telah dipasarkan di waserda milik koperasi atau dipasarkan ke pihak-pihak lain melalui kerja sama.



Foto Kiri. Proses penjemuran ikan untuk memproduksi ikan asin.

Foto Tengah. Anggota koperasi melakukan proses penggaraman ikan.

Foto Kanan. Anggota koperasi melakukan proses pembalikan para-para pada proses penjemuran ikan.

Jenama (*brand*) atau merek yang digunakan adalah Loti yang diambil dari kebiasaan orang Kupang yang mencari ikan di pinggir pantai saat malam dengan senter. Loti melambangkan perjuangan nelayan dalam menangkap ikan.

Terkait alat produksi, sebagian besar sudah tersedia mulai dari mesin pengeringan, *freezer*, mesin pengepakan, dan lain-lain. Selain itu, koperasi berupaya membantu mendistribusikan produk-produk ikan olahan produksi anggota, mengelola jenamanya, dan mengurus sertifikat halal, serta dokumen ekspor untuk memasuki pasar Timor Leste.



Setelah koperasi berjalan sekitar satu tahun, masih ada tantangan besar terkait produksi ikan olahan yang mesti diatasi, yakni pasokan ikan yang minim pada saat musim paceklik seperti saat ini. Dua bulan terakhir ini, produksi ikan asin tembang yang sebelumnya sudah ratusan kilogram per hari, nyaris tidak ada karena bahan bakunya amat minim. Jika diganti dengan ikan bernilai lebih tinggi seperti kerapu, ongkos produksi dan harga jualnya akan terlalu mahal. Joakhim selaku Ketua Koperasi BLS sedang memikirkan untuk mendatangkan bahan baku ikan tembang sebanyak 1,5 ton dari Banyuwangi yang jumlahnya melimpah.

Sebagaimana usaha yang baru dirintis, pemasaran menjadi kendala klasik. Faktor penyebabnya antara lain ragam produk Koperasi BLS belum banyak dan sebagian besar masih dalam tahap pengembangan. Volume produksinya juga terbatas. Dengan demikian, koperasi belum bisa secara agresif melakukan intervensi pemasaran, termasuk melalui lokapasar (*marketplace*).



Salah satu anggota Koperasi Bintang Laut Sejahtera tengah mengeringkan ikan menggunakan oven di rumah produksi Koperasi Bintang Laut Sejahtera, di Kampung Nelayan Oesapa, Kota Kupang. Proses pengeringan berlangsung setiap dua jam.

PRODUKSI ES BATU

Usaha lain yang menjanjikan adalah produksi es batu. Dengan memanfaatkan 13 unit *freezer* bantuan dari DJPT KKP, Koperasi BLS memproduksi sekitar 300 batang es batu ukuran 25 cm x 20 cm. Pada musim paceklik ikan tangkapan, produksi bisa turun berkisar 100–200 batang. Hasil produksi diserap oleh nelayan anggota maupun bukan anggota koperasi serta masyarakat umum untuk mengawetkan ikan.

Es batu buatan koperasi dijual dengan harga Rp1.500 per batang atau dengan harga paket Rp5.000 per empat batang. Modal produksi antara Rp600–Rp700 per batang. Dengan demikian, keuntungannya berkisar Rp550–Rp700 per batang.

Sebelum memiliki unit usaha pembuatan es batu, nelayan anggota koperasi biasanya membeli es batu pada usaha es batu rumahan atau pabrik es di Oeba. Sekarang, anggota koperasi lebih banyak memanfaatkan es batu buatan koperasi yang kematangan dan

kekerasan es-nya lebih baik dibandingkan produk dari pabrik es. Oleh karena menggunakan plastik pembungkus, es batu buatan koperasi lebih lambat proses pencairannya sehingga menguntungkan pembeli.

Di luar keuntungan material berupa uang, usaha es batu Koperasi BLS memiliki dimensi pemberdayaan perempuan sebab sejak proses produksi hingga pemasaran melalui waserba, ditangani oleh kaum ibu. Dari situ, kaum ibu bisa menambah penghasilan yang bisa digunakan untuk keperluan keluarga.

Belum semua fasilitas produksi dan sarana angkut milik Koperasi BLS bisa dimanfaatkan anggota. Untuk itu, koperasi menyewakan sebagian fasilitas tersebut kepada nelayan atau nelayan pengolah. Fasilitas yang disewakan antara lain *freezer* dan *cool box*. Ada yang menyewa secara harian, bulanan, bahkan setahun. Penyewaan dilakukan umumnya ketika hasil melaut sedang banyak.

LANGKAH KE DEPAN

Perjalanan Koperasi BLS di Oesapa sudah sampai pada tahap pengembangan. Hasil *assesment* akhir menunjukkan Koperasi BLS naik status dari kategori tidak modern menjadi kurang modern dengan skor 45,25 persen dari tiga aspek, yakni kelembagaan, keuangan, dan bisnis. Para pengelola koperasi didampingi oleh pendamping lapangan dari KKP dan Kemenkop UKM masih fokus untuk memperkuat tata kelola kelembagaan koperasi, mengembangkan model bisnis dan unit-unit usahanya, mengembangkan sumber daya manusia yang ada, dan meningkatkan partisipasi keluarga nelayan.

Menurut Enggo Catur Srianto, pendamping lapangan pada awal berdirinya Koperasi BLS, kemajuan dalam mengembangkan koperasi itu berjalan dengan baik sesuai rencana. Transfer pengetahuan terkait program Korporasi Nelayan sudah berjalan dan pengelola maupun

anggota koperasi menyadari manfaat korporasi nelayan dalam bentuk koperasi. Hal yang perlu terus ditingkatkan adalah pengembangan SDM koperasi. Pengembangan SDM dilakukan antara lain dengan melibatkan kaum ibu dan generasi muda dari keluarga nelayan. Dari sini diharapkan muncul kader-kader koperasi yang baru.

Tingkat partisipasi warga dalam kegiatan koperasi juga perlu terus ditingkatkan. Untuk sampai ke tahap itu, ada tantangan yang perlu diatasi, yakni bagaimana mengenalkan koperasi produsen kepada masyarakat pesisir yang terlebih dahulu mengenal koperasi simpan pinjam. Dalam sejumlah sosialisasi, masyarakat selalu bertanya apakah mereka bisa pinjam uang untuk modal? Padahal, koperasi produsen kegiatannya adalah memproduksi produk dengan modal dari simpanan pokok dan iuran wajib. Koperasi bekerja sebagai perusahaan bersama milik seluruh anggota.

Koperasi BLS menargetkan, lewat sosialisasi yang baik tentang koperasi produsen, anggota koperasi bisa terus bertambah. Saat ini, pada bulan Oktober, anggota Koperasi BLS berjumlah 37 orang atau bertambah 10 orang dibandingkan pada saat pertama dihidupkan kembali.

MEMBUKA MATA NELAYAN

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang, Ejbends Doeka, mengungkapkan terima kasih kepada KKP yang memiliki program dan berinisiasi melakukan banyak hal untuk daerah, khususnya Kota Kupang. Ejbends Doeka berharap program ini terus dihidupkan. Meski begitu, dia mengingatkan agar masyarakat jangan terlalu fokus pada bantuan. Pada akhirnya, masyarakat harus bisa hidup dari kekuatan dia sendiri.

Program Korporasi Nelayan dalam bentuk koperasi produsen di Oesapa sedikit banyak telah membuka mata para nelayan bahwa program ini menjanjikan untuk masa depan. Joakhim mengatakan, berkat program

ini, Koperasi BLS memiliki aset berupa sarana dan prasarana bantuan dari KKP yang cukup besar. Selama ini, pengelola koperasi berjuang sendiri mengumpulkan modal dan membeli sarana dan prasarana produksi. “Bantuan ini sangat menolong kami,” ujar Joakhim.

Tidak berhenti sampai di situ, lanjut Joakhim, pengelola dan anggota koperasi juga mendapat pelatihan dan pendampingan dari Kemenkop UKM agar bisa memanfaatkan sarana dan prasarana produksi yang

“Bantuan itu, semacam stimulan, berapa pun besarnya, mungkin dia lebih besar dari kemampuan kita, tapi itu stimulan atau kita sebut itu penghargaan karena prestasi kita,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Kupang Ejbends Doeka.



sudah ada secara optimal. Pelatihan dan pendampingan dilakukan sejak awal hingga sekarang.

“Kami merasa sangat diperhatikan. Kalau dulu kami berjuang sendiri, sekarang lewat program Korporasi Nelayan kami terus didampingi, diarahkan, dan terus dikawal. Kolaborasi DJPT KKP dan Deputy Bidang Perkoperasian Kemenkop Kemenkop UKM menurut saya bagus sekali. Jarang ada program kolaborasi yang seperti ini. Saya berharap, program seperti ini dilanjutkan, bukan hanya untuk Koperasi Bintang Laut, tetapi juga koperasi nelayan lain di luar sana,” kata Joakhim.

Joakhim optimistis dengan aset yang dimiliki koperasi dan pendampingan dari KKP dan Kemenkop UKM, Koperasi BLS akan terus berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada anggota. Apalagi laut juga masih memberikan kehidupan kepada para nelayan dan generasi muda di kampung nelayan masih bergantung pada laut. Tetapi nelayan lewat koperasi mesti melakukan inovasi dalam mengelola laut dan kekayaannya secara bijak.



PERJALANAN KORPORASI NELAYAN DI PULAU PASARAN

Pelan tapi pasti, Pulau Pasaran berubah wajah. Kampung nelayan tradisional di pulau yang sejak tahun 1970-an menjadi sentra pengolahan ikan teri itu, telah bertransformasi menjadi Kampung Nelayan Modern (Kalamo). Perubahan yang terjadi di kampung nelayan itu bukan hanya fisik, tetapi juga kesadaran para nelayannya untuk mengusahakan produksi perikanan secara bersama-sama dalam bingkai koperasi.

Dengan dua perubahan itu, nelayan di Pulau Pusaran menjadi lebih percaya diri dan punya mimpi besar: hidup lebih sejahtera dengan usaha bersama. Berikut kisah perjalanan para nelayan Pulau Pasaran dalam mentransformasikan diri dari nelayan biasa menjadi nelayan berjiwa pengusaha.

Pulau Pasaran merupakan pulau kecil dengan luas sekitar 12 hektar yang secara administratif masuk wilayah Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pulau yang dikelilingi oleh laut itu memiliki garis pantai yang menghadap ke Teluk Lampung di sebelah selatan.

Pulau ini bisa dijangkau dalam waktu 5 menit ke Kota Karang yang telah terhubung oleh keberadaan jembatan. Dulu, jembatan menuju Pulau Pasaran hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Kini, jembatan telah diperlebar dan bisa dilintasi kendaraan roda empat. Jalan umum sepanjang 2,4 kilometer di pulau itu juga telah diperbaiki.

Pulau ini dihuni oleh sekitar 2.000 penduduk yang kebanyakan warga pendatang dari Jawa, Bugis, dan Buton. Mereka datang bergelombang sejak 1970-an dan mulai menetap di pulau itu pada tahun 1980-an, membentuk sebuah kampung. Mereka hampir seluruhnya menggantungkan hidup pada laut. Ada yang berprofesi sebagai nelayan penangkap rajungan, pencari kerang hijau, dan penangkap ikan teri.



Sebagian lagi bekerja sebagai nelayan pengolah hasil tangkapan, terutama ikan teri, dan nelayan pembudidaya ikan. Namun, kelompok terbesar adalah nelayan tangkap dan nelayan pengolah. Pengetahuan tentang ekosistem laut, penangkapan ikan, dan pengolahan ikan mereka turunkan dari generasi ke generasi. Perairan Bandar Lampung dan sekitarnya memang makmur.

Para nelayan Pulau Pasaran mengatakan, ikan di perairan Lampung melimpah dan tersedia sepanjang musim, terutama ikan teri. Tidak mengherankan jika sejak 1970-an, Pulau Pasaran terkenal sebagai sentra produksi ikan teri. Dulu, orang bertransaksi ikan di dermaga yang ramai seperti pasar. Dari sinilah, nama Pasaran disematkan pada pulau tersebut. Kini, sebagian besar nelayan di pulau itu lebih memilih mengirim hasil produksi mereka ke para pedagang perantara ikan di Jakarta, Medan, Padang, Jambi, dan kota-kota lainnya.

Seperti kampung nelayan lainnya, kondisi Pulau Pasaran dulu relatif seadanya. Jalan rusak dan kondisi sanitasi kurang memadai. Namun, keadaan itu berubah dari tahun ke tahun seiring dengan masuknya berbagai program dari pemerintah. Program tersebut antara lain

Kampung Nelayan Maju (Kalaju) sejak 2019, yang menghadirkan sejumlah sarana dasar di Pulau Pasaran.

Program Kalaju dilanjutkan dengan Program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) yang menghadirkan Sentra Pengolahan Ikan Pulau Pasaran pada 2023. Sentra pengolahan itu dilengkapi berbagai fasilitas penunjang produksi pengolahan ikan, mulai rumah pengeringan ikan, fasilitas gudang pembeku ikan (*cold storage*) dengan kapasitas 15 ton, fasilitas uji mutu produksi ikan, yang semua sistemnya menggunakan standar ekspor. Tersedia pula fasilitas bengkel perahu nelayan dan moda transportasi untuk mengangkut ikan hasil produksi nelayan.

Tidak hanya itu, di Pulau Pasaran kini berdiri sentra kuliner yang menjual berbagai produk olahan ikan teri dalam kemasan menarik, seperti keripik teri, peyek teri, sambal teri, atau teri goreng. Ada pula kafe yang menjual otak-otak dan pempek serta aneka minuman kopi. Sambil menyeruput kopi dan menyantap otak-otak atau pempek, pengunjung bisa menikmati pemandangan pesisir Kota Bandar Lampung atau suasana matahari tenggelam dengan latar depan perahu nelayan dan kerlap-kerlip lampu yang terpasang dari bagan-bagan di tengah laut. Tidak mengherankan jika kafe ini menjadi tempat nongkrong baru buat anak-anak muda pulau dan luar pulau.

Berbagai fasilitas fisik itu dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam program Kampung Nelayan Modern (Kalamo).

TANTANGAN NELAYAN PULAU PASARAN

Sutarsono, nelayan generasi kedua di Pulau Pasaran, menceritakan, dulu ruang pendingin ikan (*cold storage*) tidak tersedia di Pulau Pasaran. Akibatnya, nelayan seperti dirinya tidak bisa terlalu lama menahan ikan teri yang telah dikeringkan. “Jika terlalu lama, ikan teri berubah warna menjadi kuning. Harganya di pasar pasti jatuh. Meski rugi, kami terpaksa



menjual ikan teri hasil panen ke pedagang,” tutur Sutarsono yang berusia 45 tahun, dalam sebuah wawancara pada Kamis (17/10/2024).

Setelah ada fasilitas ruang pendingin ikan sejak akhir 2023, nelayan bisa menyimpan ikan teri hasil tangkapan di sana tanpa khawatir kualitas ikan akan turun. Ketika harga sedang bagus, ikan teri bisa mereka jual. Sebaliknya ketika harga kurang bagus, nelayan bisa menahannya selama beberapa waktu. Dengan begitu, nelayan relatif bisa berperan dalam mengendalikan pasokan sekaligus harga ikan teri di pasaran.

Akan tetapi, kondisi ideal itu belum sepenuhnya terjadi. Setelah ruang pendingin tersedia, masih ada persoalan klasik yang lain, yang mesti dipecahkan, yakni soal modal. Sebagian besar nelayan di Pulau Pasaran adalah nelayan kecil yang mengandalkan perputaran uang secara harian. “Ketika harga ikan rendah, kami tetap tidak bisa menahan ikan terlalu lama di *storage* karena uang kami tidak bisa berputar. Terpaksa kami lepas juga ikan teri yang kami punya ke pasar agar ada uang untuk melaut,” cerita Sutarsono.

Selama ini, nelayan sulit mengakses permodalan dari perbankan. Akhirnya, jika tidak ada modal melaut, mereka menoleh ke bank tidak resmi atau rentenir untuk mendapatkan utang dengan bunga tinggi. Jika ada keuntungan dari penjualan teri, keuntungan berkurang karena terpotong utang berbunga tinggi. Jika rugi, mereka berpotensi terjerat utang dalam jumlah relatif besar.

“Saya yakin sekali jika persoalan akses permodalan bisa diatasi, nelayan pasti lebih sejahtera. Persoalannya memang kurang modal dan harga ikan teri yang tidak ‘pasti’,” tambah Sutarsono.

Bagaimana tidak, laut di Pasaran sangat makmur. Ikan teri ada sepanjang musim. Yang belum ada adalah modal dan akses secara langsung ke pasar. Modal yang cukup dan akses pasar akan membuat nelayan akan bisa terus memproduksi dan punya posisi tawar yang lebih baik di hadapan para pedagang perantara.

Kendati demikian, bagi Sutarsono, kondisi para nelayan di Pulau Pasaran tetap lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kehadiran fasilitas penunjang dan bimbingan dari tenaga pendamping KKP dan Kemenkop UKM menerbitkan harapan baru bagi nelayan tangkap dan nelayan pengolah di Pulau Pasaran.

MEMBANGUN MASA DEPAN LEWAT KOPERASI

Sejak terjun ke laut menangkap ikan pada 2005, Sutarsono telah mencecep asam garam kehidupan. Ia pernah berjaya sebagai nelayan sekaligus pengepul ikan teri, dengan jumlah nelayan anggotanya sebanyak 18 orang. Sekali kirim ikan teri ke Jakarta bisa delapan mobil. Satu mobil memuat tiga ton ikan teri. Uang yang ia putar dalam satu-dua hari bisa dua miliaran rupiah dengan keuntungan ratusan juta rupiah dalam satu kali transaksi.

Tetapi nasib sebagai nelayan bagai ombak yang naik-turun. Keuntungan berkelindan dengan kerugian. Hal itu pernah ia alami beberapa kali. Saat salah menerka harga pasar, dia langsung rugi puluhan juta rupiah dalam satu kali transaksi. “Kami hanya bisa pasrah. Memohon-mohon kepada pedagang agar harga dinaikkan pun tidak akan didengar,” kenang Sutarsono.

Apa yang dialami Sutarsono juga pernah dialami para nelayan kecil lain di Pulau Pasaran. Ketika produksi ikan teri di Pulau Pasaran sedang banyak dan pasokan produksi ikan teri dari daerah lain juga membanjiri pasar, hampir pasti harga ikan teri akan melorot tajam. Sebagai gambaran, modal produksi ikan teri nasi rata-rata Rp100.000 per kilogram. Saat pasokan ikan teri nasi melimpah di pasar, harga per kilogramnya bisa jatuh hingga Rp50.000.

Selama bertahun-tahun, nelayan pengolah ikan teri di Pulau Pasaran tidak paham bagaimana mengatasi persoalan ini. Pasalnya, mereka bekerja dalam kelompok masing-masing. Sekarang setidaknya ada informasi dari pendamping terkait pergerakan harga ikan teri di Jakarta dan daerah-daerah pasar ikan teri lainnya. Dengan demikian, nelayan Pulau Pasaran bisa mengatur kapan akan melepas hasil produksinya, kapan akan menahannya.

Berikutnya, para nelayan di Pulau Pasaran melangkah lebih maju. Lewat program Korporasi Nelayan yang dikawal oleh DJPT KKP dan Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, mereka sepakat untuk bekerja bersama demi mewujudkan mimpi sebagai nelayan pengusaha. Untuk itu, pada 2023, mereka mendirikan Koperasi Produsen Nelayan (KPN) Kalaju Pulau Pasaran dengan aset awal berupa fasilitas produksi yang diberikan oleh KKP mulai fasilitas *cold storage*, kendaraan, fasilitas pengeringan ikan, fasilitas perbengkelan, dan lain-lain. Anggota awalnya berjumlah 22 orang, yang terdiri dari kaum bapak, ibu, dan anak muda dari keluarga nelayan.

Nasrul Agung Prayogi adalah anak muda berusia 27 tahun yang direkrut sebagai pengurus KPN Kalaju Pulau Pasaran. Sebelum koperasi beroperasi, ia dan tiga orang pengurus koperasi, diberi pelatihan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama satu pekan. Ada 14 topik dan sejumlah subtopik yang ia pelajari dari pelatihan tersebut, mulai apa itu koperasi, tata kelola koperasi, sampai bisnisnya. Berkat pelatihan tersebut, Yogi yang awalnya mengaku tidak paham sama sekali apa itu koperasi, menjadi paham.



“Dulu saya pikir koperasi itu seperti ormas, yakni kumpulan warga saja. Saya tidak membayangkan ternyata koperasi itu badan usaha seperti juga CV dan PT. Jenis usaha koperasi juga bisa banyak jenisnya,” tutur Yogi dalam wawancara pada Kamis (17/10/2024).

Nasrul Agung Prayogi, pengurus KPN Kalaju Pulau Pasaran

Sepulang dari pelatihan, Yogi, sapaan akrab Nasrul Agung Prayogi dan para pengurus KPN Kalaju Pulau Pasaran, terus didampingi oleh pendamping dari Kemenkop UKM untuk menjalankan koperasi. Yogi mengatakan, tantangan terbesar yang dihadapi pengurus KPN Kalaju Pulau Pasaran di awal terbentuknya koperasi adalah bagaimana meyakinkan para nelayan untuk menjadi anggota koperasi. Tantangan itu muncul karena sebelumnya di Pulau Pasaran sudah pernah berdiri empat koperasi yang akhirnya gagal semua. Jadi ada semacam ketidakpercayaan (*distrust*) di kalangan masyarakat kampung nelayan Pulau Pasaran bahwa usaha KPN Kalaju Pulau Pasaran akan bisa bertahan. Selain itu, warga masih asing dengan koperasi produsen. Yang mereka tahu, bentuk usaha koperasi hanyalah simpan pinjam.

Untuk mengatasi hal itu, pengurus koperasi mesti mendatangi nelayan dari rumah ke rumah dan mengedukasi mereka soal koperasi sambil membujuk mereka menjadi anggota koperasi. Usaha ini sulit dilakukan karena umumnya warga di kampung baru mau bergabung apabila usaha koperasi sudah berhasil dan memberikan keuntungan kepada masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah soal keuangan. Yogi menceritakan, belum semua anggota koperasi membayar iuran pokok sebesar Rp100.000. Begitu pula iuran wajib. “Kami pengurus harus berkeliling mengetuk rumah anggota untuk menarik kedua iuran tersebut,” tambah Yogi yang



bertugas sebagai tenaga Administrasi dan *IT Support* KPN Kalaju Pulau Pasaran.

Seiring waktu, kedua tantangan itu sedikit demi sedikit bisa diatasi dan KPN Kalaju Pulau Pasaran bisa menjalankan tujuh unit usahanya, yakni Jasa Angkutan, Rumah Pengeringan Ikan, Gudang Beku Portabel, Warung Serba ada (Waserda), Kios Nelayan, Bengkel Nelayan, Sentra Kuliner. Semua fasilitas ini penting untuk mendukung produksi dan distribusi produk unggulan Pulau Pasaran, yakni Ikan Teri Nasi, Ikan Teri Medan, Ikan Teri Jengki, dan Ikan Teri Buntiao.

Usaha Gudang Beku Portabel adalah usaha yang sangat menunjang produksi ikan teri di Kalamo Pulau Pasaran. Anggota koperasi bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan hanya membayar biaya simpan Rp500 per kilogram. Setidaknya sudah ada 10 nelayan pengolah yang rutin memanfaatkan fasilitas ini.



Waserda juga berkembang pesat dalam waktu yang relatif singkat. Kumaeni alias Mae, pengurus waserda KPN Kalaju Pulau Pasaran menceritakan, modal awal waserda hanya Rp4,7 juta. Dengan hanya mengandalkan dua komoditas yang menjadi kebutuhan nelayan, yakni garam dan gas, modal itu telah berkembang menjadi puluhan juta rupiah dalam waktu sekitar satu tahun. Keuntungan dari perputaran modal itu, dijadikan modal lagi.

“Kalau modalnya besar dan kami berhubungan dengan pemasok utama seperti produsen garam, kami yakin waserda ini suatu ketika akan menjadi grosir bahkan mal,” ujar Mae.

Kumaeni, pengurus waserda KPN Kalaju Pulau Pasaran

Melihat perkembangan tersebut, Mae sangat yakin, potensi waserda amat besar. Saat ini saja baru 10 anggota yang menjadi pelanggan waserda, padahal anggota koperasi ada 104 orang. “Dari 10 anggota yang belanja saja, kami sudah bisa mengembangkan modal, bagaimana kalau semuanya berbelanja di sini,” ujar Mae.

Jika koperasi, termasuk waserdanya bisa dikelola dengan baik, Mae percaya koperasi akan maju dan menyejahterakan keluarga nelayan. Untuk mencapai level itu, ada dua tantangan yang mesti dihadapi. Pertama, soal permodalan. Kedua, akses pada pemasok utama garam dan gas. Sejauh ini, garam, gas, dan produk lainnya yang dijual di waserda koperasi dipasok oleh pemasok perantara dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga dari pemasok utama.

Kios nelayan dan sentra makanan juga membuka jalan menuju kesejahteraan. Kios nelayan kini dimanfaatkan oleh kaum ibu di Pulau Pasaran untuk memasarkan aneka produk olahan ikan. Rohina, salah seorang ibu yang menggerakkan usaha olahan ikan bersama 11 ibu lainnya di Pulau Pasaran mengakui manfaat hadirnya koperasi.

Dia menceritakan, setelah mengikuti program yang diberikan KKP dan Kemenkop UKM, omzet penjualan produk turunan olahan ikan teri produksi ibu-ibu meningkat dari Rp500.000–Rp700.000 per bulan menjadi Rp2,5 juta–Rp3 juta per bulan. Secara keseluruhan, produk ikan teri dan turunannya dipasarkan melalui berbagai jalur, yakni distributor besar, pasar tradisional, penjualan secara perorangan, maupun lokapasar (*marketplace*).

Untuk mengakselerasi kegiatan usaha, koperasi bekerja sama dengan berbagai pihak mulai pengolah ikan, pemerintah daerah Lampung, perguruan tinggi, lembaga penelitian perikanan, pasar ritel, grosir, lembaga keuangan, pembudidaya, masyarakat lokal, dan media.

DIGITALISASI KOPERASI

Nasrul Agung Prayogi, selaku tenaga Administrasi dan *IT Support* KPN Kalaju Pulau Pasaran mengatakan, pihak koperasi berusaha memperkuat pengelolaan koperasi secara lebih modern. Yogi yang pernah berkuliah di program Ilmu Komputer, Universitas Lampung memanfaatkan ilmunya untuk merancang manajemen bisnis, pendataan produk, membuat situs, hingga sistem rantai pasok (*supply chain*) produk-produk koperasi.

Dengan begitu, alur kerja dan alur produksi hingga distribusi produk koperasi terkontrol dengan baik. Pengurus koperasi bisa memonitor perkembangan kerja yang telah ditugaskan kepada masing-masing anggota sesuai dengan target dan tujuannya. “Sistem ini akan terus kami perkuat,” ujar Yogi.

Pada masa mendatang, pemasaran produk ikan teri dan turunannya yang dihasilkan nelayan Pulau Pasaran akan diperbanyak melalui lokapasar (*marketplace*) digital sehingga jangkauannya menjadi lebih luas. Dengan cara ini, produk ikan teri dari Pulau Pasaran akan dikenal sebagai produk ikan teri dari Lampung. Selama ini, produk ikan teri dari Lampung oleh konsumen dikenal sebagai Ikan Teri Medan. Padahal bahan baku ada di Lampung dan semua proses produksinya dilakukan di Pulau Pasaran. Di era sekarang, asal-usul produk dan jenama (*brand*) merupakan nilai tambah yang besar. Jangan sampai Lampung punya teri, tapi hanya Medan yang punya nama.

Apa yang dilakukan KPN Kalaju Pulau Pasaran untuk memastikan koperasi bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan. “Pengorbanan semua pihak untuk membuat koperasi sudah banyak. Jadi, koperasi ini mesti berhasil,” tekad Yogi.

Jika model bisnis yang dijalankan KPN Kalaju Pulau Pasaran berhasil dengan baik, maka model tersebut tinggal diduplikasi oleh komunitas nelayan lainnya yang juga menjalankan korporasi nelayan berbasis

DIGITALISASI KOPERASI



koperasi. Dengan demikian, komunitas nelayan bisa berkomunikasi satu sama lain dan pada akhirnya bisa saling menyokong. Sistem seperti ini, penting untuk dikembangkan demi menyejahterakan nelayan.

PENGEMBANGAN KE DEPAN

Pada awal ketika KPN Kalaju Pulau Pasaran dilibatkan dalam program Korporasi Nelayan, hasil *assesment* awal menunjukkan koperasi ini masuk kategori kurang modern dengan skor 30,83. Skor tersebut berdasarkan pengukuran pada lima bidang utama, yakni kelembagaan, bisnis, pasar, keuangan, dan digitalisasi. Setelah dikembangkan dalam waktu sekitar satu tahun, hasil asesmen akhir menunjukkan koperasi itu telah masuk kategori modern dengan skor 64,84.

Kinerja keuangan koperasi berkembang dan semakin solid. Aset koperasi saat ini tercatat Rp5,8 miliar dengan omzet usaha mencapai Rp20 miliar. Usaha pengolahan ikan teri mampu memproduksi 240 ton per tahun. Pencapaian ini membuka mata banyak nelayan bahwa korporasi nelayan adalah jalan menuju kesejahteraan bersama. Saat ini, koperasi mampu menarik 74 anggota aktif.

Untuk mengembangkan koperasi pada masa mendatang, KPN Kalaju Pulau Pasaran akan memfokuskan pembentukan kemitraan strategis dengan berbagai lembaga baik pemerintahan maupun swasta termasuk perbankan. Pengembangan kapasitas keuangan dan peningkatan kemampuan manajemen keuangan koperasi masuk dalam prioritas pertama. Selain itu, penerapan teknologi dan digitalisasi dijadikan kunci untuk mengembangkan pasar melalui platform digital.

Dari sisi bisnis, koperasi berencana mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan potensi yang ada termasuk menjadikan Pulau Pasaran sebagai tujuan edukasi wisata pengolahan ikan teri modern. Untuk itu, koperasi akan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata.

Berdasarkan hitungan sementara, pengembangan program korporasi nelayan berbasis koperasi nelayan di Pulau Pasaran akan menciptakan lapangan kerja bagi 2000 orang lebih pada tahun pertama.

Cahaya terang untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan lewat korporasi nelayan berbasis koperasi, telah terbit di Pulau Pasaran.



WAKATOBI, RUMAH NELAYAN YANG MENJANJIKAN

Wakatobi, sebuah kepulauan di Sulawesi Tenggara, adalah rumah bagi banyak nelayan yang menggantungkan hidup mereka pada hasil laut. Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi mencatat, produksi perikanan Wakatobi terdiri dari perikanan tangkap sebanyak 18.855 ton per tahun. Angka ini baru 6,4 persen dari seluruh potensi perikanan tangkap yang ada.

Produksi perikanan tangkap didominasi ikan pelagis, yaitu ikan tuna, dengan produksi 401 ton per tahun, ikan layang 6.283 ton per tahun, ikan tongkol 2.623 ton per tahun, dan cakalang 413 ton per tahun. Potensi lain yaitu rumput laut kering 2.506 ton per tahun, 5.000 kerang mutiara per tahun, dan budi daya laut 73,16 ton per tahun yang terdiri dari ikan kerapu, lobster, lencam, dan kuwe.

Secara geografis, Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sulawesi Tenggara. Wakatobi merupakan singkatan dari empat pulau besar yaitu Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko.

Merujuk data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah penduduk Wakatobi 117,6 ribu jiwa. Mereka mendiami daratan seluas 823 km persegi. Luas daratan ini tidak seberapa dibandingkan luas laut Wakatobi yang mencapai 18.377 km persegi. Luas laut Wakatobi memang sekitar 95 persen dari total keseluruhan luas kabupaten ini. Karena itu, potensi kelautan dan perikanan Wakatobi juga menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat.

Selain kaya dengan potensi perikanan laut, Wakatobi terkenal dari sektor wisata karena memiliki ratusan jenis terumbu karang dan ikan. Nama Wakatobi sudah sering terdengar di telinga pelancong domestik maupun mancanegara. Tidak heran, jika pemerintah menetapkan Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia.

HIDUP DALAM KETERBATASAN

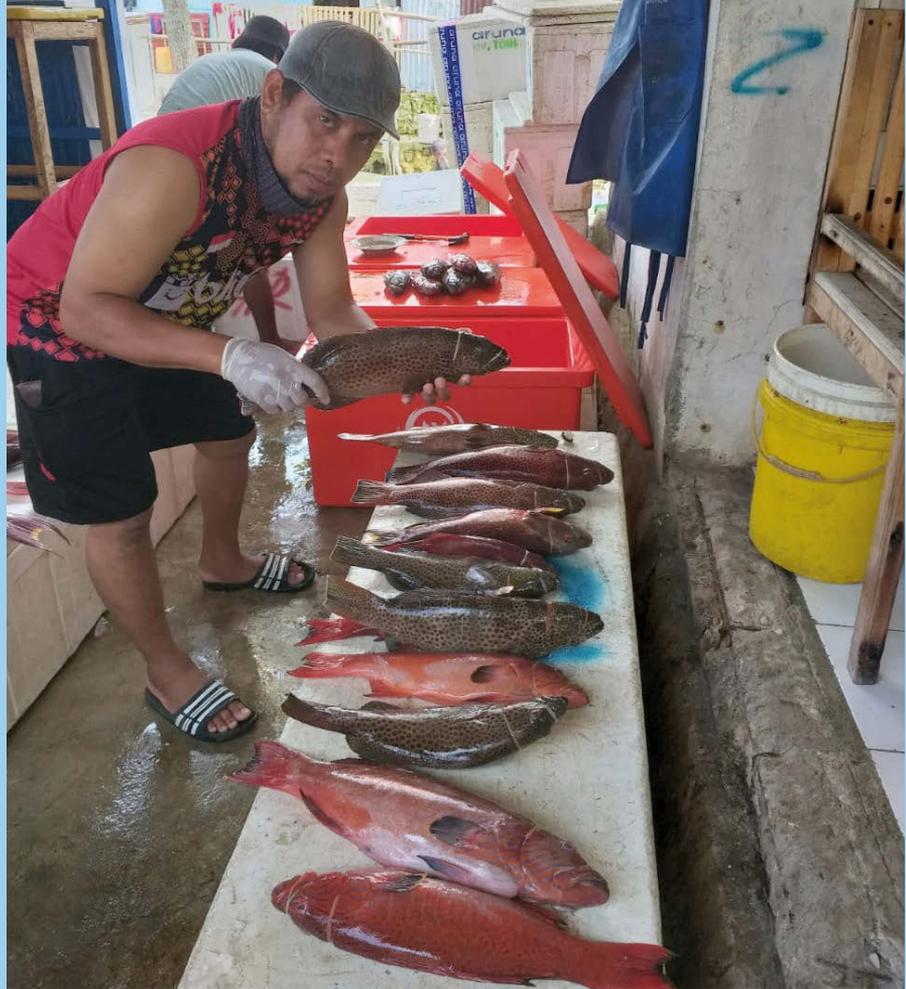
Sayangnya, kekayaan potensi perikanan di Wakatobi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh nelayan setempat. Ini terjadi karena mereka terbelit berbagai persoalan yang menghambat pekerjaannya, seperti yang dialami nelayan Koperasi Produsen Samata Padakkau di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Bertahun-tahun mereka memanfaatkan sumber daya apa adanya di tengah potensi perikanan yang melimpah.

“Koperasi kami berdiri tahun 2018, terdiri dari tiga kelompok. Dua kelompok nelayan ikan karang, satu kelompok ikan laut dalam. Koperasi kami awalnya kecil, modal, fasilitas, dan akses pasar terbatas,” kata Samran, Ketua Koperasi Samata Padakkau.

Setelah lima tahun memiliki koperasi, keterbatasan sarana-prasarana pendukung nelayan Wakatobi belum terselesaikan. Ini karena koperasi yang sudah ada belum kuat secara kelembagaan. Manajemen koperasi belum berjalan baik, partisipasi anggota masih rendah, pengurus dan pengawas belum mengerjakan tugasnya secara maksimal, serta pembukuan keuangan yang masih sederhana.

Masalah kelembagaan lainnya adalah belum ada laporan keuangan berkala kepada pengurus, permodalan masih terbatas, standar operasional prosedur perkoperasian belum ada, hingga nihilnya aspek digitalisasi dalam koperasi.





Kondisi ini sejalan dengan masalah yang dihadapi nelayan di antaranya kesulitan akses mendapatkan es batu untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan. Pengangkutan hasil tangkapan pun tergantung kondisi alam. Nelayan harus menunggu pasang surut air laut untuk mengangkut hasil tangkapan ke pelabuhan. Sebelumnya, nelayan mengandalkan perahu untuk mengangkut hasil tangkapan ke pelabuhan. Jika laut surut, susah menurunkan muatan dari perahu. Saat kondisi seperti itu, menurunkan muatan harus hati-hati, karena posisinya susah. Di kapal bongkar muat ini menyulitkan buruh. Ini juga berisiko pembongkaran muatan gagal.

“Andaikan kami punya alat transportasi yang tepat, hasil tangkapan kami lebih cepat dijual ke pelabuhan,” kata Samran, Ketua Koperasi Produsen Nelayan Samata Padakkau, Wakatobi.

Untuk sementara, nelayan mengandalkan kemampuan sendiri dengan fasilitas seadanya. Kendala ini membuat mereka terjebak dalam siklus kemiskinan, dan potensi hasil laut yang melimpah menjadi kurang optimal. Kondisi sosial di kalangan nelayan pun cukup memprihatinkan, dengan minimnya akses terhadap pelatihan dan sumber daya.

Adapun potensi seperti industri rumahan, pengolahan hasil perikanan, dan layanan perbaikan kapal, tidak tergarap karena keterbatasan yang ada. Mereka terpaksa bergantung pada sumber daya yang terbatas dan harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Mengutip laporan pendamping masyarakat Program Korporasi Nelayan tahun 2023 oleh M Ilham Anugrah Bayu, empat tahun lamanya keterbatasan ini belum bisa ditangani pengelola Koperasi Samata Padakkau. Pengurus koperasi mendambakan solusi agar nelayan dapat bekerja efektif dan bisa memaksimalkan hasil tangkapan.

TAWARAN YANG DIDAMBAKAN

Bagai petir di siang hari, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan bantuan lewat Program Korporasi Nelayan. Keputusan ini berdasarkan kondisi nelayan, legalitas koperasi, serta potensi yang ada di sana. Hal yang tidak diduga ini menjadi berkah nelayan setempat. Pemerintah menawarkan bantuan motor tiga roda, kulkas dan *freezer*, serta bantuan perlengkapan bengkel kapal nelayan. Bantuan tersebut diserahkan pengelolaannya ke pengurus koperasi. Sejak itu, transformasi besar mulai terjadi. Harapan baru tumbuh.

“Awalnya kami kaget menerima tawaran program korporasi ketika ketemu tim Kementerian Koperasi dan KKP. Saya kaget, karena program yang ditawarkan, memang impian kami,” kata Samran.

Sebelum tawaran bantuan tiba, pengurus koperasi telah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan nelayan setempat. Kebutuhan itu berdasarkan kesulitan mereka sehari-hari untuk mengirimkan hasil tangkapan, mendapatkan es batu, serta memperbaiki kapal yang rusak.

Selama ini, nelayan menyewa kendaraan ke pelabuhan, hingga menambah ongkos pengangkutan hasil tangkapan. Sejak ada motor tiga roda, nelayan dapat mengangkut sendiri ke pelabuhan. Pengurus koperasi menyewakan ke anggota koperasi dan nelayan lain yang membutuhkan. Akses perkampungan warga setempat tidak bisa dijangkau dengan kendaraan biasa. Motor tiga roda merupakan alat angkut yang tepat sementara ini di sana.

Untuk es batu, sebelumnya nelayan memanfaatkan es batu produksi warga sendiri. Es yang dibuat di rumah-rumah warga jumlahnya terbatas, tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan. Begitu pun dengan bengkel nelayan yang nihil. Saat perahu nelayan rusak, tidak ada tempat untuk memperbaiki. “Tidak adanya sarana ini menyulitkan nelayan memperbaiki kapal nelayan,” kata Samran.

Bantuan pemerintah yang diserahkan ke pengurus koperasi menjadi unit usaha baru. Bisnis itu meliputi penyewaan angkutan hasil tangkapan, penyediaan es batu, hingga jasa perbaikan kapal motor.

“Program ini, sangat membantu produktivitas nelayan,” ungkap Samran.

Transformasi yang terjadi di Wakatobi perlu dijaga kelanjutannya. Penambahan usaha koperasi yang mulai berjalan harus dapat dijaga kelanjutannya. “Sebelumnya, koperasi hanya fokus pada jual beli hasil laut dan pembinaan nelayan. Belum ada unit usaha lain. Setelah program korporasi nelayan, mereka mulai merambah ke unit usaha tambahan. Industri rumahan, pabrik es, mereka membuka bengkel untuk nelayan. Jadi ada penambahan unit usaha dari sebelumnya,” kata Syahwan Ode, pendamping korporasi nelayan yang ditempatkan di Wakatobi.

Pendampingan program korporasi nelayan berjalan per 9 Oktober hingga 31 Desember 2023. Sepanjang periode tersebut terdapat transfer pengetahuan, pelatihan, pemberlakuan standar kerja dan manajemen yang baik, hingga belajar menjangkau pasar.

Perbaikan manajemen kerja ini terjadi, di antaranya pada produksi es balok. Pendamping mengajarkan cara penempatan mesin produksi es balok berupa kulkas dan *chest freezer*, dengan aturan dan panduan untuk

pengelola (penyimpanan mesin produksi, perawatan, penggunaannya, teknis produksi, penyimpanan, serta penjualan produk). Hal-hal tersebut harus dilakukan sesuai aturan agar semua aktivitas di seluruh tempat produksi sesuai dengan standar yang ada.

Terakhir adalah bisnis jual beli hasil laut. Pada bagian ini harus diberikan perhatian khusus mengenai operasionalisasi dan pengembangan dari bisnis, karena jual beli hasil laut merupakan bisnis utama. Karena itu, pengelolaan unit usaha ini sudah seperti industri perikanan skala menengah dan besar yang modern. Sehingga, pengurus koperasi membuat aturan alur teknis, dari penerimaan bahan baku, penanganan, penyimpanan, hingga pendistribusian produk yang memiliki standar kualitas baik. Tanpa ada dokumen standar dan alur aktivitas kerja, sulit untuk memastikan koperasi dapat berjalan konsisten dalam jangka panjang.

Pendampingan selama tiga pekan sejak program korporasi dijalankan, berdampak positif bagi koperasi. Performa Koperasi Samata Padakkau cukup baik di aspek kelembagaan, khususnya di subbidang legalitas dan organisasi. Performa bagus masih belum ditunjang dengan manajemen organisasi serta partisipasi anggota yang baik.

Alur informasi dan pelaporan secara berkala belum baik kepada seluruh anggota. Begitu pun dengan aspek bisnis. Meskipun sudah berjalan hampir setiap hari, manajemen cukup lemah ditambah lagi permodalan untuk pengembangan bisnis yang masih sangat terbatas serta kapasitas SDM dan jumlahnya yang masih terbatas.

Kini, koperasi telah memiliki sarana dan prasarana kantor dan penunjang operasional 28 unit usaha. Semua bantuan ke nelayan Samata Padakkau telah diterima bulan Desember 2023. Namun barang bantuan itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pekerjaan rumah ke depan masih membentang.

Benih harapan yang sudah muncul harus dijaga. Pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota harus menjaga soliditasnya di tengah berkembangnya unit usaha. Standar kerja dan manajemen yang telah disepakati mesti dijaga dan diterapkan.

Dengan adanya intervensi program korporasi, nelayan mendapatkan akses lebih baik terhadap fasilitas penting. Sebuah unit usaha es batu dibuka, membantu nelayan menjaga kesegaran hasil tangkapan mereka. Kini, mereka tidak lagi berebut mendapatkan es batu yang terbatas, karena koperasi menyediakan cukup banyak stok es untuk kebutuhan mereka.

Selain itu, koperasi juga menyediakan motor tiga roda untuk transportasi hasil tangkapan ke pelabuhan, yang sebelumnya sangat sulit dijangkau. Dengan kemudahan ini, proses pengiriman hasil tangkapan menjadi lebih efisien, mengurangi risiko kerugian akibat kondisi laut yang tidak mendukung.

Sebagaimana diungkapkan Samran, Ketua Koperasi Samata Padakkau, program ini menjawab banyak kebutuhan yang selama ini mereka impikan. Koperasi tidak hanya meningkatkan produktivitas nelayan tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi warga. Sekarang, dengan 52 anggota, koperasi berkomitmen untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan dan tidak sekadar mengejar bantuan.

“Sekarang unit usaha kami bertambah. Banyak nelayan yang tertarik mau bergabung ke koperasi. Penambahan anggota baru akan kami sepakati di RAT (rapat anggota tahunan) koperasi,” kata Samran. Harapan nelayan mulai tumbuh. Kekuatan mereka makin bertambah. Tugas berikutnya adalah menjaganya agar berkembang seperti yang dicita-citakan.

MENJAGA HARAPAN YANG TUMBUH DARI DUSUN PANCER

Koperasi Konsumen Mina Berkah Lestari di Banyuwangi, Jawa Timur ini bagaikan bayi yang baru lahir. Koperasi nelayan yang berdiri 2023 ini masih banyak belajar, mulai merangkak, berjalan, hingga nantinya ingin berlari kencang. Untuk sementara, pengurus koperasi menguatkan hal-hal dasar lebih dahulu.



“Masih banyak hal yang perlu kami pelajari. Kami ingin belajar agar kami bisa lebih maju. Harapan kami, koperasi ini menjadi contoh untuk nelayan lain. Mendirikan koperasi itu susah sekali di kalangan nelayan. Karena pikirannya orang di sini, ikut koperasi itu hanya seperti menanam saham. Kami ingin tidak begitu, tetapi ingin agar orang bergabung di koperasi sama-sama berusaha dan bekerja mengembangkan koperasi.”

Edy Sukamto, ketua Koperasi Konsumen Mina Berkah Lestari.

Melihat situasi ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi bantuan koperasi lewat program kampung nelayan maju atau Kalaju pada tahun 2023. Bantuan yang diberikan berupa mobil *pick up* terbuka, *freezer*, *cool box*, dan seperangkat alat-alat perkantoran. Sebagian bantuan bisa langsung dimanfaatkan, tetapi juga ada yang belum dimaksimalkan, terutama penggunaan perangkat perkantoran. Sebab, nelayan belum terbiasa dengan model kerja administratif perkantoran.

Mina Berkah Lestari adalah koperasi yang terdiri dari beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bergerak di bidang jasa. Adapun bidang usaha yang dimaksud, di antaranya penangkapan ikan, pengolahan ikan, budi daya ikan dan transportasi atau logistik. Secara legalitas, koperasi ini memperoleh badan hukum per 27 Juli 2023.

Kecamatan Pesanggaran memiliki hasil tangkapan ikan yang berfluktuasi dari 924,80 ton pada 2020 hingga mencapai puncaknya di 7.341,40 ton pada 2021, sebelum menurun kembali menjadi 1.790,10 ton pada 2022. Data ini menunjukkan bahwa Pesanggaran memiliki potensi ekonomi tinggi dalam perikanan, tetapi hasil tangkapan sangat bergantung pada musim dan kondisi cuaca.

PROSES PROGRAM KORPORASI NELAYAN

Pemerintah menurunkan pendamping nelayan lewat program Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi agar bantuan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Proses inilah yang menentukan keberlanjutan bantuan itu, sehingga memberi nilai tambah pada nelayan.

Pada rentang tahun 2023 hingga 2024, ada dua pendamping dalam tiga periode pendampingan. Mereka adalah Mochammad Fahmi dan Khotijah. Fahmi dalam laporannya tahun 2023 memberi skor 28,23 yang menunjukkan koperasi tersebut tidak modern. Hal ini wajar, mengingat usia koperasi belum genap satu tahun saat penilaian awal.

Selama menjalankan tugasnya, pendamping mengenalkan cara-cara menjalankan koperasi yang baik, dari tata kelola organisasi hingga administrasi perkantoran. Pendamping mengurai kekuatan, kelemahan, potensi, hingga ancaman yang dapat mengganggu jalannya koperasi. Dari analisis itu, pendamping menyusun strategi agar koperasi semakin kuat dan berdaya.

Dalam hal keanggotaan misalnya, pendamping membantu melakukan perekrutan anggota sambil memberikan sosialisasi tentang manfaat keanggotaan dan peran anggota di koperasi. Strategi yang digunakan koperasi adalah memberlakukan nilai retribusi yang berbeda antara anggota dengan nonanggota untuk pemanfaatan aset-aset koperasi. Aset tersebut, meliputi alat transportasi, *cool box*, timbangan digital, dan *freezer*.

Pada periode pendampingan kedua, Khotijah fokus menguatkan manajemen kerja koperasi. Awal melakukan pendampingan nelayan pada Juli 2024, manajemen koperasi belum rapi. Khotijah mengenalkan bagaimana tata kelola koperasi yang baik. “Saya beri pemahaman terkait ideologi berkoperasi,” kata Khotijah.

Menguatkan tata kelola kelembagaan koperasi bukan hal mudah. Tidak henti-hentinya, pendamping memberi pengertian dan contoh cara berorganisasi secara modern. Meski perempuan, Khotijah mengikuti ritme kerja nelayan agar dapat intens berkoordinasi demi kemajuan koperasi.

“Hal pertama yang saya lakukan membangun pendekatan personal. Saya datangi rumahnya. Saya nimbrung sambil ikut ngopi. Saya ikut

kapan pengurus ada waktu ketemu. Jika bapak-bapak bisanya sambil ngopi sampai malam, saya ikuti. Sekarang rapat bahkan sampai malam,” kutipan Khotijah.

Menguatkan tata kelola koperasi, menurut Khotijah, perlu pendekatan yang intens. Sebenarnya pola ini tidak sulit dikerjakan, karena nelayan sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Nelayan hanya perlu tahu mana yang tepat dan lebih baik sesuai aturan. Bagi pengurus koperasi, transfer pengetahuan menambah hal baru bagi mereka. Apalagi, sebagian nelayan belum memahami cara berkoperasi dengan pendekatan yang lebih modern.

Strategi pendekatan ini berdampak positif; jumlah anggota Koperasi Mina Lestari meningkat dari 24 orang menjadi 31 orang pada periode pertama. Ketika Khotijah melakukan pendampingan pada tahun 2024, jumlah anggota bertambah menjadi 37 orang. Mereka terdiri dari warga dengan beragam latar belakang, gender, dan rentang usia. Dari sisi geografis, keanggotaan koperasi adalah warga dari lintas desa dan kecamatan di sekitar Dusun Pancer, Kecamatan Pesanggaran. Fakta ini menandakan adanya antusiasme dan kepercayaan nelayan dalam berkoperasi.

USAHA BARU YANG MENJANJIKAN

Khotijah ingin nelayan tidak hanya fokus pada penyewaan barang bantuan yang dihibahkan ke koperasi. Namun, juga dapat berinovasi menghasilkan produk olahan dari perikanan. “Alhamdulillah, ada banyak varian produk, seperti ikan cumi dan ikan asin yang dapat kami hasilkan,” kata Khotijah.

Produk olahan dari ikan yang dihasilkan keluarga nelayan Dusun Pancer, salah satunya sambal cumi. Ada empat varian sambal, yaitu sambal *baby* cumi, sambal cumi ijo, sambal cumi bawang, dan sambal cumi jawa. Selain itu, ibu-ibu nelayan juga membuat produk olahan berupa ikan asin, abon, dan peyek ikan.

Selain ke pasar lokal, produk sambal olahan ikan itu sementara ini dapat dipasarkan ke jaringan tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Nelayan anggota koperasi ingin produk itu dapat dikembangkan ke pasar yang lebih luas dalam jumlah produk yang lebih besar. Adanya usaha penjualan sambal dari olahan ikan ini menambah nilai ekonomi keluarga nelayan.

Ada kalanya nelayan sulit mencari ikan di laut. Biasanya, masa paceklik di Banyuwangi terjadi pada akhir tahun hingga awal tahun berikutnya. Kehadiran sambal cumi memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan, apalagi ketika nelayan memasuki masa paceklik. Bisnis sambal cumi menjanjikan karena ketersediaan cumi di perairan sekitar Banyuwangi besar, kualitasnya juga bagus.

“Potensi perikanan Dusun Pancer luar biasa, dilengkapi dengan pelabuhan. Namun, yang memanfaatkan hasil lautnya kebanyakan dari luar, seperti nelayan dari Bali. Karena keterbatasan kapal besar, nelayan di Banyuwangi hanya mencari cumi dan memancing ikan dengan kapasitas kecil,” kata Khotijah.

Di Banyuwangi, saat ikan melimpah, harganya jatuh menjadi Rp3.000-Rp5.000 per kilogram. Sebaliknya, ketika masa paceklik, ikan sulit dicari. Bagi warga setempat, tangkapan ikan itu terjadi pada dua musim, petengan dan padangan. Sementara cumi tidak mengenal musim, selalu ada sepanjang musim dengan kualitas cumi yang bagus. “Jika ikan ada musimnya, cumi terus ada,” kata Khotijah.

Potensi penjualan produk olahan dari cumi dianggap bagus. Selain bahannya tersedia cukup, ada potensi pasar di lokal Banyuwangi sendiri. Pembuatan produk sambal cumi dilakukan dengan autodidak, alias

belajar sendiri. Karena itu, ibu-ibu nelayan ingin belajar dari pihak-pihak yang memiliki keahlian membuat produk tersebut secara profesional. Pelatihan dari pihak yang lebih berpengalaman akan menentukan masa depan produk tersebut. Sementara itu, perluasan pasar produk olahan ikan maupun cumi ini dapat berjalan beriringan dengan berkembangnya sektor wisata di Banyuwangi.

KEBUTUHAN KE DEPAN

Setelah berinteraksi intens dengan nelayan, Khotijah memahami bagaimana kehidupan nelayan. “Dari sini saya jadi tahu, perjuangan seorang ayah nelayan luar biasa. Biasanya, petani berangkat pagi, sore pulang. Tetapi nelayan itu dari sore, hingga subuh melaut, istirahat siang, lalu berangkat lagi. Begitu seterusnya. Kadang juga harus menghadapi risiko kecelakaan di laut,” katanya.

Pada akhir masa pendampingannya, Khotijah menilai, Koperasi Mina Berkah Lestari mulai beranjak modern. Hasil asesmen akhir tata kelola koperasi ini menunjukkan angka 84,7. Skor ini masuk kategori modern. Hal ini ditandai dengan penyimpanan dokumen-dokumen koperasi yang mulai digital. Hanya saja, konsistensi penggunaannya belum maksimal. Kondisi tersebut terjadi disebabkan keterbatasan SDM warga setempat dan infrastruktur yang belum siap.



“Komponen media sosial, *e-mail*, dan pelaporan sudah digital. Hanya saja, belum ada yang menyatukan pengurus pengelola dalam satu sistem. Makanya belum sepenuhnya disebut digital, karena belum semua hal dipraktikkan secara digital,” katanya.

ANGIN PERUBAHAN MAKIN KENCANG DI PANCER

Sejak penerapan program, koperasi mengalami transformasi dalam pengelolaan dan pengembangan usaha. Dinamika perjalanan koperasi memberikan pelajaran penting bagi pengelola. Misalnya dalam aspek bisnis, pengurus tidak lagi gegabah memutuskan untuk mengembangkan usaha baru. Analisis bisnis dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku, kemampuan produksi, serapan pasar, dan strategi pemasaran.

Dalam perjalanannya, terdapat pelajaran penting dari sebuah kegagalan yang pernah dilakukan. Suatu saat, pengurus menambah bisnis baru dengan menjual ikan manyung. Setelah usaha ini dijalankan mendapat respons positif dari pasar. Produk ikan manyung nelayan diminati pembeli. Namun sayangnya, persoalan yang tidak diprediksi sebelumnya muncul.

“Ternyata bahan bakunya tidak ada. Kami kesulitan menyediakan stok ikan manyung. Nelayan jarang mencari ikan jenis itu. Akhirnya bisnis ini tidak jalan. Pelajaran dari kasus ini, kami perlu menjalankan usaha dengan hati-hati. Salah satu yang harus kami pastikan adalah ketersediaan bahan bakunya,” kata Edy Sukamto.

Berangkat dari kondisi tersebut, Edy mengakui lemah dalam hal administrasi karena nelayan belum terbiasa mengerjakan kerja-kerja perkantoran. Untuk ke depan, jika masih ada program pendampingan, ia meminta tetap diteruskan dengan adanya penguatan aspek bisnis, nelayan dapat mencari pendapatan alternatif di luar usaha yang sudah dijalankan.

SUARA GENERASI Z YANG PERCAYA MASA DEPAN ADA DI LAUT

Ketika sebagian anak muda berpendidikan berlomba-lomba mengejar karier di kota besar, mereka justru memilih mengembangkan industri perikanan di kampung-kampung nelayan. Mereka percaya sumber daya alam di laut jika dikelola dengan baik, akan menjamin masa depan.

NASRUL AGUNG PRAYOGI



Dengan berbagai potensi sumber daya yang ada, Yogi berpendapat, seharusnya masyarakat di Pulau Pasaran bisa hidup sejahtera. “Kekayaannya banyak, tinggal bagaimana kita mengolahnya saja,” ujar Yogi.

Nasrul Agung Prayogi adalah satu dari sedikit anak muda Pulau Pasaran yang sempat mengecap pendidikan tinggi. Ia pernah kuliah di jurusan Ilmu Komputer, Universitas Lampung meski tidak sampai lulus.

Anak muda yang kini berusia 27 tahun itu, sempat merantau ke Jawa untuk meniti karier di bidang teknologi digital selama empat tahun (2019–2023). Ia pernah bergabung dengan sejumlah lembaga nirlaba dan mengembangkan usaha rintisan (*start up*). Salah satu proyek yang telah ia kerjakan adalah digitalisasi sistem peternakan sapi di Sekolah Peternakan Rakyat.

Suatu hari, ayahnya yang dikenal sebagai penggerak Kalamo Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung, meminta Yogi pulang dari rantau untuk membantu mengembangkan koperasi modern. “Karena warga melihat saya mampu, saya ditarik ke kampung. Otomatis saya kembali ke kampung,” kata Yogi.

Di Pulau Pasaran memang tidak banyak anak muda berpendidikan tinggi dan menguasai teknologi digital. Sebagian besar anak muda di pulau itu paling tinggi sekolah sampai setingkat SMA. Selanjutnya, mereka bekerja demi membantu perekonomian keluarga.

Ketika pulang kampung, Yogi melihat sejumlah kemajuan. Lapangan di Pulau Pasaran berubah menjadi tempat membangun unit-unit usaha. Berbagai fasilitas produksi perikanan juga mulai didirikan. “Saya lihat sudah banyak pengorbanan untuk mendirikan koperasi. Dari situ saya bertekad proyek pengembangan koperasi ini harus berhasil.”

Sejak awal, Yogi dilibatkan dalam pengembangan koperasi. Ia termasuk satu dari empat warga Pulau Pasaran yang mendapat pelatihan tentang perkoperasian dari Kemenkop UKM di Jakarta sekaligus memperoleh sertifikat sebagai pekerja koperasi.

Sepulang dari pelatihan tersebut, Yogi diberi peran sebagai tenaga Administrasi dan *IT Support* KPN Pulau Pasaran. Namun, lingkup pekerjaan Yogi sebenarnya lebih luas dari sekadar tenaga administrasi dan pendukung teknologi informasi. Dia juga merancang manajemen bisnis, pendataan produk, membuat situs, hingga membangun sistem rantai pasok (*supply chain*) produk olahan ikan Pulau Pasaran. Dengan semua sistem yang berbasis digital tersebut, pengurus koperasi bisa memonitor progres pekerjaan yang telah ditugaskan kepada masing-masing anggota sesuai dengan target dan tujuannya.

Yogi mengatakan, pengalamannya membangun digitalisasi sistem peternakan sapi saat bekerja di lembaga nirlaba di Jawa, ternyata bisa dia manfaatkan untuk mengembangkan sistem koperasi di kampungnya. Dia akan terus memperkuat sistem digitalisasi bisnis koperasi dari hulu ke hilir. Salah satu yang sedang ia kembangkan adalah digitalisasi sistem pemasaran koperasi yang terkoneksi dengan lokapasar (*marketplace*).

Dengan cara itu, dia yakin produk-produk yang dihasilkan para nelayan di Pulau Pasaran bisa menjangkau pasar yang lebih luas, tanpa harus bergantung terus pada pedagang perantara di Jakarta dan kota-kota lain. Ia juga ingin produk ikan teri dari Pulau Pasaran dikenal sebagai produk ikan teri dari Lampung. Selama ini, produk ikan teri dari Lampung oleh konsumen dikenal sebagai Ikan Teri Medan. "Padahal terinya dari Lampung," tambahnya.

Di era sekarang, asal-usul produk dan jenama (*brand*) merupakan nilai tambah yang besar. Jangan sampai Lampung punya teri, tapi hanya Medan yang punya nama.

Setelah ikut mengembangkan koperasi di Kalamo Pulau Pasaran di bawah bimbingan pendamping Kemenko UKM, Yogi melihat program korporasi nelayan sangat menjanjikan. Jika tantangan-tantangan di

tahap awal pengembangan koperasi bisa diselesaikan, dia yakin program ini akan menguntungkan anggota koperasi dan masyarakat.

Dia melihat sendiri, sumber daya alam di pesisir Bandar Lampung sangat kaya. Ikan teri melimpah dan tersedia sepanjang musim. Pasar ikan teri juga masih sangat luas. Tinggal bagaimana koperasi bersama nelayan bisa memberi nilai tambah pada produk ikan teri dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Di luar perikanan, Yogi melihat potensi lain yang juga bisa dikembangkan di Pulau Pasaran, yakni pariwisata. Di selatan Pulau Pasaran, misalnya, banyak orang yang datang ke dermaga untuk menikmati suasana matahari tenggelam (*sunset*). Tidak jauh dari Pulau Pasaran, terdapat Pulau Timbul yang juga memiliki pesona. Yogi berencana akan mengembangkan paket-paket wisata bersama anak-anak muda lainnya. Salah satunya adalah paket wisata berperahu dari Pulau Pasaran ke Pulau Timbul.



KUMAENI DAN ROSINI

“Anak-anak muda pun tidak perlu merantau jauh-jauh ke Jawa untuk mengumpulkan rupiah. Kelola saja kekayaan alam yang ada di Pulau Pasaran,” ujar Mae.



Seperti anak muda lainnya di Pulau Pasaran, Kumaeni pernah merantau ke Jawa untuk bekerja. Ia sempat menjadi *sales promotion girl* (SPG) di sebuah mal di Bogor, Jawa Barat selama empat tahun.

Setelah pulang kampung, perempuan berusia 31 tahun yang biasa dipanggil Mae itu, menyadari besarnya potensi perikanan dan sumber daya alam lainnya di pesisir Bandar Lampung. Ia pun memutuskan menetap kembali di kampung, ikut mengembangkan kekayaan pesisir Lampung. “Saya ingin bekerja di kampung saja sambil mengasuh anak,” katanya.

Ketika KPN Pulau Pasaran berdiri, Mae bergabung dan mendapat tugas mengelola pembukuan dan keuangan koperasi. Bersama, rekannya Rosini, dia juga ikut mengembangkan unit usaha waserda. Rosini atau Ocha mengurus perdagangannya, Mae mengurus keuangannya.

Mae sangat gembira melihat perkembangan usaha waserda yang baru berusia sekitar satu tahun. Waserda itu sudah mampu memutar uang

modal awal sebesar Rp4,7 juta menjadi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Pada masa ramai, omset waserda sehari bisa mencapai lebih dari Rp1 juta. Setiap keuntungan yang diperoleh diputar kembali sebagai modal.

Bisnis utama waserda ini adalah menyediakan garam dan gas untuk keperluan nelayan. Saat ini, baru 10 anggota yang menjadi pelanggan waserda, padahal anggota koperasi ada 104 orang. “Dari 10 anggota yang belanja saja, kami sudah bisa mengembangkan modal, bagaimana kalau semuanya berbelanja di sini,” ujar Mae. Jika koperasi, termasuk waserdanya bisa dikelola dengan baik, Mae dan Ocha percaya koperasi akan maju dan menyejahterakan keluarga nelayan serta masyarakat sekitar Pulau Pasaran.



RAHMAT, KEMBALI MELAUT UNTUK KELUARGANYA DI WAKATOBI

Laut adalah bagian kehidupan warga Suku Bajo. Tidak hanya tinggal di sekitar laut, orang-orang Bajo mencari penghidupan di sana, tak terkecuali kawula muda di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Laut adalah segalanya bagi mereka.

Sejak adanya program korporasi nelayan, Koperasi Produsen Nelayan Samata Padakkau di desa itu semakin kuat. Unit-unit usaha semakin hidup. Peluang kerja untuk anak muda juga makin terbuka. Bagi anak muda yang melaut mencari ikan, mereka makin terdorong untuk bekerja lebih giat. Sebab, sarana pendukung nelayan sudah tersedia di kampung sendiri.

Nelayan hanya setor ke koperasi, lalu koperasi membelinya. Nelayan tidak perlu mengeluarkan ongkos tambahan mengangkut ikan ke Pelabuhan Wanci yang berjarak 2,8 kilometer. Keuntungan ini yang dirasakan nelayan sejak koperasi semakin hidup.

Rahmat (27), pemuda yang baru membangun rumah tangga itu sudah punya perahu ikan sendiri. Pada perahunya, dia sandarkan penghasilan keluarganya. Ia menggunakan perahu itu untuk mencari ikan di Perairan Wakatobi. Rahmat telah menjadi nelayan yang sebenarnya.

Ia sudah kenal dengan kehidupan nelayan sejak kecil, sebab orangtuanya adalah nelayan. Kini dia tidak lagi ikut orangtuanya, melainkan dirinya sendiri yang melaut. "Sekarang saya punya satu bodi batang (perahu ikan), panjangnya 10 meter," kata ayah satu anak ini.

Ia memutuskan melaut karena belum ada pekerjaan lain. Hal lain yang mendorongnya melaut karena memang ia suka dengan laut. "Kerja di laut itu enak. Hari dan jam kerja bisa kita atur sendiri. Mau keluar atau tidak, terserah kita," katanya.

Potensi perikanan di sekitar Wakatobi masih besar. Ikan masih banyak. Hanya saja, pencariannya tergantung kondisi cuaca. Sehari-hari, jika melaut, ia menggunakan alat tangkap pancing. Lokasi pencarian ikannya ada di sekitar rompong, rumah-rumah ikan di sana. Adapun hasil tangkapannya berupa ikan pelagis, yaitu ikan tuna dan cakalang.

Jika beruntung, Rahmat bisa mendapatkan 100 kg ikan tuna. Jika harga sedang bagus, ikan tuna bisa dihargai Rp80.000 per kg di Wakatobi. Adapun aktivitasnya melaut dimulai pukul 01.00 atau pukul 02.00, lalu ia bergerak ke laut sejauh 30–40 mil dari pantai. “Itu area itu untuk mancing ikan tuna. Kadang juga bisa dapat ikan tuna di perairan sejauh 20 atau 30 mil dari pantai,” kata Rahmat.

Rahmat merasakan dampak positif dari penguatan koperasi di kampungnya. Untuk membeli es balok, perbaikan perahu ikan, hingga menjual hasil tangkapan dapat dilakukan lewat unit usaha koperasi. “Kami jadi lebih fokus dan semakin produktif,” kata Rahmat.

Sejauh ini, Rahmat belum berpikir menjalani pekerjaan lain selain menjadi nelayan. Ia lebih tahu dan lebih memahami bagaimana cara mencari ikan. Dia justru bertanya balik, jika ingin mencari kerja di luar sebagai nelayan, lalu akan bekerja sebagai apa? Ia pun tak menyoal tantangan yang dihadapi nelayan selama di laut. Panas, hujan, dan mengarungi ayunan ombak laut, sudah biasa dihadapi.

ISMAIL WOMSIWOR MENGGANTANG PELUANG DI SAMBER-BINYERI



Ismail meyakini, potensi hasil laut di perairan sekitar Biak Numfor masih besar. Maka bekerja di koperasi atau menjadi nelayan tetap menjanjikan. “Ikan di sini masih banyak, jadi nelayan masih bisa dilakukan,” kata Ismail.

Sejak Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri diresmikan, 23 November 2023, aktivitas warga di kampung itu semakin hidup. Sebelumnya, hari-hari terasa sepi, sulit membicarakan harapan dan masa depan di sana. Namun Kalamo Samber-Binyeri memberi harapan baru. Terlebih lagi dengan kehadiran Koperasi Samber-Binyeri Maju, aktivitas ekonomi warga mulai menggeliat.

Sebagai bagian dari komponen warga, kawula muda merasakan dampak positif. Hal ini wajar, karena kampung nelayan itu didominasi anak-anak muda dengan usia kurang dari 30 tahun. Catatan Enggo Catur Srianto, pendamping masyarakat setempat, 60 persen warga merupakan anak-anak muda. Pengelola koperasi membutuhkan tenaga kerja untuk bekerja di unit-unit usaha yang dibentuk.

Peluang ini bagai durian runtuh di tengah sulitnya kesempatan kerja. Apalagi peluang itu ada di kampung sendiri. Perekrutan kawula muda dilakukan berdasarkan kapasitas dan minat mereka. Salah satu yang berhasil lulus seleksi adalah Ismail Womsiwor (21), pemuda setempat lulusan SMA.

Ismail diterima sebagai penanggung jawab penerimaan ikan dari nelayan. Ikan tersebut dibersihkan di ruang khusus untuk kemudian dimasukkan ke ruang pendingin udara. Ismail juga bertanggung jawab atas penimbangan ikan, mencatatnya, dan melaporkan ke penanggung jawab *cold storage* yang juga rekan pemuda di kampungnya, bernama Timo.

Anak bungsu dari empat bersaudara ini mendapat gaji Rp1,5 juta per bulan dari mitra kerja koperasi, yaitu PT Perikanan Nusantara Jaya (PNJ). Dengan gaji itu, Ismail dapat menabung dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jika aktivitas di koperasi sedang landai, maksudnya tidak ada ikan masuk, Ismail sesekali ikut melaut, menjadi tenaga pembantu selama di laut. Ia pun bisa melaut sendiri mencari ikan.

Senin hingga Selasa Ismail lebih banyak di koperasi. Dia memastikan suhu udara di *cold storage* tetap terjaga pada minus 30 derajat celsius. Dia juga secara berkala mengecek kondisi aliran listrik di tempat penyimpanan ikan itu. "Ikan sudah banyak," kata Ismail saat ditemui di lokasi.

Sebenarnya, tidak hanya Ismail yang aktif bekerja di Koperasi Sumber-Binyeri Maju. Selain dia dan Timo, ada Yohanis, Christina, dan belasan anak muda lain. Mereka bekerja sesuai kapasitas dan minatnya. Sebagian menjaga warung serbaada, bengkel nelayan, *docking* kapal, hingga melaut dengan menggunakan kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil tangkapannya kemudian dijual ke koperasi.

Ismail dan anak muda di Samber-Binyeri tidak ingin berhenti di sana. Setelah mendapatkan penghasilan dari koperasi, mereka ingin naik kelas, bukan lagi buruh nelayan, melainkan menjadi nelayan yang sebenarnya. Bagi yang putus sekolah, aktivitas di koperasi menjadi pijakan untuk membuka peluang melanjutkan jenjang pembelajaran ke tingkat lanjut.

“Mereka ada yang rajin. Tentu jika ditanya, apakah selamanya mau seperti ini? Tidak. Mereka ingin menjadi nelayan yang sebenarnya,” kata Enggo Catur Srianto, Tenaga Pendamping Masyarakat yang mendampingi Koperasi Samber-Binyeri Maju.



KAUM PEREMPUAN PENGGERAK RODA KORPORASI NELAYAN

Peran perempuan begitu penting dalam menggerakkan roda korporasi nelayan. Mereka bergerak di hulu maupun hilir industri perikanan di kampung nelayan. Setidaknya itulah yang terlihat di kampung nelayan Bandar Lampung, Kupang, Biak Numfor, Banyuwangi, dan Wakatobi.

Sebagian perempuan itu mengurus keuangan. Sebagian lagi mengelola toko serbaada atau mengolah ikan hasil tangkapan menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah. Tanpa kehadiran mereka, program korporasi nelayan yang umumnya dijalankan dalam bentuk koperasi, mungkin saja sulit untuk berjalan.

Seperti kata pepatah, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui program korporasi nelayan yang bertujuan menyejahterakan keluarga nelayan, ternyata juga memiliki dimensi pemberdayaan perempuan. Lewat program ini, kaum perempuan nelayan yang sudah terbiasa bekerja keras, menjadi kian mandiri dan mampu menghasilkan penghasilan sendiri.

Berikut beberapa profil kaum perempuan yang menjadi penggerak koperasi nelayan di beberapa Kalaju dan Kalamo. Apa saja yang telah mereka lakukan?

ROHINA, PEREMPUAN BERDAYA DARI KALAMO PULAU PASARAN

Seperti kaum perempuan lainnya di Kalaju Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung, Rohina terbiasa bekerja keras membantu suami. Ia tak mau berdiam diri di rumah sambil menanti suami pulang melaut. Ia memilih bekerja sebisanya demi membantu perekonomian keluarga.

Bersama sejumlah ibu lainnya di Pulau Pasaran, ia mengolah ikan hasil tangkapan suami menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik ikan hingga sambal teri. Dengan begitu, ikan hasil tangkapan mendapatkan nilai lebih.

Akan tetapi, bertahun-tahun mengolah ikan hasil tangkapan, usaha mereka begitu-begitu saja alias nyaris jalan di tempat. Omzet penjualan hingga tahun 2020 tidak beranjak dari kisaran Rp500.000–Rp700.000 per bulan. Keuntungannya teramat tipis, apalagi jika harus dibagi kepada semua ibu-ibu yang menjadi anggota kelompok Rohina. Keringat yang mengalir, tenaga yang terpakai, dan waktu yang dihabiskan untuk mengolah ikan, ternyata tidak banyak menghasilkan uang. Mengapa bisa begitu? Persoalannya amat klasik, mereka hanya memiliki sedikit modal dan kemampuan memasarkan produk olahan yang terbatas.

Ketika program Kalaju—kemudian dilanjutkan Kalamo—dilaksanakan di Pulau Pasaran, Rohina dan kawan-kawan melihat peluang untuk memajukan usaha mereka. Tanpa ragu, Rohina dan kelompoknya bergabung dengan Koperasi Produksi Nelayan Kalaju Pulau Pasaran yang baru dibentuk tahun 2023. Mereka ikuti bimbingan para pendamping Kalaju dan Kalamo dari KKP serta pendamping dari Kemenkop UKM yang bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidup nelayan di berbagai tempat di Indonesia. Lewat aneka pelatihan, mereka belajar bagaimana meningkatkan kualitas produk, mengemas produk, mengelola keuangan, hingga memasarkan produk.

Seiring waktu, ternyata program itu berdampak positif pada usaha Rohina dan kelompoknya. Mereka paham bagaimana menjaga kualitas dan membuat kemasan produk yang lebih menarik. Hasilnya, omzet penjualan produk olahan ikan mereka menjadi berlipat ganda. Kini, omzet Rohina dan kelompoknya berada di kisaran Rp2,5 juta hingga Rp3 juta. Otomatis, keuntungan yang diperoleh mereka pun bertambah.

Rohina, dalam wawancara pada Kamis (17/10/2024), mengatakan, kelompoknya saat ini beranggotakan 11 orang. Namun, sebenarnya baru sebagian saja yang aktif memproduksi olahan ikan hasil tangkapan nelayan. Jika anggota lainnya sudah aktif, produksi kelompoknya akan meningkat dan omzet penjualan akan terkerek naik. Apalagi, soal pemasaran mulai teratasi karena koperasi ikut membantu pemasaran produk-produk buatan mereka. Produk olahan ikan yang dihasilkan kaum ibu itu antara lain dipasarkan di waserda maupun kios kuliner milik Koperasi Kalaju.

Setelah melihat langit cerah melingkupi usaha mereka, Rohina bertekad untuk mengajak ibu-ibu lain di kampungnya untuk terlibat dalam usaha produksi olahan ikan. Dengan demikian, ibu-ibu di Pulau Pasaran akan lebih berdaya dan mandiri.



MERRY DAN WELHELMINA, MENGGAPAI KESEJAHTERAAN LEWAT KOPERASI

Namanya Agustina MF Luasana, tetapi ia biasa disapa Ibu Merry. Warga kampung nelayan Oesapa, Kota Kupang ini adalah potret kaum ibu yang memiliki peran ganda, yaitu mengurus keluarga dan bekerja mencari penghasilan tambahan untuk keluarga.

Merry yang suaminya bekerja sebagai pekerja tambang di Maluku, mulai memproduksi ikan cakalang asap pada 2007. Dia makin bersemangat setelah mendapat pelatihan pengolahan ikan dan pemasarannya pada 2015. Dulu, setiap hari Merry memproduksi belasan kilogram ikan asap cakalang dan belang kuning. Dia ingat betul, tempat pengasapan ikan yang dipakai ukurannya besar. Jadi sekali mengasap bisa belasan kilogram. “Pokoknya saya semangat betul karena hasilnya juga sangat laku,” cerita Merry.

Situasi berubah ketika badai Seroja datang pada tahun 2021. Badai menghancurkan rumah produksi pengasapan ikan hingga rata dengan tanah. Setelah itu, Merry terpaksa memulai lagi dari nol, memproduksi ikan asap dengan peralatan sederhana di rumah. Peralatan itu berupa drum yang ia pinjam dari salah satu universitas di Kota Kupang. Untungnya, ia tidak perlu membayar biaya sewa. Hanya saja, peralatan pinjaman dari universitas itu harus dikembalikan begitu pihak universitas akan memproduksi ikan asap sendiri. Kondisi itu membuat Merry tidak bisa memproduksi ikan asap setiap saat.

Produksi ikan asap yang dilakukan Merry bergantung pada pesanan konsumen. “Jika ada pesanan cukup banyak, saya kerja. Tetapi kalau pesanan cuma sekilo-dua kilo, saya angkat tangan,” ujar Merry dalam wawancara pada Kamis (24/10/2024).

Ia menceritakan, proses produksi ikan asap membutuhkan waktu yang lama, minimal empat jam. Itu sebabnya jika pesanan sedikit, ia akan tolak. Hampir pasti ia akan rugi waktu dan rugi modal. Tetapi kalau pesannya berkisar 5–10 kilogram ikan, dia akan terima.

Usaha yang bergantung peralatan pinjaman dan pesanan konsumen ini memang tidak bisa berjalan lancar. Pernah Merry mencoba membuat ikan asap tanpa ada pesanan. Tetapi upaya itu gagal. Pembelinya tidak ada dan dia tidak bisa menyimpan ikan asap terlalu lama lantaran tidak ada *freezer*. Padahal, jika *freezer* tersedia, dia bisa menyimpan ikannya sampai satu bulan.

Ketika mendengar warga kampung nelayan Oesapa mendirikan Koperasi BLS, Merry langsung tertarik. Ia mendaftar jadi anggota koperasi itu pada Januari 2024. “Siapa tahu ada peluang usaha yang bisa saya kerjakan nanti. Setidaknya saya bisa kerja sama dengan koperasi untuk memasarkan produk ikan asap saya,” tambahnya.

Dia berharap, setelah menjadi anggota koperasi, ia dan ibu-ibu lainnya bisa mendapat perhatian juga pelatihan. “Pokoknya kita akan bekerja sekeras mungkin bersama koperasi dan bagaimana caranya bisa mendapatkan penghasilan dari situ,” katanya.

Harapan Merry dan ibu-ibu lainnya mulai terwujud. Saat ini, Merry bisa memasarkan sebagian produksi ikan cakalang atau tuna asap buaatannya melalui waserda dan kios kuliner milik Koperasi BLS. Sehari bisa membuat dua ekor ikan tuna asap yang masing-masing beratnya 2 kilogram. Selain itu, ia membuat ikan asap lainnya sekitar 10 kilogram. Jika harga ikan segar sedang murah, keuntungannya bisa mencapai Rp500.000–Rp600.000. Sebagian keuntungan menjadi jatah koperasi.

Merry merasa beruntung bisa bergabung dengan Koperasi BLS. Ia ingin terus menjadi bagian dari perkembangan koperasi ini. Karena itu, ia siap bersama-sama mencari solusi untuk mengembangkan koperasi ini.



“Saya berprinsip, kita jangan melihat saat ini, tapi lihat ke depannya. Saya yakin koperasi ini akan berkembang. Mungkin suatu saat kita nggak punya apa-apa, kita bisa pergunakan yang ada di koperasi. Itu salah satunya manfaat dari koperasi,” tutur Merry.

Agustina MF Luasana berdiri di dekat drum tempat ikan asap diproduksi. Drum tersebut berfungsi sebagai alat pengasap ikan.

Seperti Ibu Merry, Ibu Welhelmina juga bekerja keras demi membantu penghasilan keluarga. Ia berjualan kue sejak delapan tahun yang lalu. Sebelum matahari terbit, sekitar pukul 04.00, Welhelmina sudah bangun dan membuat kue hingga pukul 08.00. Setelah itu, dia melanjutkan aktivitasnya dengan berjualan kue di kios kecil miliknya.

Sehari, Welhelmina bisa menjual 700 potong kue yang ia jual Rp1.000 per potong. Jadi, omzetnya sekitar Rp700.000 per hari. Dari berjualan kue itu, sebulan ia bisa mendapat penghasilan sekitar Rp4 juta. Dengan penghasilan itulah, Welhelmina bisa menutup sebagian pengeluaran keluarga.

“Suami saya yang kerjanya nelayan tidak setiap hari bawa uang. Kadang dapat (uang), kadang tidak. Kasian kalau selalu berharap dari suami. Jadi, saya sendiri harus mandiri,” tuturnya dalam wawancara pada Kamis (24/10/2024).

Ibu-ibu yang lain di kampung nelayan Oesapa, lanjut Welhelmina, juga melakukan hal yang sama, bekerja keras agar tidak selalu bergantung pada penghasilan suami. “Kita harus kreatif, Pak. Berpikirnya harus cepat tangkap pekerjaan apa saja yang bisa kita kerjakan,” katanya.

Setelah ada Koperasi BLS dan Welhelmina menjadi anggotanya, kesibukan perempuan ibu rumah tangga itu bertambah. Setelah berjualan, ia dan sejumlah ibu membuat es batu dan menjualnya di kios koperasi. Ia juga memastikan pasokan es yang akan digunakan nelayan untuk menjaga kualitas ikan hasil tangkapan, selalu tersedia di kios itu. “Saya ada (bersama) lima ibu-ibu yang bagian isi es itu selalu pergi perhatikan (ketersediaan) esnya, supaya nelayan yang biasa pakai es itu sonde (tidak) cari ke tempat lain,” ujarnya.

Selain es, ibu-ibu anggota Koperasi Bintang Laut Sejahtera, juga menjual produk-produk olahan ikan titipan anggota lainnya. Produk tersebut antara lain ikan kering. Menurutnya, ada saja orang yang datang mencari ikan kering di kios koperasi.

Kehadiran koperasi, menurut Welhelmina, membuka peluang baru bagi ibu-ibu yang ingin mencari tambahan penghasilan. Meski dengan begitu, mereka harus membagi waktu antara mengurus anak, suami, berjualan, hingga aktif di koperasi.

Ketua Koperasi Bintang Laut Sejahtera, Joakhim, mengakui, peran kaum ibu sangat penting dalam menggerakkan roda usaha koperasi, terutama dalam mengolah produk turunan ikan hasil tangkapan. “Kalau tidak ada ibu-ibu, siapa yang bisa mengerjakannya. Bapak-bapak kan lebih banyak melaut,” katanya.

MISNATUN, MEMBUKA PELUANG BARU DI DUSUN PANCER

Masalah klasik yang mengkhawatirkan selalu berulang. Setiap tahun pada masa paceklik, nelayan kebingungan mencari sumber pendapatan baru. Hasil tangkapan ikan sulit diharapkan, hanya jenis tertentu dengan jumlah yang terbatas yang bisa didapat saat paceklik. Setelah terbentur masalah ini berkali-kali, nelayan Koperasi Mina Berkah Lestari, Dusun Pancer, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur mencoba peluang baru.

“Di sini kalau musim ikan, harga jualnya murah sekali, Rp3.000 sampai Rp5.000 per kilogram. Seperti ngga ada harganya. Tetapi jika paceklik, ikan sulit dicari,” kata Misnatun (40) ibu tiga anak ini menceritakan persoalan yang dihadapi keluarga nelayan di Banyuwangi.

Ibu-ibu di Dusun Pancer berusaha mencari alternatif solusi. Setelah berembuk dengan pengurus koperasi dan pendamping, Misnatun dan tiga ibu-ibu lain membuat usaha sambal dengan bahan baku utama cumi. Mengapa cumi? Tangkapan cumi tidak mengenal musim paceklik atau tidak. Nelayan selalu bisa mendapatkannya di perairan sekitar Banyuwangi. Kualitasnya pun bagus. Sambal olahan juga dibuat dari bahan ikan tuna.



Ibu-ibu mencari racikan terbaik bumbu sambal olahan itu. Semua dipelajari dari pengalaman memasak dan diskusi antarmereka. Akhirnya mereka menemukan formulanya, dan menghasilkan empat varian sambal cumi, yaitu sambal *baby* cumi, sambal cumi ijo, sambal cumi bawang, dan sambal cumi jawa. Selain itu, ibu-ibu nelayan juga membuat produk olahan berupa sambal ikan tuna, ikan asin, abon, dan peyek ikan.

“Kami belajar membuat racikannya sendiri. Semua otodidak, belajar sendiri dengan ibu-ibu,” kata Misnatun mengisahkan, Minggu (3/11/2024) dari rumahnya di Banyuwangi.

Dengan tekad bulat, ibu-ibu mulai memasarkan ke konsumen lokal. Sambal dari olahan cumi itu juga dipasarkan ke jaringan tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Produk sambal dijual dalam kemasan botol ukuran 150 gram. Adapun harga jualnya Rp23.000 per botol untuk ikan tuna dan Rp20.000 per botol untuk cumi.

Nelayan koperasi ingin produk itu dapat dikembangkan ke pasar yang lebih luas dalam jumlah produk yang lebih besar. Adanya usaha penjualan sambal dari olahan ikan ini menambah nilai ekonomi keluarga nelayan. “Hasilnya lumayan. Kami dapat keuntungan meski belum banyak. Ini lebih baik daripada diam di rumah menunggu bapak,” kata Misnatun. Sementara ini, produk olahan ikan yang dibuat ibu-ibu di Pancer masih alami, tidak menggunakan bahan pengawet. Dia ingin mendalami, apakah memungkinkan dengan kadar bahan pengawet yang aman, dapat dipakai agar produk sambal Dusun Pancer lebih tahan lama.

Pendamping nelayan setempat, Khotijah menilai, potensi penjualan produk sambal itu dianggap bagus. Selain bahannya tersedia cukup, ada potensi pasar di lokal Banyuwangi sendiri. Perluasan pasar produk olahan ikan ini dapat berjalan beriringan dengan berkembangnya sektor wisata di Banyuwangi. Ibu-ibu ingin mengembangkan kemampuan meracik sambal terbaik dari olahan ikan. Maka mereka perlu pelatihan dari ahlinya yang berpengalaman di bidang ini.

Untuk menjangkau pasar lebih luas, produk olahan ikan perlu dikemas lebih baik. Begitu pun dengan perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tidak hanya itu, produk ini juga perlu mendapatkan label halal agar makin diterima pasar. Pengurusan izin-izin itu saat ini sedang dibantu oleh pendamping Khotijah.

“Kami sedang merapikan dokumen-dokumen koperasi. Sejauh ini seadanya saja. Dokumen yang harus ada seperti izin edar produk, kartu tanda anggota, brosur produk, dan semua informasi tentang koperasi,” kata Khotijah.

Misnatun dan ibu-ibu di Pancer ingin keluar dari masalah ekonomi nelayan. Karena itu usaha membuat produk olahan ikan diharapkan menjadi penolong nelayan saat paceklik.

MAMA IDA, MENGUBAH KEBIASAANNYA MENJUAL IKAN KE PASAR FANDOI

Hal yang paling sulit dilakukan adalah mengubah kebiasaan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Butuh keinginan kuat untuk mengubahnya. Tekad ini pun juga perlu dukungan lingkungan sekitar. Namun untuk memulainya, kadang harus menjadi bagian yang sedikit dari sekian banyak nelayan di Biak Numfor, Papua.

Panggilannya Mama Ida, nama lengkapnya Ida Senandi (42), istri nelayan di Koperasi Samber-Binyeri Maju di Desa Binyeri, Distrik Yendidori, Biak Numfor. Bertahun-tahun setiap suaminya mendapatkan hasil tangkapan, selalu repot. Ia harus menjual ke Pasar Fandoi yang harus ditempuh 45 menit dari kampungnya. Menjual ikan ke pasar itu pun mengeluarkan ongkos transportasi dan biaya tambahan lain.



“Sejak berdirinya koperasi nelayan di sini, kami tidak menjual ikan ke Pasar Fandoi (di pusat Kota Biak Numfor). Kami cukup menjual ikan di koperasi. Kami tidak perlu lagi berdiri lama-lama di pasar. Sejak ada koperasi di sini, kami dapat berjualan di sini, di koperasi. Dan sekarang saya sudah bekerja di koperasi,” kata Mama Ida, Kamis (17/11/2024).

Ida mulai mengubah kebiasaannya ke pasar sejak Desa Sumber-Binyeri memiliki koperasi nelayan. Hasil tangkapan ikan nelayan langsung dapat dibeli di koperasi yang bermitra dengan perusahaan perikanan PT Perikanan Nusantara Jaya (PNJ). Dengan kemitraan ini, pemasaran hasil tangkapan ikan nelayan lebih efisien, memangkas ongkos ke pasar, hemat waktu, dan tenaga. Nelayan dan keluarga dapat mengerjakan hal lain yang lebih produktif.

Kantor koperasi berada di pesisir pantai Kalamo Sumber-Binyeri. Perahu nelayan ukuran 3 GT yang mendarat bisa langsung memindahkan hasil tangkapannya. Sesaat kemudian transaksi penjualan dapat dilakukan. Adapun ikan yang telah dibeli PT PNJ disimpan di ruang beku yang berada di samping kantor koperasi. Per Selasa (6/11/2024), kapasitas tampung ruang beku itu sudah lebih dari 12 ton.

Setelah mengubah kebiasaannya Mama Ida mulai merasakan dampak positif. Waktunya tidak banyak tersita untuk menjual ikan ke Pasar Fandoi. Ibu lima anak ini bahkan dipekerjakan untuk mengurus keuangan koperasi. “Waktu untuk keluarga makin banyak. Penghasilan keluarga lebih baik dari sebelumnya,” kata Ida.

Rumah Mama Ida sekitar 100 meter dari kantor koperasi. Jika ada transaksi keuangan yang melibatkan nelayan, ia bergegas ke kantor koperasi untuk mengurusnya. Pengurus koperasi memercayakan urusan semua transaksi pengeluaran koperasi kepadanya.

Meski jam kerjanya mulai dari pukul 08.00 hingga pukul 17.00, hal itu tidak terlalu kaku berlaku bagi Mama Ida. Jika transaksi keuangan sedang ramai pada malam hari, saat pendaratan ikan nelayan, ia bisa datang ke kantor koperasi. Ia melakukannya setiap hari dari hari Senin hingga Sabtu, kecuali hari Minggu. Pada hari itu saatnya ia beribadah dan berkumpul dengan keluarga.

Sejumlah perempuan juga terlibat dalam kerja-kerja di Koperasi Sember-Binyeri Maju. Seperti yang dilakukan Cristina Mampioer (20). Pengurus mempekerjakannya di bagian warung serbaada (Waserda) yang menyediakan alat-alat tangkap ikan dan keperluan sehari-hari warga. Layaknya sebuah toko, dia melayani warga yang membeli barang kebutuhan di sana dan mencatatnya.

Selasa (5/11/2024) Christina berada di Waserda Koperasi Sember-Binyeri Maju. Dia bersama seorang pemuda duduk di bagian dalam menghadap komputer dan barang dagangan koperasi. Di sana Christina digaji Rp1,5 juta per bulan untuk menjaga tempat itu. Christina yang lulusan SMA itu sebenarnya atlet lari. Karena pelatihnya pindah tugas ke daerah lain, saat ini dia belum intens latihan lari lagi. Sambil mengisi waktu untuk rencana ke depan, Christina bekerja di koperasi.

Sejak Kalamo Samber-Binyeri diresmikan pada 23 November 2023, infrastruktur kampung itu semakin maju. Kontribusi perempuan keluarga nelayan makin terbuka di sana. Salah satunya ada pada sentra kuliner yang berjarak sekitar 200 meter dari kantor koperasi. Sentra kuliner ini menempati bangunan permanen yang terlihat bersih, mirip balai pertemuan warga..

Untuk sementara, ibu-ibu setempat menjual makanan dan minuman ringan di sana. Sentra kuliner ini belum terpakai secara maksimal karena terbatasnya konsumen. Pendamping nelayan setempat Enggo Catur Srianto mengakui kenyataan ini. Perlu ada terobosan dan intervensi pemerintah setempat agar sentra kuliner ini hidup dan menambah nilai ekonomi warga, terutama kalangan perempuan di Samber-Binyeri.

“Nelayan di Samber-Binyeri ini sudah ikuti pelatihan pengolahan hasil tangkap ikan. Seperti abon tuna, ikan asap, juga pelatihan seperti menjahit. Warga di sini juga dilatih bagaimana cara mengelola uang. Ibu-ibu di sini harus dibekali kemampuan mengelola keuangan,” kata Enggo Catur.

Lokasi sentra kuliner itu yang dipakai untuk pelatihan mama-mama di Samber-Binyeri. Hasil pelatihan itu, kini mereka punya keterampilan membuat produk olahan ikan. Adapun tempat produksinya di rumah-rumah warga. Hasil produksi warga sebagian sudah dijual di mal di Kota Biak Numfor. “Ada potensi yang bisa dikembangkan ke depan,” kata Enggo.



PEREMPUAN WAKATOBI MENUNGGANGI OMBAK PERUBAHAN

Transformasi sedang terjadi di Koperasi Samata Padakkau, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pengurus melakukan perbaikan tata kelola organisasi dan penambahan unit usaha. Gelombang perubahan yang melibatkan pendamping ini menguatkan koperasi.

Tidak hanya itu, nelayan makin produktif, proses kerja semakin efisien. Sebab pengangkutan hasil tangkapan laut makin cepat dilakukan. Kebutuhan nelayan mendapatkan es balok juga dapat dipenuhi di koperasi. Begitu pun jika ada kapal yang rusak, nelayan dapat memperbaikinya di bengkel di sekitar pemukiman mereka.

Saat angin perubahan berembus, ibu-ibu tidak tinggal diam. Mereka mencari solusi agar ada nilai tambah untuk keluarga nelayan. Maka ibu-ibu merintis usaha pengolahan hasil tangkapan nelayan. Meski masih rintisan, usaha ini menjadi alternatif baru sumber pendapatan nelayan. Mereka tidak lagi mengandalkan hasil penjualan ikan saja. Sejak ada program korporasi nelayan berbasis koperasi, usaha nelayan mulai berkembang.

Adalah Royani (45), ibu empat anak yang menjadi salah satu pelopor usaha rintisan tersebut. Bersama ibu-ibu lain, ia memulai usaha membuat abon, stik ikan, dan stik rumput laut. Produk itu dijual pada tamu yang datang ke kampungnya. Sebagian ia titipkan ke warung di sekitar Wakatobi. Ia berharap dapat menangkap pasar dari wisatawan yang berkunjung ke sana dengan menawarkan produk olahan ikan. "Tempat kami tidak terlalu jauh dari lokasi wisata, sekitar 15 menit sampai," kata Royani.

Untuk sementara produk itu dijual dalam kemasan yang sederhana. Ibu-ibu istri nelayan Koperasi Nelayan Samata Padakkau ingin menjangkau pasar yang lebih luas. "Kemasan produk kami masih biasa, masih perlu perbaikan. Meski begitu, hasilnya sudah lumayan," kata Royani.

Menurut Royani, produk olahan ikan ini berpotensi besar untuk dikembangkan. Bahan baku ikan mudah diperoleh nelayan Wakatobi. Sedangkan pasarnya masih belum banyak digali. Dengan kemasan sederhana saja, produk olahan ikan warga sudah diminati pasar. “Apalagi jika kemasannya makin bagus. Bisa jadi semakin laku dibeli orang,” katanya.

Sebelum memulai usaha pembuatan produk olahan ikan, ibu-ibu istri nelayan lebih banyak mengurus rumah tangga. Tidak banyak aktivitas produktif yang dilakukan menunjang ekonomi keluarga. Sedangkan suami mereka, menjadi ujung tombak sumber pendapatan. “Suami saya pergi melaut mulai jam 01.00, pulanginya sekitar jam 15.00. Dalam seminggu, hanya di hari Jumat yang libur melaut. Tergantung cuaca atau acara di rumah,” kata Royani.

Alternatif pendapatan baru sangat dibutuhkan nelayan, terutama saat ikan sulit dicari atau cuaca tidak bersahabat. “Makanya adanya produk olahan itu bisa sangat membantu. Karena saya sudah merasakan hasilnya,” kata Royani.

Dari hasil laut, keluarga Royani sudah dapat membiayai anaknya lulus kuliah, satu lagi masih kuliah, ada yang menjadi atlet dayung, dan satu lagi masih sekolah. Royani yakin, hasil tangkapan di laut dapat diandalkan warga jika dikelola dengan baik. Hasil tangkapan masih belum seberapa dari potensi perikanan di sekitar Wakatobi. Makanya warga harus dapat memproduksi hasil olahan ikan.

Belum semua warga mau menangkap angin perubahan di Wakatobi. Sebagian perempuan istri nelayan masih dengan pola lama, mengandalkan hasil penjualan ikan. Namun perempuan nelayan yang menyadari adanya potensi produk perikanan semakin banyak.

Pendamping nelayan di Koperasi Samata Padakkau Syahwan Ode, mengatakan, kini 80 persen istri nelayan mendukung ekonomi keluarga. Sama halnya dengan Royani, ibu-ibu lain juga membuat produk dari hasil tangkapan di laut. “Mereka memanfaatkan ikan yang tidak laku dijual segar. Ibu-ibu mengubahnya dalam bentuk produk ikan kering, produk olahan ini bisa tahan lama,” kata Syahwan Ode.



PENDAMPING MASYARAKAT, UJUNG TOMBAK PROGRAM KORPORASI

Perjalanan program korporasi nelayan berbasis koperasi tak lepas dari peran Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Mereka menjadi pemandu warga tempat program dilaksanakan. Boleh di kata, mereka adalah kepanjangan tangan program korporasi ini di level paling ujung. Merekalah yang sering berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Keberadaan mereka adalah hasil kolaborasi antara Kemenkop UKM dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemenkop UKM menyiapkan SDM yang memiliki kapasitas yang dibutuhkan, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merekrut dan menjadikan mereka Tenaga Pendamping Masyarakat.

Adapun ruang lingkup tugas pendamping, di antaranya mengidentifikasi calon lembaga korporasi nelayan. Tugas ini dilakukan dengan cara membuat analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*), membuat penilaian awal, hingga menyusun strategi.

Tugas berikutnya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan, kapasitas bisnis, hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tugas terakhir ini dilakukan dengan mengenalkan cara pengelolaan keuangan, pelaporan, mengikuti pendidikan dan pelatihan, hingga mengikutkan pengurus koperasi pada program Magang Koperasi Nelayan yang diselenggarakan oleh Kemenkop UKM.

Pada prinsipnya, pendampingan ke korporasi nelayan terfokus pada tiga hal; penyusunan rencana kerja, masa pendampingan aktif, dan penguatan usaha. Tugas ini terlihat jelas di atas kertas. Namun, pada pelaksanaannya memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Selain energi dan biaya, keselamatan tim pendamping kerap menjadi pertaruhan.

Mengapa risiko kerja itu bisa dialami pendamping? Sebab, tidak semua orang mau menerima perubahan. Perubahan kultur yang dianggap benar, sangat sulit dilakukan. Butuh pendekatan yang pas, informasi yang jelas, dan argumentasi yang tepat. Kisah mereka terekam dalam cerita berikut ini.

ENGGO CATUR SRIANTO, MENGUBAH KEBIASAAN NELAYAN SAMBER-BINYERI

“Di program ini, kami mendapatkan tugas membangun dan mengembangkan korporasi nelayan dari nol. Dari mulai menyiapkan tata kelola perkoperasian, menganalisis setiap unit bisnis koperasi, sampai memastikan semua bantuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir,” ucap Enggo.



Layaknya film seri *“Mission Impossible”* yang dibuat sejak 1996, Enggo Catur Srianto mengemban misi mustahil. Misi yang sepertinya tidak mungkin terwujud karena berat dan sulit. Namun di mata Enggo, berat bukan berarti tidak mungkin terwujud. Kesabaran dan kegigihan yang akan menjawab hasilnya.

Sebagian orang bilang, “Wah berat ini, berat, susah, Mas.” Kata-kata itu keluar dari koleganya setelah Enggo memaparkan peta persoalan di lokasi pendampingan Desa Sumber-Binyeri, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, Papua.

Tugas Enggo di Biak Numfor dimulai pada Juli 2024 dengan kontrak kerja berakhir Desember 2024. Pendampingan di Biak Numfor ini merupakan tugas kedua setelah sebelumnya bertugas di Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam program Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi pada 9 Oktober 2023-19 Desember 2023.

Sarjana Universitas Pembangunan “Veteran” Yogyakarta ini datang ke Biak Numfor pertama kali pada April 2024. Bersama tiga rekan sesama pendamping, ia ditugaskan membantu pelaksanaan rapat anggota tahunan Koperasi Sember-Binyeri Maju yang baru berdiri. Pendirian koperasi di sana untuk menjaga aset yang dibangun dalam program kampung nelayan modern (Kalamo).

Sejak 27 Juli 2024, tugasnya berlanjut pendamping selama enam bulan berikutnya. KKP menugaskan dia untuk memastikan koperasi di sana mandiri dengan unit usahanya. Setelah satu tahun berdiri, koperasi belum benar-benar mandiri. Sehingga, perlu ada peningkatan partisipasi anggota hingga perbaikan tata kelola organisasi.

“Masyarakat pesisir belum terbiasa bekerja secara berorganisasi. Sumber daya manusia nelayan di sini masih lemah,” katanya. Dengan situasi itu, transfer pengetahuan belum bisa secepat yang diharapkan.

Selama masa pendampingan di Biak Numfor, Enggo beberapa kali menghadapi konflik. Itu terjadi karena proses perubahan tidak serta-merta berjalan mulus. Ada saja, pihak yang belum menerima untuk bertindak secara prosedural. Contohnya, ketika nelayan yang menggunakan perahu koperasi diwajibkan menjual ikan tangkapan ke koperasi. Ketentuan ini tidak mudah diterapkan. “Saat kapal ditarik, ada yang marah. Situasinya seperti itu jika kami terapkan aturan tegas,” katanya.

Melihat kendala-kendala yang terjadi, ia mengusulkan agar ada pendampingan berikutnya setelah masa kerjanya berakhir. Sebab,

mengubah kebiasaan manusia itu membutuhkan waktu dan konsistensi sampai semua warga menyadari tugasnya masing-masing. “Sehingga cita-cita menjadikan nelayan sejahtera, mampu menjalankan bisnis hulu sampai ke hilir dapat tercapai,” kata Enggo.

Meski berat, Enggo terlihat tetap tak kehilangan energi, seperti yang terlihat pada awal November 2024. Ia aktif mengumpulkan pengurus koperasi untuk menjelaskan tugasnya masing-masing. Ia ingin bantuan yang diberikan pemerintah di Kampung Nelayan Modern Sumber-Binyeri tidak sia-sia.

Enggo tak pernah menyesali keputusannya bergabung dengan tim pendamping. Baginya, terlibat dalam Program Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi ini memberikan tantangan dan pengalaman berharga. Ia jadi tahu, betapa pentingnya fungsi koperasi bagi nelayan. Lewat koperasi, nelayan dapat memanfaatkan bantuan pemerintah secara berkelanjutan. Asetnya bisa bertambah besar, ekonomi anggota koperasi dapat meningkat.



ADI SUMARNA, SULITNYA MERAIH KEPERCAYAAN



Berdasarkan pengalamannya selama mendampingi korporasi nelayan berbasis koperasi di Pulau Pasaran, Adi mengatakan pendampingan untuk masyarakat memang sangat penting. “Program pemerintah yang memberikan pancing, bukan sekadar ikan akan berjalan lebih baik. Sebab, masyarakat yang menjadi sasaran didorong untuk berusaha mengembangkan bantuan.”

Adi Sumarna memiliki pengalaman panjang dalam melatih dan mendampingi masyarakat dalam program-program kewirausahaan, bisnis, maupun koperasi. Namun, menjadi pendamping masyarakat dalam program Koperasi Nelayan merupakan hal baru bagi laki-laki yang berprofesi sebagai *professional trainer* dan *business coach* ini. “Basis saya kan bukan nelayan,” katanya.

Setelah mengikuti bimbingan dan pelatihan yang digelar KKP dan Kemenkop UKM pada Agustus 2023, barulah Adi mendapat gambaran apa itu korporasi nelayan berbasis koperasi. Kepercayaan dirinya sudah berkembang ketika ia tiba di Pulau Pasaran, Lampung yang menjadi lokasi penugasannya pada September 2023. Begitu datang ke Pulau Pasaran, tantangan langsung terbentang di hadapannya. Waktu itu, sarana dan prasarana korporasi nelayan di pulau itu masih dalam proses pembangunan. Koperasi yang menjadi kendaraan korporasi nelayan juga baru didirikan Agustus 2023 dan belum ada kegiatannya. Jajaran

pengurusnya belum lengkap bahkan kantor koperasi belum siap karena belum ada meja, kursi, serta peralatan kerja seperti komputer.

Saat itu, yang bisa ia kerjakan baru menemui Ketua Koperasi Nelayan Kalaju Pulau Pasaran, Said Bin Radi dan pengurus lainnya. Dari diskusi itu, ia mengetahui bahwa sebelum ada koperasi tersebut sudah ada lima koperasi lainnya. Namun, semua koperasi itu mati karena tidak dijalankan secara profesional. Kegagalan kelima koperasi itu membuat tingkat kepercayaan masyarakat Pulau Pasaran terhadap koperasi relatif rendah.

Kenyataan itu terkonfirmasi ketika Adi bertemu dengan komunitas nelayan, komunitas UKM, hingga komunitas ibu-ibu pengajian untuk menyosialisasikan koperasi. Mereka tidak percaya koperasi yang baru berdiri di Pulau Pasaran bisa berkembang. Untuk menjawab hal itu, Adi hampir setiap hari berdialog dengan komunitas-komunitas itu. "Saya bisa pulang sampai larut malam untuk mengajak orang ikut koperasi. Tapi orang berpikir saya sedang mengkhayal soal koperasi baru ini," ujar sarjana ekonomi dari Universitas Ibn Khaldun Bogor itu.

Pada satu titik, Adi berkesimpulan bahwa koperasi tidak akan berjalan jika hanya mengandalkan generasi tua. Maka atas bantuan Said bin Radi dan Toto Heryanto (Manajer Koperasi), Adi menemukan empat anak muda yang bersedia menjalankan koperasi, yakni Nasrul Agung Prayogi, Kumaeni (Mae), Rosini (Ocha), dan Dewi. Yogi bertugas untuk digitalisasi kerja koperasi, Mae mengelola waserda milik koperasi, Ocha mengelola keuangan, dan Dewi mengelola kesekretariatan. Waserda menjadi satu dari tujuh unit usaha koperasi yang sudah siap dijalankan ketika itu. Modal untuk unit usaha itu diambil dari simpanan pokok sekitar Rp8,7 juta. Uang itulah yang diputar sebagai modal awal bisnis waserda.

Ketika awal-awal waserda dijalankan, Mae sebagai pengelola waserda dan Ocha sebagai kasir belum mengerti bagaimana mengoperasikan komputer atau laptop untuk mendata pembelian dan penjualan serta keluar masuk barang. Adi mengajari mereka dari nol sistem Excel dan

aplikasi pencatatan keuangan. Selain itu, Adi mengajarkan pembukuan koperasi hingga penggunaan nota.

Meski susah payah di awal, transfer pengetahuan dan keterampilan itu berjalan lancar sehingga unit bisnis waserda bisa beroperasi dengan baik. Pada bulan November, uang modal awal dari simpanan pokok sekitar 37 anggota awal ditambah 10 anggota baru itu, bisa diputar hingga 10 kali lipat. Pemasukan dan pengeluaran waserda juga tercatat dengan baik. Koperasi pun sudah bisa mencetak laba. Dari situ, kepercayaan dari masyarakat terhadap koperasi mulai tumbuh. Maka, untuk mengajak warga bergabung dengan koperasi jadi lebih mudah.

Tahap berikutnya, Adi yang biasa dipanggil "*Coach Adi*" mendampingi pengurus agar terus menaikkan jumlah anggota. Usaha itu tidak sia-sia. Sampai bulan Desember atau lima bulan setelah koperasi berdiri, jumlah anggota koperasi yang awalnya 37 orang, bertambah menjadi 140 orang. Adi pun terus mencarikan pelatihan-pelatihan terutama untuk ibu-ibu agar bisa memproduksi produk kuliner unggulan yang akan dijual melalui waserda dan sentra kuliner ikan.

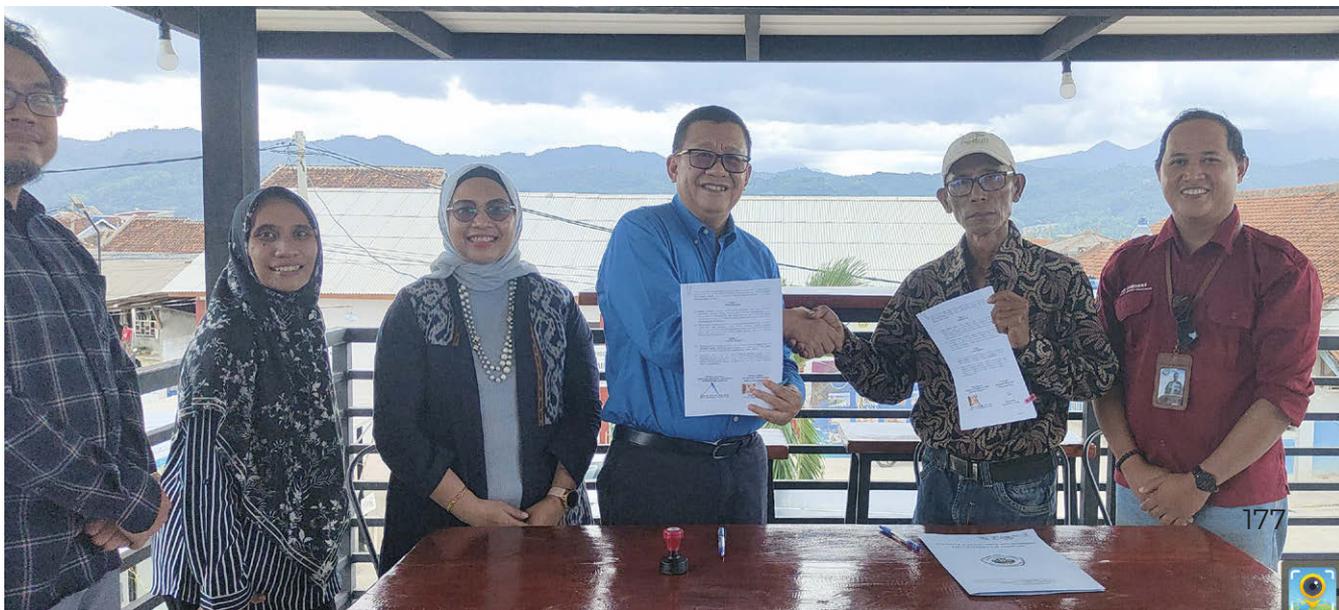
Kontrak Adi selesai pada Desember 2023. Tetapi warga meminta KKP agar memperpanjang program pendampingan yang dilakukan oleh Adi. Permintaan itu diluluskan oleh KKP. Adi pun melanjutkan program pendampingan bagi korporasi nelayan di Pulau Pasaran hingga April 2024. Jika awalnya, ia menumbuhkan korporasi nelayan berbasis koperasi, kini pada masa kontrak kedua dia berupaya mengembangkan unit-unit usaha yang ada, memperkuat kepercayaan masyarakat pada koperasi, dan meningkatkan sumber daya manusia.

Ia memulai dengan program digitalisasi sistem pencatatan dan keuangan koperasi serta unit-unit usahanya. Dia juga memperkuat prosedur operasi standar koperasi. Dengan demikian tidak ada celah untuk berbuat curang.

Selain itu, ia mendorong koperasi memperkuat kolaborasi dengan ibu-ibu dan pihak lain untuk memperkuat unit bisnis Sentra Kuliner Ikan milik koperasi. Dari kolaborasi itu, muncul menu nasi goreng ikan teri yang menarik banyak pelanggan datang ke Pulau Pasaran. Omset Sentra Kuliner Ikan terus meningkat hingga mencapai Rp60 juta per bulan pada saat itu. Tidak hanya itu, Sentra Kuliner Ikan di Pulau Pasaran juga jadi terkenal karena sering muncul di Tiktok.

Pada Maret 2024, koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan yang antara lain melaporkan kinerja unit-unit usaha koperasi. Saat itu, koperasi mencatat laba dan membagikan Sisa Hasil Usaha berkisar Rp20.000–Rp 30.000 kepada 80 anggota. Dari situ, masyarakat Pulau Pasaran melihat bahwa usaha koperasi bisa memberi keuntungan, dan uang yang mereka setorkan sebagai simpanan pokok dan sukarela tidak hilang.

Akhir April 2024, kontrak pendampingan untuk Adi selesai. Saat itu koperasi dan unit-unit bisnisnya sudah bisa berjalan. Hanya rumah pengeringan ikan yang belum optimal karena belum memiliki cukup mitra. Pengurus koperasi juga sudah tahu bagaimana cara berbisnis, membiayai operasional koperasi seperti membayar listrik dan gaji karyawan. “Ketika saya tinggalkan, saya sudah tidak cemas. Usahanya sudah berjalan,” kata Adi.



MOCHAMMAD FAHMI, MENGENALKAN INOVASI PADA NELAYAN BANYUWANGI

“Saya datang pada musim paceklik ikan. Sebelum bantuan pemerintah datang, saya ajak bicara pengurus dan anggota. Saya menggali bagaimana rencana yang mereka siapkan. Kami berkolaborasi menuju arah yang lebih baik,” kata Fahmi.



Mochammad Fahmi (30) memegang prinsip sebaik-baik manusia adalah mereka yang berguna untuk orang lain. Pandangan itu memengaruhi keputusannya hingga tergerak menjadi pendamping masyarakat nelayan. Ada tantangan dan nilai tambah yang mendorongnya menjalani pekerjaan tersebut.

Fahmi merupakan salah satu pendamping gelombang pertama dalam program korporasi nelayan berbasis koperasi. Per Juli hingga Oktober 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menugaskannya mendampingi nelayan di Koperasi Mina Berkah Lestari, Dusun Pancer, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Saat pertama kali datang di tempat tugas, Lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Malang ini melihat Koperasi Mina Berkah Lestari baru saja berdiri. Banyak hal yang perlu dibenahi, di antaranya belum adanya

legalitas, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, dan pengelolaan aset yang baik. Keanggotaan masih cenderung formalitas, sebatas untuk memenuhi syarat sebagai penerima bantuan pemerintah.

Kecenderungan seperti ini sebenarnya terjadi di banyak tempat. Karena itu, Fahmi ditugaskan untuk memastikan bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan nelayan. Kedatangannya di Dusun Pancer untuk menjadikan koperasi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan nelayan. Saat Fahmi datang, nelayan Dusun Pancer sedang mengalami paceklik, sepi ikan.

Ia melihat, potensi perikanan tangkap di perairan Banyuwangi dan sekitarnya cukup tinggi. Kemampuan nelayan menangkap ikan sudah bagus. Ada potensi pendapatan nelayan dapat ditingkatkan jika kapasitas mereka juga meningkat. Mereka perlu belajar untuk mengembangkan inovasi usaha, agar ketika musim paceklik pendapatan nelayan tetap ada. “Nelayan belum berpikir lain, selain bagaimana bisa melaut, inovasi masih minim ketika itu,” kata Fahmi.

Meski sebagian warga berwatak keras, Fahmi mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Elemen-elemen warga yang sebelumnya tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) berbeda-beda, Fahmi satukan, diajak bertemu, dan mencari solusi bersama. Ia ingin memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan menambah nilai ekonomi warga yang pada saat itu masih minim.

Pada awal masa tugas, tidak mudah mengurus legalitas koperasi, keanggotaan, sistem perekrutan, pengelolaan aset, hingga mengenalkan nelayan untuk menjalankan bisnis. “Di depan pengurus dan anggota, kami tekankan, koperasi tidak boleh menjadi lapangan usaha yang umum, seperti perusahaan. Kami berkewajiban mengajarkan bagaimana cara menjalankan koperasi,” katanya.

Dinamika di lapangan tentu ada. Karakter orang yang berbeda juga terlihat dari beragamnya cara merespons perubahan. Kala itu, adanya kolaborasi meringankan tugasnya terutama bantuan *mentoring* dari tim KKP dan Kemenkop UKM. Untungnya, sebagian nelayan punya kemauan tinggi untuk bergerak maju. Pada akhirnya, semua persoalan menjadi pembahasan bersama, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari.

Lelaki kelahiran Sidoarjo ini nyaris tidak menemui kendala kultural yang berarti di Banyuwangi. Pendamping, katanya, meski kuat pendiriannya ke arah yang lebih baik. Meski menemui banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda, dia melihat itu wajar. Fahmi telah menanamkan fondasi berkoperasi ke nelayan Pancer. Dia berharap, apa yang sudah dikerjakan dapat berkembang dan dilanjutkan.

ABRAHAM HORISANTO, MELEBURKAN DIRI KE TENGAH WARGA



“Dalam pendampingan, perlu kesabaran dan keuletan selama proses transfer pengetahuan,” ungkap Abraham.

Dua bulan setelah Koperasi Samber-Binyeri Maju terbentuk, Abraham Horisanto (34) memulai tugas pendampingan di sana. Per 11 Oktober 2023, Abraham mendampingi anggota koperasi yang merupakan warga Samber-Binyeri, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua Barat. Tugasnya akan berakhir pada Desember 2023 di desa yang mayoritas nelayan perikanan tangkap itu.

Koperasi yang seumur jagung itu masih berdiri apa adanya. Bersamaan dengan itu, di desa Samber-Binyeri tengah dibangun kampung nelayan modern (Kalamo). Koperasi diharapkan menjadi penggerak perekonomian nelayan, sekaligus pengelola aset Kalamo. Maka, koperasi harus kuat.

Namun, berdasarkan penilaian awal, Koperasi Samber-Binyeri Maju masuk dalam kategori kurang modern. Penilaian Horisanto itu didasar-

kan pada aspek bisnis, pasar, keuangan, dan digitalisasi. Kekurangan lain pada aspek kelembagaan juga dibutuhkan peningkatan, khususnya di sektor pendidikan dan pelatihan, informasi dan transparansi, serta fasilitas pendukung di koperasi.

Di tengah persoalan itu, Abraham berusaha berbaur dan bersosialisasi dengan warga setempat agar dapat diterima selama menjalankan tugas. Meski menantang, lelaki kelahiran Ujung Pandang tahun 1990 ini merasa tugas pendampingan adalah panggilan hatinya. Kebetulan, ia mendalami bidang perikanan, baik di strata 1 maupun strata 2 Universitas Hassanudin, Makassar.

“Di awal tugas, saya melakukan pendekatan, sosialisasi serta edukasi kepada pengurus, anggota koperasi, serta penduduk sekitar agar dapat diterima. Kondisi sosial dan karakteristik di lokasi pendampingan sangat berbeda dibandingkan tempat lain, sehingga perlu menyesuaikan diri agar dapat diterima dengan baik,” kata Abraham.

Selama bertugas, ia fokus menyiapkan sumber daya manusia koperasi sebelum Kalamo Samber-Binyeri diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis (23/11/2023). Tantangan terberat selama pendampingan adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat.

Abraham mencari jalan keluar dengan menjalin kolaborasi antarpihak. Dengan cara itu, ia dapat menemukan solusi terbaik dari persoalan yang dihadapinya. Dari tugas ini ia semakin memahami bahwa masyarakat pesisir di Desa Samber dan Binyeri memiliki potensi besar untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian lokal. “Namun untuk mencapai itu, diperlukan proses pendampingan ekstra agar dapat terwujud,” kata Abraham.

KHOTIJAH, Mencari Jalan Keluar Nelayan Pancer di Masa Paceklik



Penugasan ini memberikan kekayaan pengalaman hidup. “Dari tugas ini saya jadi tahu, perjuangan seorang nelayan luar biasa. Dari sore hingga subuh melaut, begitu seterusnya. Kadang juga harus menghadapi risiko kecelakaan di laut,” ungkap Khotijah.

Saat paceklik, nelayan Dusun Pancer, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pusing bukan main. Betapa tidak, hasil tangkapan sangat berkurang. Sementara nelayan belum memiliki sumber pendapatan yang dapat diandalkan selain melaut.

Semula, Khotijah (26) ditugaskan mendampingi nelayan yang tergabung dalam Koperasi Mina Berkah Lestari di Dusun Pancer. Tugasnya, menguatkan tata kelola organisasi koperasi agar lebih rapi dan modern. Tugas ini melanjutkan yang sudah dilakukan pendamping sebelumnya, yaitu Mochammad Fahmi.

Fahmi ditugaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan Khotijah mendapat tugas dari Kemenkop UKM. Tugas keduanya sama-sama ingin menjadikan nelayan sejahtera melalui koperasi. “Saya sendiri fokus pada tata kelola koperasi,” kata Khotijah.

Setelah melakukan tugas pokoknya, Khotijah melihat ada pekerjaan rumah di sana. Nelayan kebingungan jika musim paceklik tiba. Sebagian perempuan di sana mulai mengolah cumi untuk berbagai produk olahan. Dia melihat, kegiatan ini berpotensi untuk dikembangkan. "Ikan cumi itu tidak mengenal musim. Selalu ada meski paceklik," kata Khotijah.

Dia membantu mendampingi ibu-ibu yang mengolah cumi menjadi aneka produk sambal agar memiliki nilai jual. Ada empat varian: sambal *baby* cumi, sambal cumi ijo, sambal cumi bawang dan sambal cumi jawa. Selain itu, ibu-ibu juga membuat sambal ikan asin, abon, dan peyek dari olahan ikan. "Produk-produk ini jalan, laku. Untuk pengemasan, kami bantu buat stiker agar lebih baik," kata Khotijah.

Tidak hanya itu, Khotijah membantu mendapatkan izin edar dan label halal produk nelayan, sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Jika usaha ini dikembangkan serius, bukan tidak mungkin menjadi sumber pendapatan baru nelayan. Sejauh ini baru empat ibu-ibu yang aktif mengusahakan produk olahan ikan. Tugas itu dilakukan di samping tugas pokoknya menyiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi yang akan disahkan pada Rapat Anggota Tahunan yang akan dilaksanakan Maret 2025.

Meski perempuan lajang, Khotijah tak merasa itu menghalangi tugasnya. Khotijah asli Banyuwangi dan memahami bagaimana menghadapi warga di sana. Hanya saja, ia tumbuh dari keluarga petani. "Karakter petani dan nelayan hampir sama. Tantangannya karena saya perempuan, masih muda, dan bergaul dengan masyarakat nelayan," kata Khotijah.

Adapun perbedaan pendapat selama berinteraksi dengan nelayan dianggapnya wajar. Sebab, Koperasi Mina Berkah Lestari terdiri dari beberapa kelompok usaha bersama. Pengalamannya berorganisasi membuat Khotijah terbantu menghadapi situasi seperti itu. Justru selama mendampingi warga, ia menyadari betapa beratnya kehidupan nelayan.

SYAHWAN ODE, MENYADARKAN PEMAHAMAN TENTANG KOPERASI



“Tantangan terberatnya ada pada sumber daya manusia. Sebanyak 99 persen nelayan. Saya kesulitan mengajak mereka menjalankan tata kelola berkoperasi. Warga setempat memandang koperasi itu wadah simpan pinjam, tempat untuk meminjam uang, seperti layaknya rentenir,” kata Syahwan.

Kenyataan di tempat tugas sering kali berbeda dengan bayangan awal. Hal inilah yang dihadapi Syahwan Ode (34), lelaki kelahiran Ambon, Maluku saat bertugas sebagai Pendamping Koperasi Samata Padakkau, Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Ia bertugas melakukan pendampingan sejak Juli dan berakhir masa tugasnya pada November 2024. Selama periode pendampingan, lulusan pascasarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Halu Oleo, Kendari ini menghadapi warga yang belum memahami cara berkoperasi yang baik. Hanya sebagian kecil saja dari warga mengetahui seperti apa menjalankan koperasi.

Tidak hanya belum memahami tentang koperasi, Syahwan juga menghadapi kendala bahasa. Warga sehari-hari menggunakan Bahasa Bajo, bahasa yang belum dikuasainya. Karena itu, fokus pendampingan ditujukan ke pengurus lebih dahulu. Melalui pengurus, Syahwan memberi pengetahuan tentang tata kelola berkoperasi yang benar.

Setelah berinteraksi dengan warga, Syahwan memahami bahwa sebagian warga menganggap berorganisasi itu adalah untuk menerima bantuan. Pandangan seperti ini memengaruhi semangat mereka untuk aktif berorganisasi. Karena itu, penyuluhan ke anggota dan pengurus tidak cukup sekali dua kali saja. Namun harus dilakukan intens disertai contoh nyata hingga mereka mengerti bagaimana menjalankan koperasi.

MUHAMMAD ILHAM ANUGRAH BAYU, MENJALIN KEDEKATAN DENGAN WARGA WAKATOBI

“Jika nelayan melakukan konsolidasi lewat koperasi, mereka semakin produktif. Jika usaha ini terus dikerjakan konsisten, koperasi nelayan akan semakin berkembang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia,” ungkap Bayu.



Desember 2023, Muhammad Ilham Anugrah Bayu menyelesaikan tugas pendampingan di Koperasi Samata Padakkau, Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ia meninggalkan catatan dalam laporan akhirnya. Intinya, ada masalah yang harus diperhatikan pengurus koperasi ke depan.

Bayu menyarankan, koperasi harus mampu menciptakan soliditas pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota. Pesan ini rupanya menjadi tantangan terberatnya selama melakukan pendampingan di Wakatobi. “Tantangan terberat adalah menghimpun banyak orang, ini hal yang krusial. Banyak orang punya pandangan masing-masing,” kata Bayu mengisahkan tugasnya, Selasa (26/11/2024).

Bayu menyadari, untuk menyatukan pandangan yang berbeda-beda itu tidak mudah. Situasi ini kadang menimbulkan terjadinya konflik

antarwarga selama tugas pendampingan. Semua persoalan ini perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu pengembangan koperasi. Karena itu, begitu mendapat tugas dalam Program Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ia menemui tokoh-tokoh kunci di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

“Hal pertama yang dilakukan di sana adalah menemui tokoh-tokoh kunci dari berbagai latar belakang. Langkah ini untuk membangun kedekatan dengan masyarakat lokal di lokasi pendampingan,” kata lulusan S2 Administrasi Bisnis Institut Teknologi Bandung ini.

Bayu menemukan kedekatan setelah menemui tokoh-tokoh tersebut. Pendekatan itu penting untuk membangun kedekatan dengan warga, sehingga memudahkan selama menjalankan tugas. Setelah dekat dengan warga, Bayu dapat menganalisis dan memetakan persoalan di sana. Dari situ, ia menyiapkan strategi pendampingan yang tepat untuk anggota Koperasi Samata Padakkau.

Tugas Bayu di koperasi itu bukanlah tugas pertama kalinya sebagai pendamping. Namun dalam konteks program korporasi, tugas di sana merupakan tugas perdananya. Sebelum tahun 2023, dia beberapa kali melakukan pendampingan di usaha kecil menengah (UKM) maupun koperasi. Di Wakatobi, dia dua kali menjalankan tugas pendampingan, per Oktober–Desember 2023 dan Januari–April 2024.

Tidak hanya soliditas antarwarga yang perlu dikuatkan, ia menemukan sejumlah persoalan krusial yang juga tidak kalah penting di sana. Saat awal pendampingan, partisipasi anggota masih minim, pemahaman berkoperasi yang rendah, hingga kurangnya inovasi usaha. Persoalan ini memengaruhi produktivitas nelayan. Mereka belum dapat memaksimalkan pekerjaan secara efisien. Hal ini menjadi pekerjaan rumah berikutnya yang harus diselesaikan.

Meski bukan tugas ringan, ia mendapatkan pengalaman berharga selama masa pendampingan. Salah satu hal baru yang ia dapatkan adalah mengenal dari dekat bidang perikanan laut. Ia belum pernah mendampingi nelayan sebelumnya. “Ini sangat berbeda, karena saya belum pernah bertugas mendampingi nelayan perikanan tangkap. Ini menjadi pengalaman berharga bagi saya. Saya jadi tahu bagaimana karakter dan cara pandang nelayan di Indonesia,” katanya. Lewat pendampingan ini, Bayu menjadi paham bahwa potensi kekayaan alam laut Indonesia sangat besar.

OEMBOE BINTANG, PERCAYA PADA KEKUATAN KOLABORASI

Oemboe mengatakan, bahwa tidak ada manusia super yang bisa mengerjakan semua hal. Karena itu, untuk mencapai kemajuan bersama perlu kolaborasi, *sharing*, dan jaringan. “Saya percaya pada kekuatan *sharing*, *networking*, dan kolaborasi,” ungkapnya.



Kerja pendampingan dan pemberdayaan masyarakat bukan hal baru bagi Oemboe Bintang. Sejak tahun pertama kuliah S1 di Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, dia sudah melakukan hal itu. Karena itu, ketika Kemenkop UKM merekrut petugas pendamping koperasi modern, ia mencobanya. Ia lulus seleksi dan ditugaskan mendampingi Koperasi Bintang Laut Sejahtera (BLS) di Oesapa, Kota Kupang sejak pertengahan Juli 2024 hingga awal November 2024. Saat itu, ia melanjutkan tugas pendampingan yang sebelumnya dilakukan oleh Enggo Catur Srianto.

Meski tinggal melanjutkan, bukan berarti pekerjaan ini ringan. Master Jurusan Sosial-Ekonomi Peternakan dari Universitas Nusa Cendana itu menghadapi tantangan yang berat, yakni partisipasi anggota dan pengurus Koperasi BLS yang masih terbatas. Padahal untuk membangun kelembagaan dan tata kelola koperasi yang kuat, perlu partisipasi anggota dan pengurus. “Persoalannya, masing-masing pengurus dan anggota aktivitasnya beda-beda dan punya urusan masing-masing. Meskipun kami telah membuatkan *job desc* untuk pengurus, tapi masih susah dijalankan,” ujar Oemboe.

Berbagai pelatihan sudah diberikan dan fasilitas sudah disediakan, tetapi keterlibatan anggota dalam bisnis koperasi tidak meningkat secara signifikan. Pendamping seperti dirinya, lanjut Oemboe, harus terus mendorong dan memotivasi para anggota dan pengurus untuk memperkuat keterlibatannya dalam kegiatan koperasi. “Kami terus mengajak mereka satu per satu,” tambah Oemboe yang sebelumnya punya pengalaman tiga tahun sebagai pengembang bisnis dalam proyek pemberdayaan oleh Kemenkop UKM.

Di tengah segala persoalan itu, Oemboe berupaya untuk membangun pola pikir baru di kalangan anggota, pengurus koperasi, dan masyarakat. Salah satunya menekankan bahwa semua hal, termasuk membangun koperasi dan unit-unit bisnisnya, mesti melalui proses. Tidak bisa tiba-tiba menjadi besar.

Sejak awal bertugas, Oemboe, berusaha berkomunikasi intens dengan pengurus dan anggota koperasi demi menyamakan persepsi. Saat merancang program, misalnya, Oemboe menjelaskan secara detail programnya apa, tujuannya apa, kebutuhannya apa saja, dan sebagainya. Kalau ada masalah, bagaimana solusinya. Untuk setiap perencanaan, Oemboe membuat Plan A dan Plan B.

“Saya lebih memberikan pertimbangan, pengurus yang memilih mana rencana yang mau mereka jalankan. Seandainya pengurus tidak bisa melakukan pekerjaannya, baru saya ambil alih, terutama hal-hal yang bersifat teknis seperti pengurusan sertifikat halal,” kata Oemboe.

Dari pengalamannya menjadi pendamping Koperasi BLS, Oemboe melihat program korporasi nelayan berbasis koperasi yang dijalankan KKP bekerja sama dengan Kemenkop UKM, adalah program yang bagus karena dibarengi dengan pendampingan yang cukup panjang. Ini bukanlah program yang sekali diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, lalu dilepas begitu saja.

SURYA UTAMA, MENIMBA MANFAAT PENDAMPINGAN

“Tugas ini memberikan kesempatan saya untuk belajar. Karena, yang saya hadapi adalah warga yang memiliki pandangan berbeda-beda, saya perlu belajar untuk mencapai tujuan pendampingan. Tugas ini juga menambahkan rezeki berupa jejaring pertemanan, saudara, bertambahnya ilmu dan pengalaman. Itu semua rezeki yang patut disyukuri, tidak harus berbentuk uang atau materi,” kata Surya.



Menjadi pendamping masyarakat, bukan tugas baru bagi Surya Utama, lelaki kelahiran Perigi Gerung, Nusa Tenggara Barat 29 Agustus 1984. Ia sudah berkali-kali menjalani tugas itu beberapa tahun terakhir. Suatu hari pada bulan Juli 2024, ia diminta menjadi pendamping pada Program Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi di Koperasi Kerapu Warloka Bersinar, Desa Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia menduga, permintaan itu datang karena dia dianggap memahami kultur masyarakat di wilayah pendampingan. Meski begitu, misinya tidak mudah. Ia diminta mengembangkan koperasi lewat unit-unit usahanya agar berkembang semakin modern dan profesional. Sementara koperasi tempat ia ditugaskan sebagai pendamping baru didirikan pada 25 Maret 2024 dengan anggota 20 orang.

Ia bertugas mulai awal September dan akan berakhir pada Desember 2024. Selama pendampingan, ia menghadapi nelayan yang belum banyak memahami koperasi secara mendalam. Pengertian koperasi, menurut nelayan, sebatas lembaga simpan pinjam uang. "Pemahaman masih seperti ini. Dengan sosialisasi, pertemuan terus-menerus dengan anggota dan pengurus. Secara perlahan nelayan memahami bagaimana menjalankan koperasi," kata Surya Utama, Rabu (27/11/2024).

Di awal tugas, alumni Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram ini menemui tokoh masyarakat setempat. Hal ini dilakukan untuk memahami bagaimana kebiasaan warga hingga adat di lokasi pendampingan. Dari komunikasi ini, ia memahami apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. "Langkah berikutnya, saya menjalin komunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pihak pemerintah setempat," katanya.

Pada kesempatan itu, ia mengenalkan diri sebagai pendamping ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat. Komunikasi dilanjutkan ke aparaturnya pemerintah di level bawah. Sehingga ia bisa diterima dan bersinergi selama menjalankan tugas pendampingan.

Meski bukan tugas ringan, ia terdorong menjadi pendamping karena ingin berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat bawah. Ia ingin pelaku usaha kecil, termasuk nelayan, dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Setelah beberapa tahun menjalankan tugas ini, ia merasa menerima banyak manfaat dan rezeki.



Khotijah



Oemboe Bintang



Yudhistira Katoppo



Surya Utama



Kuswoyo



Muhammad Ilham Anugrah Bayu



Putri Novitasari



Enggo Catur Srianto

Adi Sumarna



Habibi Zamuli



Nafisah Al Mufidah



Lalu Rahmat Sohdi



Asep Syamsudin



Syahwan Ode



Mochammad Fahmi



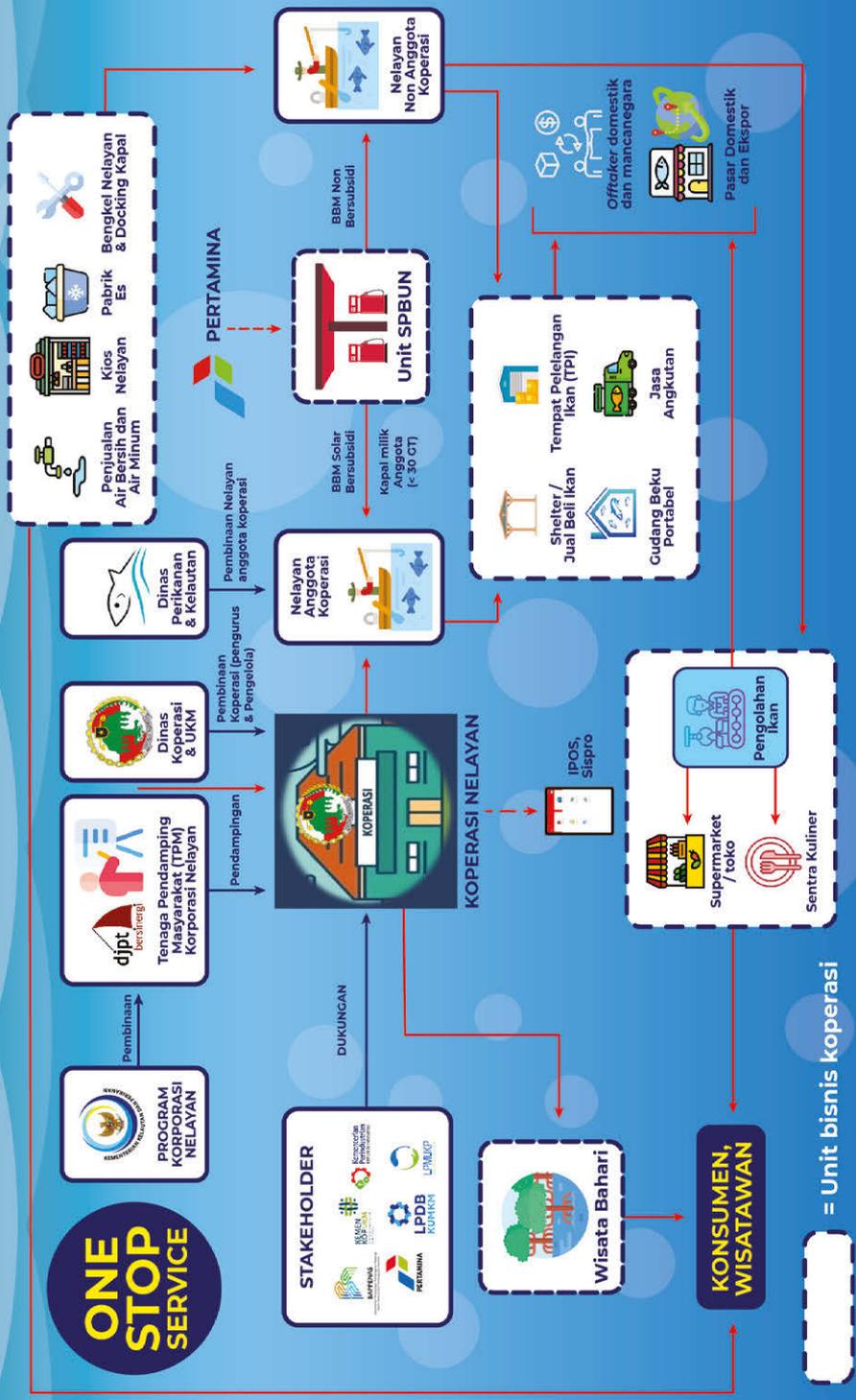
M Luqmanul Hakim



Abraham Horisanto



MODEL PENGEMBANGAN EKOSISTEM BISNIS melalui Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi



BAB V

Pelajaran Penting dari Program Korporasi

PERJALANAN PROGRAM KORPORASI nelayan berbasis koperasi memang belum sampai pada tujuan yang dicita-citakan. Namun, transformasi yang berjalan sedang mengarah ke sana. Perubahan dan pencapaian-pencapaian penting telah terjadi. Kini tinggal memperbaiki yang masih kurang serta menjaga konsistensi semangat berkoperasi.

Transformasi ini menuju ke arah kemandirian hidup nelayan, sehingga nelayan tidak bergantung sepenuhnya pada kemurahan alam. Nelayan diharapkan dapat mengolah hasil tangkapan ikan secara maksimal. Selain itu, nelayan juga harus mampu bertahan bahkan memiliki kegiatan usaha ketika datang masa paceklik.

Harapan positif itu muncul di Biak Numfor, Kupang, Lampung, Wakatobi, hingga Banyuwangi. Kecemasan nelayan saat musim paceklik mulai terjawab dengan adanya berbagai fasilitas produksi dan unit usaha.

Adanya tempat penyimpanan hasil tangkapan di Biak Numfor misalnya, memberikan nilai tambah bagi nelayan untuk menjaga kesegaran ikan dan pasokan ke pasar agar mendapatkan harga jual ikan yang lebih baik.

Begitu pun yang terjadi di Pulau Pasaran, Lampung, nelayan anggota koperasi tidak terlalu kebingungan saat harga ikan jatuh. Mereka akan menjual ikan pada saat yang tepat ketika harga menguntungkan nelayan. Mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada para pedagang ikan. Dari sini, pelajaran penting yang diperoleh nelayan adalah kemandirian usaha. Kekuatan yang sudah lama terpendam kini mulai muncul pelan-pelan.

Program korporasi mengajarkan nelayan berinisiatif untuk memiliki kegiatan usaha. Jika selama ini mereka hanya menjual hasil tangkapan ikan, nelayan sudah mulai tergerak membuat produk olahan ikan.

Masih di Lampung, nelayan Pulau Pasaran telah memproduksi berbagai produk olahan ikan teri, seperti keripik teri, peyek teri, sambal teri, atau teri goreng. Usaha ini dikembangkan sesuai potensi daerah tersebut sebagai penghasil ikan teri terbesar.

Ibu-ibu istri nelayan Koperasi Mina Berkah Lestari di Banyuwangi, Jawa Timur melakukan hal serupa. Potensi tangkapan cumi dimanfaatkan untuk memproduksi aneka sambal cumi. Meski masih dalam skala kecil, penjualan sambal cumi sudah mulai merambah ke Hong Kong. Sebuah pencapaian yang layak diapresiasi.

Di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, ibu-ibu di Koperasi Samata Padakkau memanfaatkan hasil laut yang melimpah menjadi produk olahan berupa abon, stik ikan, dan stik rumput laut. Skala usaha mereka masih kecil, tetapi sudah mendapat respons positif dari pasar. Jika konsistensi usaha ini dijaga dan dikembangkan serius, bukan tidak mungkin produk-produk olahan komunitas nelayan itu bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

Masih di Wakatobi, ada pelajaran penting tentang efisiensi usaha. Penguatan koperasi dalam kerangka program korporasi membuat unit usaha nelayan semakin efisien. Sebelumnya, nelayan kesulitan menjual hasil tangkapan laut karena tidak ada alat transportasi yang dibutuhkan. Warga bergantung pada pasang surut laut, sehingga pengangkutan hasil tangkapan menggunakan perahu.

Setelah bantuan alat transportasi yang tepat dengan kondisi jalanan di pemukiman nelayan, hasil tangkapan ikan bisa didistribusikan dengan lancar ke pelabuhan. Nelayan semakin produktif karena tidak membutuhkan waktu yang panjang dan minim risiko ketika mengantar ikan. Mereka yang tergabung di Koperasi Samata Padakkau pun memiliki usaha baru berupa jasa pengangkutan ikan dari pemukiman nelayan ke pelabuhan.

Ketika koperasi semakin dikuatkan, usaha koperasi semakin produktif, efisien, bernilai tambah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Unit-unit usaha yang telah dijalankan koperasi harus dijaga konsistensinya. Pada saat yang sama pengurus koperasi harus mampu menangkap peluang dan mengatasi tantangan yang mungkin akan muncul.

Sejauh ini, baru terdapat 5 kampung nelayan di 5 lokasi yang telah mengembangkan korporasi nelayan berbasis koperasi. Selain itu, ada 10 kampung nelayan lainnya di 10 kabupaten yang telah menumbuhkan koperasi sebagai badan usaha korporasi nelayan. Jumlah nelayan atau keluarganya yang mendapat manfaat dari program yang baru diwujudkan pada 2023 ini, mungkin baru ratusan atau ribuan nelayan. Sementara itu, berdasarkan data KKP pada 2022, ada 2,2 juta nelayan kecil yang tersebar di 11.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, program ini masih perlu terus digulirkan agar semakin banyak nelayan dan kampung nelayan yang mendapatkan manfaat.

Jika program ini diduplikasi di wilayah lain, simpul perekonomian baru makin bertambah banyak. Simpul-simpul itu tumbuh dengan kekuatan baru dan kemandirian secara ekonomi. Modal untuk mewujudkan hal itu bukannya tidak ada. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, pada 2023 ada 130.354 koperasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 14 persennya merupakan koperasi nelayan.

Di ujung kisah ini, semoga akan muncul simpul-simpul nelayan yang menjadi kekuatan ekonomi baru, yang berada di dekat sumber kekayaan laut.

Simpul-simpul koperasi nelayan bisa dikembangkan menjadi basis korporasi nelayan dengan syarat terdapat kerja sama dari semua pemangku kepentingan demi terwujudnya kesejahteraan nelayan melalui program korporasi nelayan berbasis koperasi.



GUDANG BEKU PORTABEL
DESA SAMBER - BINYERI

Segar Setiap Hari



**BUKITSAMBER IBINYERI
KALANG**



Epilog

Mengukir Masa Depan Nelayan dalam Semangat Asta Cita

TIGA TAHUN PERJALANAN Program Pengembangan Kelembagaan Korporasi Nelayan Berbasis Koperasi mencerminkan semangat kolaborasi yang sejalan dengan visi besar Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto—mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Program ini adalah langkah nyata dalam menempatkan masyarakat nelayan sebagai salah satu pilar penting pembangunan ekonomi berbasis maritim, sebuah fondasi kuat untuk menghadirkan kemandirian bangsa.

Dalam semangat Asta Cita, lembaga-lembaga koperasi yang telah tumbuh berkembang ini menjadi bagian dari ekosistem ekonomi berbasis kerakyatan yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan memanfaatkan aset secara optimal, menerapkan tata kelola yang akuntabel, dan mengembangkan kapasitas usaha, koperasi-koperasi ini mampu memberikan nilai tambah bagi hasil tangkapan nelayan, memperluas jaringan pasar, dan membuka akses pembiayaan yang lebih luas.

Namun, perjalanan ini baru permulaan. Cita-cita besar masih menanti untuk diwujudkan. Mari jadikan pengalaman dan pembelajaran ini sebagai inspirasi untuk terus menumbuhkan semangat kebersamaan. Lebih dari itu, koperasi ini juga menjadi manifestasi semangat gotong royong, sebagaimana ditekankan dalam visi Asta Cita untuk memperkuat solidaritas masyarakat. Dengan terus melibatkan berbagai pihak pemerintah, akademisi, praktisi, hingga masyarakat luas, kita dapat membangun sistem ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, sekaligus menyejahterakan kehidupan para nelayan sebagai penjaga garda depan kekayaan laut Indonesia.

Bagi para pengurus koperasi, pegiat pemberdayaan masyarakat, dan semua pembaca buku ini, program ini adalah panggilan untuk turut serta dalam perjalanan besar menuju kemajuan bangsa. Sebuah perjalanan yang tak hanya menghidupkan ekonomi pesisir, tetapi juga menjadi wujud nyata dari cita-cita luhur untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan mandiri.

Mari kita jadikan Asta Cita sebagai panduan, koperasi sebagai alat perjuangan, dan laut sebagai sumber keberlanjutan. Dengan semangat kolaborasi, mari kita wujudkan masa depan nelayan yang lebih berdaya dan sejahtera, di mana laut menjadi sumber kehidupan dan koperasi menjadi jembatan kesejahteraan.

“Simpul-simpul koperasi nelayan bisa dikembangkan menjadi basis korporasi nelayan. Tentu saja kerja sama dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan melalui program korporasi nelayan berbasis koperasi.”

“Program Korporasi Nelayan mengajarkan nelayan berinisiatif untuk memiliki kegiatan usaha. Jika selama ini mereka hanya menjual hasil tangkapan ikan, nelayan sudah mulai tergerak membuat produk olahan ikan.”

SEBAGAI salah satu negara bahari dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar, salah satunya pada sektor perikanan tangkap. Sektor ini menghidupi lebih dari dua juta keluarga nelayan yang sepenuhnya menggantungkan hidup pada hasil penangkapan ikan di laut. Berbagai tantangan masih dihadapi, baik terkait kapasitas individu dan kelembagaan, nilai tambah hasil tangkapan, akses pemasaran, dan tantangan lainnya. Salah satu langkah untuk mengatasinya adalah upaya kolektif melalui wadah usaha koperasi agar terbentuk kekuatan bersama, pencapaian skala usaha yang lebih besar, posisi tawar yang lebih kuat dan membangun kepercayaan mitra yang lebih kokoh. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjawab kebutuhan nelayan tersebut melalui Program Korporasi Nelayan untuk menciptakan nelayan yang berdaya dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

Buku ini merangkum gagasan, konsep, strategi dan tentunya cerita inspiratif bagaimana Korporasi Nelayan dibangun dengan basis koperasi. Ada ragam informasi penting, juga kisah-kisah yang diracik dengan gaya penulisan yang mengalir.

Selamat membaca.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

FACEBOOK: Humas Djpt
INSTAGRAM: @djpt_kkp
X: @djpt_kkp
TIKTOK: @djpt.kkp
WEBSITE: www.kkp.go.id

ISBN 978-623-493-322-2 (PDF)

